

## **BAB IV**

### **PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM**

#### **YANG DILAKUKAN JAMI'AH ALMUSLIM**

Pada bab ini akan dipaparkan temuan penelitian tentang pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan Jami'ah Almuslim dalam bidang lembaga pendidikan, dalam bidang sistem pendidikan, yang meliputi: tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, serta evaluasi, dan dalam bidang metodologi pendidikan.

#### **A. Pembaruan Dalam Bidang Lembaga Pendidikan**

Lembaga bermakna wadah atau tempat berlangsungnya suatu kegiatan, misalnya lembaga ekonomi, hukum, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya.<sup>1</sup> Di sisi lain, lembaga juga dapat disebut dengan institusi atau *pranata*.<sup>2</sup> Menurut Hasan Alwi, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.<sup>3</sup> Sedangkan kelembagaan adalah berasal dari lembaga dengan menambah awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti perihal yang bersifat lembaga.<sup>4</sup> Karena itu lembaga pendidikan merupakan organisasi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan paparan di atas, maka lembaga pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah institusi pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan bertanggung jawab penuh kepada Jami'ah Almuslim.

Sebagai suatu proses, pendidikan membutuhkan lembaga, karena kegiatan penulisan ilmu atau pemindahan pengalaman kepada orang lain, jika tanpa melalui suatu organisasi (lembaga) dalam pengertian yang luas, termasuk

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), cet. 3, h. 27.

<sup>2</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Kanisius, 1988), h. 144.

<sup>3</sup> Hasan Alwi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 655.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 656.

pendidikan, akan menyebabkan kegiatan tersebut tidak afektif, tidak efisien dan bahkan tidak maksimal. Sebagai suatu proses yang berlangsung secara kontinuitas, eksistensi pendidikan memerlukan kelembagaan. Lebih lanjut kemajuan pendidikan juga ditentukan oleh kualitas suatu institusi. Karena itu, institusi menempati posisi penentu terhadap kelangsungan dan kemajuan pendidikan, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting.<sup>5</sup>

Pendidikan Islam di Aceh sebelum tahun 1929 masih terpusat pada lembaga pendidikan *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* dan masih menganut sistem tradisional, terutama pada aspek kelembagaannya. Melihat kenyataan bahwa lembaga pendidikan tradisional di Aceh seperti itu, maka persoalan pertama yang mendapat perhatian serius Pengurus Jami'ah Almuslim adalah melakukan pembaruan pada aspek kelembagaan. Sejak awal berdirinya, Jami'ah ini sudah cukup tepat untuk dikatakan sebagai lembaga pendidikan modern. Sebab dibangun atas sistem yang jelas, yaitu didirikan secara kolektif oleh pengurus Jami'ah Almuslim dan dikelola pula secara kolektif, bukan secara individual sebagaimana yang sering terjadi pada lembaga pendidikan tradisional di Aceh yang lazimnya dimiliki oleh seorang Teungku atau keluarga Teungku.<sup>6</sup>

Pengurus Jami'ah Almuslim dalam melakukan pembaruan pertama kali dalam bidang kelembagaan pendidikan Islam ini memilih corak madrasah. Madrasah telah berhasil didirikan Pengurus Jami'ah Almuslim dalam waktu kurang dari lima bulan setelah Jami'ah ini dibentuk tahun 1929.<sup>7</sup> Madrasah Almuslim yang didirikan pada tanggal 13 April 1930 merupakan lembaga pendidikan yang pertama dibangun Jami'ah Almuslim. Untuk kepentingan operasional madrasah ini, Jami'ah Almuslim telah membangun sebuah gedung di halaman Mesjid besar Matangglumpangdua dengan ukuran lebih kurang 10 x 20 m, kapasitas dua lokal, terbuat dari kayu, dindingnya terbuat dari tepas dan

---

<sup>5</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, cet. 1 (Jakarta: Erlangga, t.t.), h. 86.

<sup>6</sup> Muhammad Nur Nikmat, Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Jami'ah Almuslim Peusangan, periode 1979-1984, wawancara di Medan, tanggal 6 September 2010.

<sup>7</sup> Jami'ah Almuslim didirikan pada tanggal 24 Nopember 1929, sedangkan Madrasah Almuslim didirikan pada tanggal 13 April 1930 (14 Zulkaidah 1348 H). Baca: Anggaran Dasar Jami'ah Almuslim Nomor 02/AD/I/1930, Tanggal 02 Januari 1930.

atapnya rumbia, meja tulis dan bangku duduknya terbuat dari papan panjang yang dapat memuat 4 orang murid. Hampir semua dana pembangunan madrasah ini disumbangkan oleh Ampon Chik Peusangan, yaitu Teuku Haji Chik Muh $\square$ ammad Johan Alamsyah di samping sumbangan masyarakat Peusangan lainnya. Setelah melihat perkembangan siswa Madrasah Almuslim semakin hari semakin bertambah dan tidak bisa tertampung lagi pada gedung tersebut, pengurus Jami'ah Almuslim membangun gedung baru permanen di atas tanah yang diwakafkan oleh Teuku Haji Chik Muh $\square$ ammad Johan Alamsyah (*Uleebalang* Peusangan) di dekat bukit Teungku di Gle, Kota Matangglumpangdua. Peletakan batu pertama pembangunan gedung baru tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram 1350 H. bertepatan dengan tanggal 28 Mei 1931 M<sup>8</sup> dengan luas 10 x 50 meter, kapasitas 4 lokal, ditambah 2 unit ruang kantor di samping kiri dan kanan yang terbuat dari beton, beratap genteng dan plavonnya dari triplek. Gedung ini sudah mulai ditempati pada tahun 1933.

Proses belajar mengajar pada madrasah dilaksanakan dalam kelas, mempergunakan bangku, meja dan papan tulis. Inovasi lembaga pendidikan Islam dari *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* ke bentuk madrasah tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, keagamaan, intelektual dan politik yang terjadi pada tahun 1900-an dalam masyarakat Aceh. Madrasah sebagai wujud pembaruan kelembagaan pendidikan Islam di Jami'ah Almuslim pada masa tersebut sebenarnya baru merupakan perluasan yang terbatas dari model *meunasah*, *rangkang* dan *dayah*. Dalam perkembangan selanjutnya, secara kelembagaan Madrasah Almuslim mengalami penyempurnaan secara beransur-ansur.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab III bahwa, meletusnya Perang Dunia ke-II pada tahun 1941 tidak hanya memporak-porandakan Eropa dan Asia Timur, tetapi juga Pemerintah Hindia Belanda di Asia Tenggara. Menjelang mendaratnya tentara *Fasisme* Jepang di Aceh, para ulama yang terikat dengan keanggotaan dalam jaringan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh

---

<sup>8</sup> Ismuha, *Riwayat Ringkas*, h.5.

<sup>9</sup>Yusri Abdullah, Ketua Jami'ah Almuslim periode 2010-2015 wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 01 Nopember 2010.

(PUSA) telah lebih dahulu membuat pertemuan rahasia dengan tentara Jepang di Singapura. Dalam pertemuan tersebut berhasil dicapai kesepakatan dan perjanjian rahasia dengan Jepang, bahwa para ulama yang tergabung dalam PUSA akan membantu dan bekerjasama dengan tentara Jepang apabila mereka mendarat di Aceh. Untuk dapat dikenal oleh tentara Jepang, ulama yang bekerja sama dengannya, secara rahasia diberi tanda pengenalan, kain kecil berleter "F", yaitu huruf kapital awalan nama Komandan Jepang "Fujiwara" selaku komando Pasukan yang akan mendarat di Aceh. Dalam golongan ulama leter F ini termasuk Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan beberapa orang dari pengurus Jami'ah Almuslim.<sup>10</sup> Karena kesibukan bekerjasama dengan Jepang dalam mengatur pemerintahan militer Jepang di Aceh, maka Madrasah Almuslim tidak berjalan sebagaimana mestinya. Teungku Abdurrahman sendiri ditarik ke Kuta Raja Banda Aceh untuk dilantik menjadi *Qâdî Tyo Syokyo Hoin* (Kepala Qâdî Mahkamah Agama). Sebagian para guru Madrasah Almuslim mengaktifkan diri dalam kesatuan militer Jepang seperti *Tokubet* dan Pemerintahan sipil atau perlengkapan militer Nipon lainnya.<sup>11</sup>

Dalam keadaan seperti itu Madrasah Almuslim masih dapat berjalan, walaupun dalam keadaan serba sulit, di bawah pimpinan Tengku Mahyiddin Yusuf yang didampingi oleh Teungku Muhammad Ali Balwy, Teungku Ahmad Abd. Gani, Teungku Muhammad Daud Hamzah dan Teungku Muhammad Yusuf Affan. Karena keadaan semakin hari semakin parah di bawah kontrol pemerintahan Jepang, mutu pendidikan Madrasah Almuslim menurun drastis, makanan sulit didapat, pakaian juga demikian, transportasi tidak menentu, sehingga membuat pelajar Madrasah Almuslim banyak yang tidak bisa masuk sekolah, Banyak juga di antara pelajar Madrasah Almuslim yang menjadi tentara Jepang, seperti *Giugun*, *Heiho*, dan pasukan-pasukan lain. Pelajar Madrasah Almuslim yang berasal dari luar daerah terpaksa pulang ke daerahnya, kemudian siswa yang masih belajar diwajibkan kerja paksa membuat lapangan terbang di

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 34

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 34. Bandingkan: Ismuha, *Riwayat*, h. 22.

Geulangglabu, lebih kurang tujuh kilometer sebelah selatan Matangglumpangdua (Sekarang: Kecamatan Peusangan Selatan), selama seminggu dalam satu bulan. Dalam keadaan yang serba sulit seperti itu, masyarakat Aceh tidak lagi terpikirkan masalah pendidikan, yang terpikir adalah apa yang bisa dimakan untuk esok hari dan kain apa yang bisa dijadikan kafan untuk membalut mayatnya, bila esok ia mati.<sup>12</sup> Kondisi semacam itu semakin hari semakin tidak menentu, akhirnya pada penghujung tahun 1942 Madrasah Almuslim tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.<sup>13</sup>

Setelah Indonesia Merdeka Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap yang sebelumnya tinggal di Kuta Raja Banda Aceh dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku *Qâdâ i Tyo Syokyo Hoin* (Kepala Qâdâ i Mahkamah Agama) kembali ke Matangglumpangdua dan mengajak Pengurus Jami'ah Almuslim dan guru-guru madrasahnyanya untuk mempertahankan Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan membentuk dan memimpin Laskar Mujahidin Peusangan, Teungku Muhammad Ali Balwy memimpin Laskar Pesido Peusangan, Tengku Mahyiddin Yusuf ditugaskan selaku kepala Negeri Peusangan, sedangkan Teungku Ismail Ibrahim menjadi Komanda Kompi Mujahidin Peusangan Aceh. Akibat dari kesibukan pengurus Jami'ah Almuslim dan guru-guru madrasahnyanya dalam pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, maka Jami'ah Almuslim bersama madrasahnyanya berada dalam keadaan agak fakum mulai di penghujung tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, yang perlu diingat bahwa Madrasah Almuslim tidak tutup pada tahun-tahun tersebut, akan tetapi tetap jalan walaupun tidak sebagaimana mestinya. Pada awal tahun 1946 Madrasah Almuslim di bawah pimpinan Teungku Ahmad A. Gani mulai mengembalikan semangat baru, dan setelah proses belajar-mengajarnya mulai lancar, pada tanggal 01 Nopember 1946 Madrasah Almuslim dinegerikan bersama dengan 180 madrasah lainnya di Aceh,<sup>14</sup> sehingga sejak saat itu nama Madrasah Almuslim menjadi Sekolah Rendah Islam (SRI) Matangglumpangdua.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail, *Sejarah*, h. 35.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 35

<sup>14</sup> Penegerian Madrasah Almuslim ini berdasarkan Qanun Nomor 01 Tahun 1946, tanggal

Setelah Indonesia Merdeka, dan Madrasah Almuslim dinegerikan, Pengurus Jami'ah terus mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Sekolah Menengah Islam (SMI) Almuslim didirikan pada tahun 1962, disusul dengan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Almuslim pada tahun 1969, setelah itu disusul dengan Madrasah Tsanawiyah Almuslim yang diresmikan pada tahun 1982, Sekolah Menengah Atas (SMA) Almuslim didirikan pada tahun 1982, disusul Pesantren Pertanian Almuslim yang didirikan pada tahun 1982, kemudian Madrasah Diniyah Almuslim didirikan pada tahun 1984, dan dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah Almuslim yang didirikan pada tahun 1989.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Jami'ah Almuslim dalam melakukan pembaruan lembaga pendidikan tidak saja mengambil corak madrasah, akan tetapi juga mengambil corak "sekolah". Menurut Muhammad Ali Ishak, hal tersebut terjadi sebagai upaya Jami'ah Almuslim dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan pendidikan nasional, dan juga merupakan respon Jami'ah Almuslim terhadap dampak global dari pembangunan nasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adaptasi sebenarnya telah dirintis sejak didirikan Madrasah Almuslim pertama kali pada tahun 1930, memperlancar proses pembaruan kelembagaan pendidikan Islam selanjutnya di Jami'ah Almuslim.<sup>17</sup> Dengan tetap mempertahankan visi pembaruan, Jami'ah Almuslim terus melakukan pembaruan dalam bidang kelembagaan. Pada tahun 1985 Jami'ah mengembangkan institusi pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi. Keberadaan perguruan tinggi makin memperkaya lembaga pendidikan pada Jami'ah Almuslim ini. Pembaruan bentuk kelembagaan dengan

---

01 Nopember 1946. Baca: Lampiran Musyawarah III Almuslim Peusangan Tahun 1989, h. 38. Baca juga: Badruzzaman Ismail, "Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh" dalam Badruzzaman Ismail (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Gua Hira', 1995), h. 174. Baca juga: Baihaqi A.K, "Ulama dan Madrasah Aceh" dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 154.

<sup>15</sup> Ismuha, *Riwayat*, h. 79.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Jami'ah Almuslim, Periode 1995-2000 wawancara di Lhok Seumawe, 27 Oktober 2010.

<sup>17</sup> *Ibid.*

menambah perguruan tinggi tentu dipengaruhi dorongan dari dalam (*instrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*). Mengenai dorongan dari dalam dapat dipahami dari sinyalemen M. Nur Nikmat bahwa pendirian perguruan tinggi memang sebuah keharusan, yang secara integral berkaitan dengan kebutuhan pokok Jami'ah yang sudah lama memiliki lembaga pendidikan formal yang lebih rendah dan ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh.<sup>18</sup> Akan tetapi motivasi *ekstrinsik* agaknya lebih kuat desakannya terhadap Jami'ah untuk segera mendirikan perguruan tinggi maupun akademi daripada motifasi *instrinsik*. Hal ini dapat dimaklumi karena pengembangan di segala bidang membutuhkan keahlian-keahlian yang diproduksi melalui perguruan tinggi. Demikian pula pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam skala global sebagai kontribusi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memang sebagai agen pembaruan (*modernisasi*). Perguruan tinggi juga sebagai pusat penemuan ilmu dan pengembangannya melalui penelitian. Kenyataan ini menyadarkan pengendali Jami'ah Almuslim untuk mengembangkan institusi pendidikannya berupa perguruan tinggi. Transformasi lembaga pendidikan pada Jami'ah Almuslim mulai dari tahun 1930 hingga pengembangan terbaru berbentuk STAI dan Universitas secara keseluruhan sampai tahun 2010 merupakan refleksi dari reaksi Jami'ah Almuslim terhadap berbagai tuntutan yang selalu berkembang dan berubah-ubah.<sup>19</sup>

Ringkasnya, lembaga pendidikan Jami'ah Almuslim telah mengalami pembaruan dari lembaga pendidikan tradisional Aceh berupa *meunasah*, *rangrang* dan *dayah* menjadi madrasah, sekolah, dan pendidikan tinggi. Secara vertikal terdapat 14 (empatbelas) lembaga pendidikan yang didirikan Jami'ah Almuslim mulai tahun 1929 sampai tahun 2010, walaupun lembaga pendidikan tersebut didirikan tidak dalam waktu yang bersamaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur Nikmat, Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984, wawancara di Medan tanggal 6 September 2010.

<sup>19</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2006-2010, wawancara di Matanglumpangdua, 2 Oktober 2010.

<sup>20</sup> Keempatbelas lembaga pendidikan tersebut, secara berturut-turut adalah: 1) Madrasah Almuslim (1930). 2) SMI Almuslim (1962). 3) PGA Almuslim (1969). 4) MTs Almuslim (1982). 5) SMA Almuslim (1982). 6) Pesantren Pertanian (1982). 7) Madrasah Diniyah (1984). 8) STIT Almuslim (1985). 9) Madrasah Aliyah (1989). 10) STIP Almuslim (1986). 11) STKIP Almuslim

Untuk lebih jelas menyangkut dengan corak pembaruan dalam bidang lembaga pendidikan yang dilakukan Jami'ah Almuslim dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 22. Corak Pembaruan dalam Bidang Lembaga Pendidikan**

Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Aceh sebelum Pembaruan	Pembaruan dalam Bidang Lembaga Pendidikan yang dilakukan Jami'ah Almuslim
Meunasah	Madrasah
Rangkang	Sekolah
Dayah	Perguruan Tinggi

Tampaknya pembaruan dalam bidang lembaga pendidikan ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dan perkembangan Jami'ah hingga sekarang. Pembaruan tersebut membawa Almuslim dapat tampil sebagai lembaga pendidikan yang maju dan semakin mendapat tempat dari berbagai pihak.

### **B. Pembaruan Dalam Bidang Manajemen**

Untuk menciptakan Jami'ah Almuslim sebagai sebuah organisasi modern yang akan membawa obor pembaruan pendidikan Islam di Aceh, diperlukan operasional manajemen organisasi yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik kemoderenan. Proses pengelolaan organisasi Jami'ah Almuslim menganut sistem pembagian kekuasaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga tidak tergantung pada seseorang. Banyak *dayah* tradisional akhirnya mengalami kegoncangan bahkan bubar, karena ditinggal wafat *Teungku Chik*-nya. Memang faktor *Teungku Chik* (pimpinan) sedemikian penting bagi suatu institusi *dayah* tradisional, sebagai pimpinan bahkan pemiliknya. Jadi perkembangan institusi *dayah* sangat ditentukan oleh figur *Teungku Chik* (pimpinan) *dayah* tersebut. Berbeda dengan Jami'ah Almuslim, sebuah organisasi yang sejak pertama

---

(1987). 12) AMIK Almuslim (1993). 13) Universitas Almuslim (2003). 14) STAI Almuslim (2010).

didirikan sudah menganut sistem manajemen modern. Jami'ah ini bukan milik perorangan, tetapi merupakan kepemilikan bersama yang bersifat kolektif dengan memiliki sejumlah ketentuan-ketentuan dan prosedur yang jelas tentang tata kepengimpinannya, sehingga dalam perkembangannya walaupun sudah berpuluh-puluh pimpinannya wafat, Jami'ah Almuslim masih tetap berdiri dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya guna mencerdaskan kehidupan masyarakat Aceh.

Jami'ah Almuslim sebagai sebuah organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan yang mengusung ciri kemodernan tidak dapat dilepaskan dari keorganisasiannya secara institusional. Sebab, komponen keorganisasian ini dapat dijadikan indikator untuk melihat apakah sebuah organisasi tergolong modern atau tidak. Jika organisasi mempunyai signifikansi antara berbagai sistem yang dibangun di dalamnya dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang baik, maka organisasi tersebut dapat digolongkan modern, tetapi jika tidak demikian, maka organisasi tersebut belum layak dikatakan modern. Aspek keorganisasian Jami'ah Almuslim sejak awal berdiri sudah cukup tepat untuk dikatakan organisasi yang dikelola secara manajemen modern. Sebab Jami'ah ini dibangun atas sistem yang jelas, yaitu didirikan secara kolektif oleh pengurus Jami'ah Almuslim dan dikelola pula secara kolektif, bukan secara individual sebagaimana yang sering terjadi pada lembaga pendidikan tradisional yang lazimnya dimiliki oleh seorang *Teungku Chik (kyai)*.<sup>21</sup>

Pengurus perdana Jami'ah Almuslim<sup>22</sup> terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan dilengkapi dengan tiga orang komisaris, dengan susunan personalianya secara lengkap sebagai berikut:

Ketua Jami'ah : Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap  
Wakil Ketua : Teungku Haji M. Amin Bugak

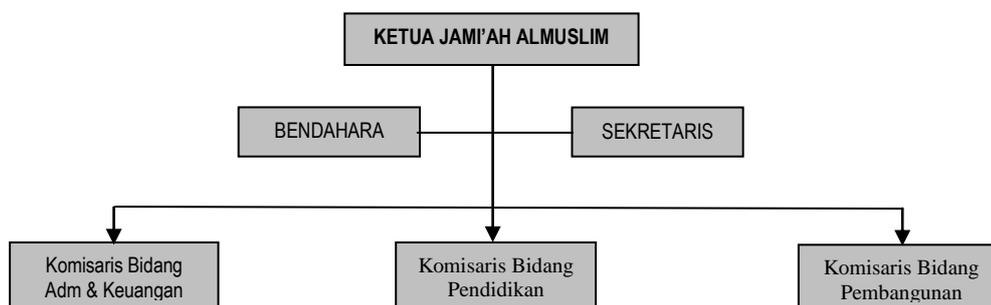
---

<sup>21</sup> Muhammad Nur Nikmat, Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984, wawancara di Medan tanggal 6 September 2010.

<sup>22</sup> Muhammad Ilyas Dawood, *Almuslim Peusangan At A Glance*, (Buku, tidak diterbitkan), h. 1.

Sekretaris : Engku Nurdin  
 Bendahara : Guru Husen Samalanga  
 Komisaris : 1. Teuku Haji Muhammad Ali  
                   2. Teungku Abdulrazak Jangka  
                   3. Teungku Chik Hamzah (Chik Peusangan)

Ketiga orang komisaris sebagaimana tersebut dalam kepengurusan perdana Jami'ah Almuslim, membidangi bidang tugas masing-masing. Teuku Haji Muhammad Ali bertindak sebagai komisaris bidang administerasi dan keuangan, Teungku Abdulrazak Jangka bertindak sebagai komisaris bidang pendidikan Sedangkan Teungku Chik Hamzah bertindak sebagai komisaris bidang pembangunan. Untuk lebih jelasnya menyangkut struktur personaila perdana Jami'ah Almuslim dapat dilihat pada gambar berikut:

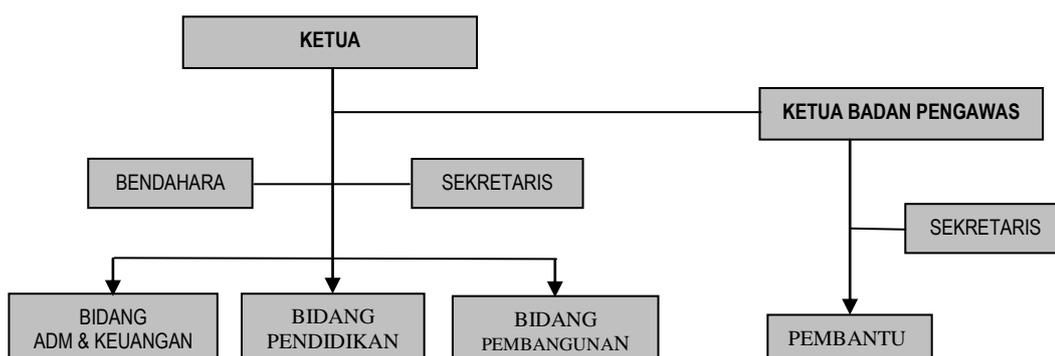


**Gambar 4:** Struktur Personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 1929-1958

Struktu personalia Jami'ah Almuslim seperti tersebut di atas mulai tahun 1929 dan tetap dipertahankan sampai tahun 1958. Personalianya mengalami pergantian sesuai dengan ketentuan organisasi: *Pertama*, di bawah kepemimpinan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap (Periode 1929-1949). *Kedua*, di bawah kepemimpinan Teungku Ibrahim Zen Meunasah Barat (Periode 1949-1957). *Ketiga*, di bawah kepemimpinan Teungku Abbas Bardan (Periode 1957-1971). *Keempat*, di bawah kepemimpinan Teungku Muhammad Abed Idham (Periode, 1971-1975). *Kelima*, di bawah kepemimpinan Teungku Muhammad Amin Bugak (Periode 1976-1983). *Keenam*, di bawah kepemimpinan H. M. A. Jangka. (Periode 1984-1989), *Ketujuh*, di bawah kepemimpinan H. M. A. Jangka kedua

kalinya (Periode 1989-1994). *Kedelapan*, di bawah kepemimpinan H. M. A. Jangka untuk ketiga kalinya (Periode 1994-1999) dan *Kesembilan*, di bawah kepemimpinan H. Muhammad Ali Ishak (Periode 1999-2004).<sup>23</sup> *Kesepuluh*, di bawah kepemimpinan Bupati Bireuen selama lima tahun yaitu, Mustafa A. Glanggang (2004-2007) dilanjutkan oleh Nurdin Abdul Rahman (2007-2010) dan *Kesebelas*, di bawah kepemimpinan Yusri Abdullah (2010-2015).

Struktur personalia di atas menunjukkan bahwa Pengurus Jami'ah Almuslim merupakan pemegang mandat administratif dalam menjalankan organisasi Serikat Almuslim untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Otorita tertinggi Jami'ah Almuslim berada pada pemilikannya yaitu masyarakat *Landschap* Peusangan yang suaranya diwakili oleh *Geuchik*, *Imum Meunasah*, *Imum Chik*, dan *Imum Mukim se-Landschap* Peusangan. Sebagaimana telah penulis jelaskan terdahulu bahwa pada tanggal 18 Maret 1959, Jami'ah Almuslim berstatus "Yayasan", berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tahun 1959, tanggal 18 Maret 1959.<sup>24</sup> Berdasarkan Akta Notaris tersebut disusunlah struktur personalia Jami'ah Almuslim yang baru. Untuk lebih jelasnya menyangkut struktur personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 1959-1983, dapat dilihat pada gambar berikut:



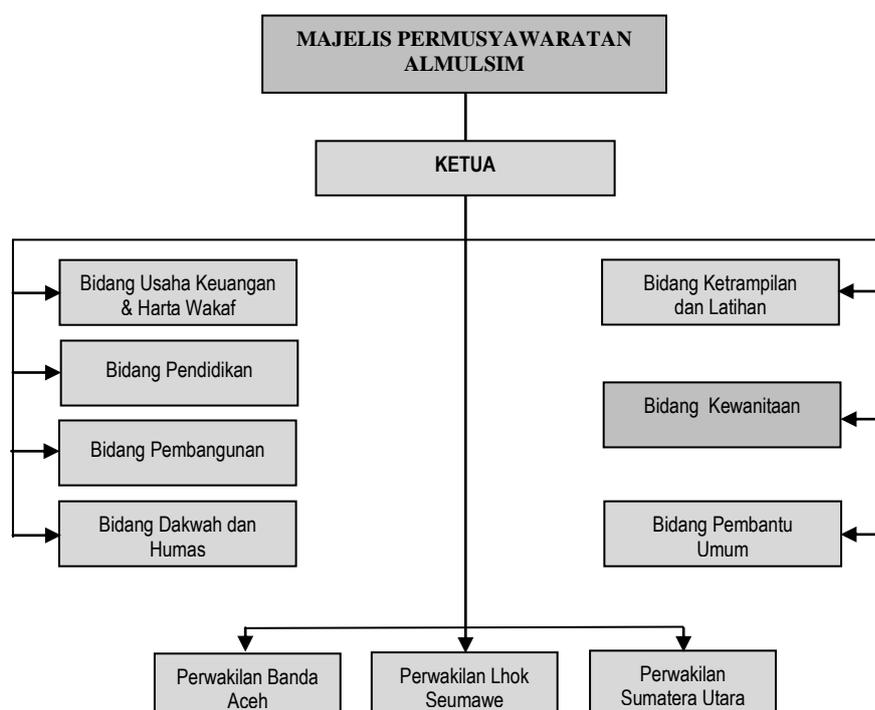
**Gambar 5:** Struktur Personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 1959-1983.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Baca: Dawood, *Almuslim*, hal. 5. Bandingkan: Ismail, *Sejarah*, hal. 49-51. Ismuha, *Riwayat Ringkat*, hal.1. Bandingkan dengan: Jami'ah Almuslim, *Suara Almuslim*, Nomor 02 Tahun I, Bulan Januari 1990 (Matangglumpangdua: PT Gajah Traso, 1990), h.19.

<sup>24</sup> Ismail, *Lintasan*, h. 45.

<sup>25</sup> Baca "Keputusan MPA", dalam *Kumpulan Keputusan Majelis Permusyawaratan*

Struktur seperti yang tergambar di atas berlaku pada Jami'ah Almuslim Peusangan mulai tahun 1959 sampai tahun 1983. Personalianya yang selalu mengalami pergantian sesuai dengan ketentuan organisasi Jami'ah Almuslim sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Pada tahun 1984 struktur personalia Jami'ah Almuslim mengacu kepada Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan Nomor 06/MPA/1984, tanggal 13 Nopember 1984 Masehi, bertepatan dengan 19 Safar 1905 Hijriah adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) yang merupakan lembaga tertinggi dalam Jami'ah Almuslim dan memiliki masa bakti 10 tahun dan Badan Pengurus Almuslim Peusangan (BPA) merupakan badan pelaksana harian dari Jami'ah Almuslim. BPA ini dilengkapi dengan sejumlah bidang dan memiliki masa bakti 5 tahun.<sup>26</sup> Untuk lebih jelasnya menyangkut struktur personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 1984-2009, dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 6:** Struktur Personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 1984-2009

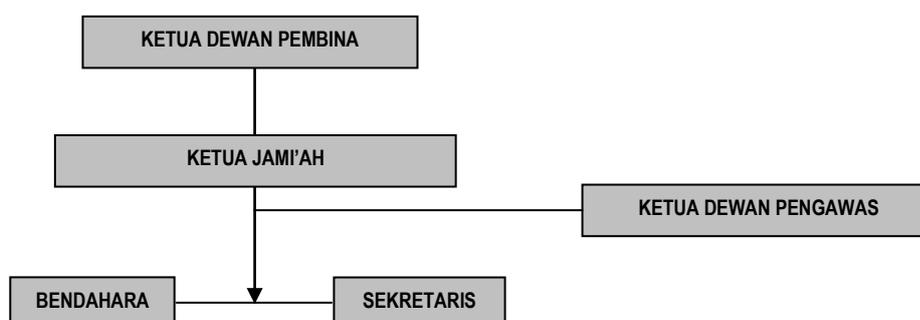
*Almuslim*, (Buku, tidak diterbitkan, 1984), h. 80-81. Bandingkan Ismail, *Lintasan*, h. 43.

<sup>26</sup> Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan”, dalam *Kumpulan Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan*, (Buku, tidak diterbitkan, 1984), h. 23.

Model struktur ini ditetapkan pertama sekali pada tahun 1984 dan tetap dipertahankan sampai tahun 2009. Setelah tahun 2009, struktur Jami'ah Almuslim kembali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Struktur tersebut meliputi tiga komponen utama yaitu: Komponen Badan Pembina, Komponen Badan Pengawas dan Komponen Badan Pengurus.

Struktur Personalia Jami'ah Almuslim pada tahun 2010 sepenuhnya telah mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Jami'ah harus memiliki tiga organ untuk dapat menjalankan organisasinya yaitu: (1) Organ Pembina, (2) Organ Pengurus, dan (3) Organ Pengawas. Untuk menyahuti isi Undang-Undang tersebut, maka Jami'ah Almuslim Peusangan Bireuen Provinsi Aceh, membentuk struktur barunya.

Untuk lebih jelasnya menyangkut dengan struktur personaila Jami'ah Almuslim dari tahun 1910-2015, dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 7:** Struktur Personalia Jami'ah Almuslim dari tahun 2010-2015<sup>27</sup>

Untuk mengisi personalia dari struktur di atas, maka Ketua Dewan Pembina Jami'ah Almuslim mengeluarkan penetapannya melalui Surat Keputusan Nomor 001/YAP/2010, tanggal 19 Juni 2010, tentang Pengurus Jami'ah Almuslim Periode 2010-2015 sebagai berikut:

<sup>27</sup> Baca Surat Keputusan Pembina Jami'ah Almuslim Peusangan Nomor 001/YAP/2010, Tanggal 19 Juni 2010.

**A. Pembina**

Ketua	: Hanafiah Ibrahim Sury
Wakil Ketua I	: Teungku Fauzi Murtadha
Wakil Ketua II	: H. M. Nur Ismail
Wakil Ketua III	: H. Abdul Gafar Hasan
Wakil Ketua IV	: H. Sulaiman As

**B. Pengurus**

Ketua	: H. Yusri Abdullah, S. Sos.
Wakil Ketua I	: Dr. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si.
Wakil Ketua II	: Teungku Saifullah, S.Ag, M.Pd.
Sekretaris	: Nazaruddin Abdullah, S.Ag, MA.
Wakil Sekretaris I	: Said Fajri, SH.
Wakil Sekretaris II	: Chairul Bariyah, SE.
Bendahara	: H. Azhari Az., S.Pd.
Wakil Bendahara	: Drs. Ilyas Ismail

**C. Pengawas**

Ketua	: Drs. H. Anwar Idris
Wakil Ketua	: Drs. Marwan Hamid, M. Pd.
Wakil Ketua II	: Teungku Abdul Rani Saleh

Struktur sebagai mana tersebut di atas termaktub dalam Akte Notaris Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 21 Juni 2010. Akte tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU.3258.AH.01.04. Tahun 2010, Tanggal 09 Agustus 2010.<sup>28</sup>

Agar aktifitas pendidikan dapat berfungsi seperti diharapkan, Jami'ah Almuslim tidak saja mengadakan pembaruan terhadap aspek manajemen kepengurusannya, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kelembagaan pendidikan di bawah pengelolaannya, sebagai upaya koordinasi dan maksimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya kependidikan agar tercapai

---

<sup>28</sup> Baca: Akte Pendirian Yayasan Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 21 Juni 2010, dan Keputusan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU.3258.AH.01.04. Tahun 2010, Tanggal 09 Agustus 2010, serta Surat Keputusan Pembina Yayasan Almuslim Nomor 001/YAP/2010, Tanggal 19 Juni 2010.

tujuan sebagaimana diharapkan. Sebagaimana telah penulis jelaskan di belakang, bahwa Jami'ah Almuslim pada tahun 1930 resmi mendirikan sebuah lembaga pendidikan modern yang berbentuk "madrasah". Agar diperoleh sistem penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, Jami'ah Almuslim mengusahakan sebuah sistem pengorganisasian dan manajemen penyelenggaraan madrasah yang lebih teratur.

Dalam operasionalnya, manajemen Jami'ah Almuslim ditangani oleh para pengurus, baik pengurus Jami'ah, pengurus madrasah, pengurus sekolah, pengurus universitas, pengurus sekolah tinggi, maupun pengurus organisasi lainnya. Seluruh kepengurusan memiliki *job description*, struktur dan tata tertib yang jelas. Di bawah koordinasi Jami'ah Almuslim, penyelenggaraan madrasah dilakukan secara terkontrol, baik dari segi proses pembelajaran, dan administernasinya secara menyeluruh maupun dari segi pembagian kewenangan antara pengurus Jami'ah dengan pimpinan madrasah dan pimpinan lembaga pendidikan lainnya di bawah pengelolaan Jami'ah Almuslim. Di bawah tahun 1929, pengorganisasian dan manajemen kependidikan model Jami'ah Almuslim seperti digambarkan di atas, bukan saja dianggap sebagai praktek tidak lazim di kalangan *dayah* Aceh, tetapi juga berlawanan dengan kecenderungan umum waktu itu, yang bertumpu pada manajemen pribadi, yang coba terus dipertahankan hingga sekarang.

Betapapun, sistem organisasi manajemen kependidikan yang ditawarkan Jami'ah Almuslim telah memberikan dampak yang cukup besar bagi terciptanya keteraturan dan kelanggengan penyelenggaraan madrasah, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Dengan dipanyungi Jami'ah Almuslim, madrasah sejak awal keberadaannya terus dikembangkan, selain terlindungi dari tekanan pemerintah kolonial yang represif, bisa mendapatkan wadah komunikasi, sehingga memudahkan dalam menghadapi berbagai perubahan di bidang pendidikan. Selanjutnya madrasah juga mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam memasuki komodernan yang sangat diperlukan, agar tidak terisolasi dari *maiusteam* pendidikan nasional. Pihak-pihak yang merasa agak keberatan dengan sistem pengorganisasian dan manajemen pendidikan yang dikembangkan Jami'ah

Almuslim adalah kalangan *dayah* sendiri, yang sistem penyelenggaraan pendidikannya sejak dulu dikelola secara pribadi di bawah (keluarga) Teungku Chik (kyai). Tidak diragukan lagi, sistem pengorganisasian dan manajemen pendidikan telah dapat memainkan peran pentingnya dalam dunia pendidikan Islam.

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan dalam bidang manajemen, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 23. Pembaruan dalam Bidang Manajemen**

Manajemen Organisasi sebelum Pembaruan	Manajemen Organisasi setelah Pembaruan
Kepemimpinan Individual ( <i>mono leader</i> )	Kepemimpinan kolektif (Yayasan)

### C. Pembaruan Dalam Bidang Sistem Pendidikan

Menurut Soenarwan, sistem ialah suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen-komponen dalam mana tiap-tiap komponen mempunyai fungsi khusus dan antara satu dan lainnya terdapat saling hubungan, intaraksi dan interdependensi yang secara bersama-sama menuju kepada tercapainya tujuan bersama.<sup>29</sup> Pembaruan sistem pendidikan yang penulis uraikan dalam sub bab ini meliputi aspek: tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode dan evaluasi pembelajaran.

#### 1. Pembaruan pada Aspek Tujuan

Salah satu aspek yang paling penting dalam pendidikan adalah tujuan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Soenarwan, *Pendekatan Sistem dalam Pendidikan*, Edisi Pertama, cet. 1, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1991), h. 7.

<sup>30</sup> Istilah “tujuan” dalam bahasa Arab dinyatakan dengan *ghayât* atau *andâf*, atau *maqâsid*. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah tujuan dinyatakan dengan *goel* atau *purpose* atau *objective* atau *aim*. Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, atau arah, maksud yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas. P. Hirst dan Peters lebih khusus memberikan pengertian tujuan adalah *the action of making one's way toward a point* [tindakan membuat sesuatu jalan ke arah sebuah titik]. Baca: P. Hirst, *The Logic Education*, cet. 1 (t.t.p: t.p, t.t). h. 7.

Secara umum tujuan pendidikan Islam ialah memelihara dan mengembangkan fitrah peserta didik, untuk taat dan patuh kepada Allah, mempersiapkannya supaya memiliki kepribadian muslim, membekali mereka dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk mencapai hidup yang sempurna, menjadi anggota masyarakat yang baik dan bahagia lahir bathin, dunia dan akhirat. Konferensi Pendidikan Islam Pertama Se-Dunia tahun 1977 di Makkah, yang dihadiri 313 orang sarjana Muslim dari berbagai negara mengemukakan konsensus bersama mengenai konsep dan sikap yang berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam yang menyatakan:

*The aim of Muslim education is the creation of the 'good and righteous man' who worships Allah in true sense of the term, build up the structure of his earthly life according to the shari'ah (law) and employs to sub serve his faith. [Tujuan pendidikan Muslim adalah menciptakan manusia yang baik dan benar' yang mengabdikan kepada Allah dalam pengertian yang sebenarnya, membangun struktur kehidupan duniawinya sesuai dengan syari'at dan melaksanakannya untuk menopang keimanannya].<sup>31</sup>*

Berbicara mengenai tujuan pendidikan dalam konteks pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan Jami'ah Almuslim agak unik nampaknya. Karena menjelang Jami'ah Almuslim didirikan, lembaga pendidikan Islam yang ada secara umum hanya berupa *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* yang masih memakai sistem tradisional.

*Dayah* merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang cara belajar, kurikulum dan metodologinya diselenggarakan dalam bentuk tradisional. Sebagaimana disampaikan Muhammad AR:

*Dayah is the traditional Islamic school which provides knowledge and institution in Islamic tenets. Traditional dayahs are institution that follow the old methodology in teaching Islamic Studies. As such they are not open to new innovative systems and curricula they are also rigid in drawing a line of demarcation between Islamic and secular subjects.<sup>32</sup>*

Pendidikan yang diselenggarakan di *dayah* adalah bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> *First World Conference on Muslim Education* (Jakarta: Inter Islamic University Cooperation of Indonesia, 1977), h. 2.

<sup>32</sup> Muhammad AR, *The Curriculum of Islamic Studies in Traditional: A Comparative Study*, Al-Jami'ah, Jurnal of Islamic Studies, Volume 39, Number 1 January-June, 2001, h. 19.

mendalami agama Islam, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut *tafaqquh fi ad-dîn* dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat serta dengan menggunakan sistem *halaqah* dan kitab klasik (*kitab kuning*) sebagai rujukannya. Tujuan semacam ini dapat ditelusuri berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Hasbi Amiruddin dan kawan-kawan pada lembaga pendidikan *dayah* di Aceh. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa, tujuan dasar dari institusi *dayah* adalah untuk mencetak santrinya yang *tafaqquh fi al-dîn* [mendalami ilmu agama] serta menghayati dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan serta ditujukan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah SWT di dalam kehidupan untuk kebahagiaan di akhirat yang dijadikan sebagai *final destination*, serta dapat menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain dengan ikhlas.<sup>33</sup> Karena alasan ini sehingga *dayah* tidak menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk menuntut ilmu pada lembaga tersebut, dengan alasan bahwa lulusan *dayah* tidak memiliki prospek pekerjaan yang cerah, karena orientasi pendidikannya adalah akhirat semata.<sup>34</sup>

Atas dasar itu, jauh hari sebelum Pengurus Jami'ah Almuslim mendirikan madrasahnyanya, hal pertama yang mendapat perhatian adalah menetapkan tujuannya, karena tujuan memiliki landasan penting yang akan mewarnai profil pendidikan yang dijalankan.<sup>35</sup> Untuk menjawab apa tujuan pendidikan pada Jami'ah Almuslim, dapat ditelusuri melalui anggaran dasarnya. Anggaran dasar tersebut setelah melalui beberapa tahapan dan proses yang panjang, akhirnya tepat tanggal 2 Januari 1930 telah berhasil mencapai kata sepakat, sebagaimana dijelaskan Harun Ismail, yaitu:

Anggaran Dasar Jami'ah Almuslim mulai disusun dari tanggal 17

---

<sup>33</sup> Hasbi Amiruddin, dkk., *Pengembangan Dayah Dalam Perspektif Ulama Dayah*, (Banda Aceh: Arraniry Prees, 2007), h. 78.

<sup>34</sup> Amiruddin, *Perkembangan Dayah*, h. 74

<sup>35</sup> Berbeda dengan Organisasi Muhammadiyah, walaupun didirikannya sudah dari tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, namun tujuan pendidikannya baru dirumuskan pada tahun 1936, tepatnya pada Kongres Muhammadiyah Seperempat Abad di Jakarta, dalam kongres tersebut dicapai suatu consensus mengenai tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah: "Menjabarkan pengadjaran Igama Islam kepada pendoedoek boemi poetera di dalam residensi Djokjakarta, dan hendak memadjoekan Igama Islam kepada anggota-anggotanja. Djafar Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah; Perspektif Ilmu Pendidikan* (Citapustaka Media, 2007), h. 118.

Agustus 1929 dan baru mendapat pengesahan pertama kali pada tanggal 02 Januari 1930. Dalam anggaran dasar tersebut dijelaskan bahwa salah satu usaha Jami'ah Almuslim adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mendidik dan membina generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.<sup>36</sup>

Tujuan pendidikan pada Jami'ah Almuslim adalah "Mencetak generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama, bangsa dan negara". Tujuan tersebut walaupun masih bersifat *abstraks* dan perlu diperjelas lagi untuk dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya, namun sudah dapat menggambarkan dengan jelas aspek pembaruannya dari tujuan pendidikan di lembaga pendidikan tradisional.

Hanafiah Ibrahim Suri ketika diwawancarai penulis menjelaskan bahwa, perumusan tujuan pendidikan Jami'ah Almuslim dilakukan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial, keagamaan, intelektual, dan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh pada saat itu. Setelah memperhitungkan kondisi objektif tersebut, maka ditetapkanlah tujuan pendidikan Islam Jami'ah Almuslim, yaitu mencetak generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan Agama, Bangsa dan Negara. Penyebutan kata "agama" dalam tujuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang dijalankan Jami'ah Almuslim bukan pendidikan sekuler. Penyebutan kata "Bangsa" pada tujuan tersebut untuk lebih menekankan kepada semangat kebangsaan, nasionalisme dan kebersamaan yang tinggi. Kemudian penyebutan kata "Negara" menunjukan bahwa pendidikan yang dijalankan Jami'ah Almuslim harus bisa memberi bekal agar dapat bekerja bagi peserta didiknya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera dalam sebuah negara yang dibangun bersama.<sup>37</sup>

Pernyataan pengurus Jami'ah Almuslim di atas menunjukkan bahwa

---

<sup>36</sup> Harun Ismail, *Lintasan Sejarah Almuslim dan Madrasahnyanya*, (Buku, tidak diterbitkan), h. 45-46.

<sup>37</sup> Hanafiah Ibrahim Suri, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Jami'ah Almuslim, Periode 2000-2010, dan Ketua Dewan Pembina Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 20 Agustus 2010.

tujuan pendidikan yang diterapkan pada Jami'ah Almuslim tetap mempertahankan *tafaqquh fi al-dîn* [mendalami ilmu agama] dalam rangka memperoleh kebahagiaan di akhirat, tetapi dengan tidak mengenyampingkan kebahagiaan di dunia. Peserta didik pada Jami'ah Almuslim harus dapat menguasai ilmu pengetahuan umum (*'aqliyyat; secular sciences*) dalam rangka merealisasikan salah satu tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi *Khâlifah Allâh* di muka bumi. Mempertahankan *tafaqquh fi al-dîn* [mendalam ilmu agama] pada Jami'ah Almuslim lebih dititik beratkan pada fungsi tradisional madrasah, yaitu sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional (*transmission of Islamic knowledge*), sebagai media pemelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*), dan sebagai media pencetak ulama (*reproduction of ulama*).<sup>38</sup>

Atas dasar tujuan tersebut, dibuatlah lambang Jami'ah Almuslim yang merupakan simbol pendidikan yang akan dijalankan Jami'ah. Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim tahun 1984, dijelaskan bahwa lambang Jami'ah Almuslim berbentuk segi lima yang dikelilingi oleh garis warna emas, terpancang lima sinar matahari berwarna merah kuning dalam kubah terbalik, dalam arti bentuk perisai, dengan dituliskan Jami'ah Almuslim dalam bahasa Arab, warna putih di tengahnya. Setiap sesuatu yang ditempatkan dalam lambang tersebut memiliki makna-maknanya tersendiri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan tahun 1984 sebagai berikut:

Arti dari lambang tersebut adalah: *Pertama*, Garis warna kuning emas yang mengelilingi lambang, memberi arti bahwa keagungan Allâh Yang Maha Esa. *Kedua* merah darah bentuk mata hari, berarti gagah dan berani, *Ketiga* tulisan Jami'ah Almuslim dengan bahasa Arab warna putih menunjukkan bahwa suci. *Kelima* merah kuning matahari, berarti Alquran dan Hadis. *Keenam* warna dasar biru muda, berarti damai dan bersatu. *Ketujuh* lima pancaran sinar matahari, berarti Islam ditegakkan atas lima rukun. Kesimpulannya, dengan kesucian dan keikhlasan, berani menegakkan agama Allâh berdasarkan Alquran dan Hadis, menuju masyarakat Aceh yang cerdas (ilmu pengetahuan dan teknologi), bersatu, aman dan tentram diikat oleh ukhwah Islamiyah yang abadi.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan Nomor 01/MPA/1984, tanggal 11 Nopember 1984.

Dari berbagai pendapat dan analisa tentang tujuan pendidikan Jami'ah Almuslim di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Jami'ah Almuslim adalah memiliki keterpaduan antara dunia dan akhirat, yang konsekwensinya perlu penyesuaian kurikulumnya.

Pembaruan tujuan pendidikan dilakukan Jami'ah Almuslim, karena pengurus Jami'ah Almuslim menilai tujuan pendidikan tradisional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam hanyalah untuk beribadah dan sekedar mempelajari ilmu agama (*tafaquh fi al-dîn*), serta untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat semata (*final destination*) adalah tujuan yang terlalu sempit, kurang, dan tidak sempurna, karena beribadah itu merupakan salah satu perintah Islam. Sedangkan pekerjaan duniawi yang menguatkan pengabdian kepada Allah juga merupakan perintah Islam. Dengan demikian, berarti termasuk tujuan pendidikan Islam juga, atas dasar itu, Jami'ah Almuslim memadukan tujuan pendidikannya yang meliputi dunia dan akhirat dengan mendalami ilmu agama (*tafaquh fi al-dîn*), ilmu pengetahuan umum (*'aqliyah; secular sciences*) dan teknologi.<sup>40</sup>

Pembaruan pada aspek tujuan menjadi penting artinya, karena proses pendidikan merupakan pusat pemberdayaan sumber daya manusia (*human resources*) agar mampu menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari arti penting pendidikan ini, maka pembaruan tujuan pendidikan dipandang sebagai *human investment*, yang berarti bahwa secara historis dan filosofis, pendidikan telah ikut mewarnai dan menjadi landasan moral dan etik dalam proses pemberdayaan sebagai landasan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan kebutuhan hidup asasi (*a necessity of life*), fungsi sosial (*social function/ijtimâiyah*), pengarah (*direction*), pengendali (*control*), pembimbing (*guidance*), *konservatif* (mempertahankan dan cita-cita suatu kelompok), dan *progressif* (membelakali dan mengembangkan

---

<sup>40</sup> Hanafiah Ibrahim Suri, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Jami'ah Almuslim, Periode 2000-2010, dan Ketua Dewan Pembina Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 20 Agustus 2010.

pengetahuan, nilai dan ketrampilan sehingga mampu menghadapi tantangan hidup). Untuk lebih jelasnya menyangkut dengan pembaruan pada aspek tujuan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 24. Pembaruan pada Aspek Tujuan**

Tujuan Pendidikan di lembaga pendidikan Tradisional sebelum Pembaruan	Tujuan Pendidikan pada Jami'ah Almuslim setelah Pembaruan
Pendidikan dilakukan hanya untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat semata ( <i>final destination</i> ) sebagai manifestasi dari <i>tafaqquh fi al-dîn</i>	Pendidikan dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Asas keseimbangan). Untuk merealisasi maksud di atas, maka yang menjadi tujuan pendidikan pada Jami'ah Almuslim adalah "Mencetak generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan Agama, Bangsa dan Negara".

Tabel di atas cukup memberikan penjelasan, bahwa pendidikan Islam yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tradisional adalah bertujuan untuk kebahagiaan di akhirat semata, komponen ini kemudian oleh Jami'ah Almuslim diperbarui dengan melakukan kombinasi yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan *pionir* yang eksis melakukan pembaruan di Aceh, tentu saja upaya pembaruan pada aspek tujuan pendidikan yang dilakukan Jami'ah Almuslim sifatnya masih sederhana. Akan tetapi posisinya sebagai *pionir* meletakkannya sebagai sumber inspirasi bagi banyak upaya pembaruan yang datang sesudahnya, patut mendapat tempat dalam eksistensi historisnya.

## 2. Pembaruan pada Aspek Pendidik

Pendidik<sup>41</sup> memegang peranan penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sebab kewajiban pendidik tidak hanya mentransformasikan pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih metode (*transfer of methodology*), akan tetapi dituntut mampu menginternalisasikan nilai-nilai (*transfer of value*) kepada peserta didik.<sup>42</sup>

Sebutan bagi pendidik pada lembaga pendidikan tradisional di Aceh dinamai dengan *teungku*. Secara hirarkis, *teungku* yang mengajar agama Islam pada lembaga tradisional di Aceh biasanya dibagi dalam empat tingkatan. *Pertama*, *teungku meunasah* yang mengajar anak-anak tingkat dasar (*ibtidaiyah*). *Meunasah* terdapat pada setiap desa (Aceh: *gampong/huta*). *Kedua*, *teungku rangkang* yang mengajar murid-murid tingkat *tsanawiyah* alumni *meunasah*. *Teungku rangkang* adalah guru muda pada dayah yang mengajar pada kelas rendah. Mereka adalah terdiri dari murid-murid tertentu dari kelas lima ke atas yang sudah menguasai pelajaran dan kitab-kitab tertentu, karena itu mereka ditunjuk oleh *teungku Chik* untuk mengajar murid-murid kelas satu dan kelas dua. *Ketiga*, *teungku balee* adalah *teungku* yang mengajar murid-murid tingkat *'alियah*

---

<sup>41</sup> Secara umum pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab untuk mendidik, para pakar menggunakan rumusan yang berbeda tentang definisi pendidik. Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajiban bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik.<sup>41</sup> Sutari Imam Barnadib mengemukakan, bahwa pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik.<sup>41</sup> Sedangkan Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.<sup>41</sup> Sementara Imam Al-Ghazali mendefinisikan pendidik adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati peserta didik, sehingga menjadi dekat dengan Khaliqnya. Baca: Al-Ghazali, *Ihya 'Ulûm al-ddîn*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1939), h. 13. Syarat bagi seseorang guru yang akan bertugas pada sesuatu lembaga pendidikan adalah memiliki kompetensi guru. Syarat minimal mereka memiliki dan menguasai ilmu yang akan diajarkan dan menguasai metode cara menyampaikannya. Di antara kompetensi guru yang penting lain menurut Abdurrahman An-Nahlawi adalah tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola pikir si anak didik, memahami berbagai problema kehidupan modern serta bagaimana usaha menghadapinya. Sebenarnya masih ada syarat-syarat lain, seperti sehat fisik dan psikis, memiliki bakat guru, berminat menjadi guru dan mampu menguasai kelas-kelas dimana dia mengajar. Baca: Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan Masyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 224.

<sup>42</sup> Ahmad Watik Pratiknya, *Pandangan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum*, dalam Fuaduddin dan Cik H. Hasan Basri, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 88.

lulusan *rangkang* di *balee*. Mereka merupakan alumni *dayah* yang mengabdikan diri untuk mengajar pada almamaternya beberapa tahun untuk membantu *Teungku Chik*. Keempat, *Teungku Chik* merupakan guru besar. *Teungku Chik* tidak lagi mengajar pada semua kelas, tetapi hanya mengajar pada kelas tinggi untuk *teungku balee*. Belajar dengan *Teungku Chik* merupakan pendalaman diskusi, dan tidak lagi terikat pada satu kitab, walaupun memakai kitab, tapi hanya sebagai pegangan saja.<sup>43</sup>

Tampaknya syarat-syarat menjadi *teungku* (guru) di lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh tidak dibuat sedemikian rumit. Hasil penelitian yang dilakukan Hasbi Amiruddin menunjukkan bahwa rekrutmen seorang guru di *dayah* masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional. Guru di lembaga pendidikan tradisional *dayah* tidak mendaftarkan diri untuk diangkat atau ditunjuk untuk menjadi guru, tetapi biasanya dengan kebiasaan ada temannya yang meminta bantuan untuk membantu teman tersebut memberi penjelasan sesuatu yang tidak diketahui. Jika kemudian dia dapat memberi penjelasan yang memuaskan, maka semakin banyak teman-teman yang lain akan ikut dia. Biasanya *Teungku Chik* yang sekaligus pimpinan *dayah* memberi izin atau menunjuk dia menjadi salah seorang guru pada *dayah* tersebut.<sup>44</sup>

Rekrutmen guru (*teungku*) pada lembaga pendidikan tradisional Aceh, berupa *dayah* tidak ada standar khusus yang diberlakukan. Rekrutmen mereka diserahkan kepada kepercayaan pimpinan *dayah* masing-masing, sehingga tidak ada ketentuan sehat jasmani dan rohani, memiliki bakat guru, berminat menjadi guru dan lain-lain. Cara-cara seperti ini masih tergolong sangat tradisional dan masih dipertahankan sampai hari ini pada *dayah-dayah* di Aceh.

Berbeda dengan apa yang dilakukan Jami'ah Almuslim. Sejak beroperasinya lembaga pendidikan ini, aspek tenaga pengajar (*teungku; mudarris; syakh; ustadz*) telah mendapatkan perhatian yang serius dari pihak pengelola. Untuk pertama kalinya, guru-guru yang direkrut sebagai tenaga

---

<sup>43</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama masyarakat Aceh*, (Lhok Seumawe: Nadiya Foundation, 2003), h 2-3.

<sup>44</sup> M. Hasbi Amiruddin, dkk., *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008), h. 72.

pengajar kebanyakan berasal dari kalangan pendidik yang profesional di masa itu. Menurut M. Ali Muhammad dalam sebuah makalahnya yang disampaikan pada Musyawarah ke-2 Jami'ah Almuslim tanggal 10 Nopember 1984 di Matanggumpangdua Bireuen Aceh, bahwa sejak Madrasah Almuslim didirikan dalam merekrut guru-gurunya sudah menerapkan berbagai persyaratan yang ketat. Di antara persyaratan tersebut adalah, *Pertama*, harus bertakwa kepada Allah. *Kedua* harus sehat jasmani dan rohani. *Ketiga* harus berpengetahuan tinggi sesuai bidangnya. *Keempat* memiliki kemampuan berbahasa Arab. *Kelima*, harus bisa bekerja sama. *Keenam* harus cakap dalam menyampaikan pelajaran dan *Ketujuh* harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.<sup>45</sup> Di samping itu, masih ada beberapa syarat lain seperti harus memakai celana panjang, tidak boleh memakai kain sarong waktu mengajar, guru harus mempergunakan papan tulis waktu mengajar dan lain-lain.<sup>46</sup>

Menurut Harun Ismail, dengan didasarkan pada peraturan tersebut, maka Jami'ah Almuslim, berhasil mendapatkan 7 (tujuh) orang guru pertamanya yang ditempatkan pada Madrasah Almuslim. Ketujuh guru tersebut adalah Teungku Habib Mahmud Meunasah Meucap yang merangkap selaku Kepala Sekolah, Teungku Haji Ridwan (Haji Cut) dari Cot Meurak Bireuen, Teungku M. Abed Pante Ara, Teungku Abbas Berdan yang lebih dikenal dengan Teungku di Jangka, Teungku M. Hasan Ibrahim Awe Geutah, Teungku Ibrahim Meunasah Barat (Ayah dari Teungku Khlail Ibrahim), Teungku Abdullah Musa selaku guru baris-berbaris sebagai pelajaran pra-kepanduan (*Padvinder*). Sedangkan Teungku Abdurrahman selaku pengawas dan inspeksi, yang kadang-kadang beliau mengajar menggantikan guru-guru yang berhalangan hadir. Pada tahun 1932, Jami'ah Almuslim harus menambah jumlah gurunya, karena bertambahnya

---

<sup>45</sup> M. Ali Muhammad adalah orang tua dari Bapak Ismuha yang merupakan salah seorang murid pertama madrasah Almuslim. Beliau juga adalah merupakan salah seorang Dewan Penasehat dalam Pengurus Jami'ah Almuslim Periode 1984-1989. Baca: M. Ali Muhammad, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketrampilan Peserta Didid Madrasah Almuslim*, (Makalah, tidak diterbitkan), hal.2-4.

<sup>46</sup> Khalil Ibrahim, Bendahara Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984 dan Wakil Ketua I Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1984-1989, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 18 Agustus 2010.

jumlah murid yang datang, bukan saja dari Aceh tetapi dari berbagai provinsi di Indonesia dan bahkan Malaysia. Karenanya Jami'ah Almuslim menambah 5 (lima) guru lagi yaitu, Teungku Usman Azis dari Lhoksukon, Teungku Bullah, Engku Sutan Nurdin dari Sumatera Barat, Teungku Azuddin Ali dan Teungku M. Hasan Ali.<sup>47</sup> Penetapan kriteria guru pada lembaga pendidikan sedemikian rupa, merupakan hal baru bagi lembaga pendidikan Aceh masa itu. Karena sebelumnya tradisi rekrutmen guru di lembaga pendidikan tradisional, biasanya diambil dari kalangan santrinya sendiri, tidak menerapkan berbagai persyaratan, yang penting mampu mengajar dalam arti membaca dan menjelaskan isi kitab kuning dan dipercaya pimpinan *dayah* (*teungku chik*).<sup>48</sup>

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan pada aspek pendidik yang dilakukan Jami'ah Almuslim, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25 Pembaruan pada Aspek Pendidik**

Pendidik pada lembaga Tradisional sebelum Pembaruan	Pendidik pada Madrasah Almuslim setelah Pembaruan
<p>Tidak ada syarat khusus untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan tradisional, yang penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu membaca dan menjelaskan isi kitab kuning (<i>klasik</i>).</li> <li>2. Dipercayai oleh <i>Teungku Chik</i> (pimpinan).</li> <li>3. Rekrutmen pendidik, kebiasaan dari kalangan santri di dayah tersebut.</li> </ol>	<p>Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menjadi pendidik (guru):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak harus, bahkan bukan direkrut dari kalangan siswa sendiri.</li> <li>2. Harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti: bertaqwa, sehat jasmani dan ruhani, memiliki pengetahuan tinggi sesuai bidangnya, memiliki kemampuan bahasa Arab, harus bisa bekerja sama, cakap menyampaikan pelajaran, memiliki rasa tanggungjawab, dan lain-lain.</li> <li>3. Rekrutmen guru bukan merupakan kepercayaan seseorang, akan tetapi menganut azas profesionalitas.</li> </ol>

<sup>47</sup> Baca: Ismail, *Sejarah*, h. 9 dan h. 26.

<sup>48</sup> Muhammad Daud Hanfiah, Dosen Pengajar Mata Kuliah Kealmusliman pada STIT Almuslim, juga pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 17 Agustus 2010.

Dalam wawancara dengan Amiruddin Idris diperoleh informasi bahwa rekrutmen tenaga pengajar yang dilakukan Jami'ah Almuslim tersebut merupakan model baru yang belum pernah dilakukan oleh lembaga pendidikan tradisional di Aceh pada masa itu.<sup>49</sup> Walaupun begitu, sebagai awal dari sebuah karya besar belum terpikirkan untuk me-*link-and-match*-kan kompetensi guru dengan bidang studi yang diajarkannya. Dalam kaitan ini yang menjadi pertimbangan rekrutmen tenaga pengajar adalah kemampuan yang tampak dari diri guru. Jadi, seorang tenaga pengajar yang mengajar fiqh atau hukum Islam tidak mesti harus alumni fakultas syariah. Hal ini wajar, sebab level pelajaran yang diajarkan waktu itu baru jenjang pendidikan menengah, dan pada waktu itu belum ada yang namanya perguruan tinggi seperti yang kita kenal sekarang.

Alasan lain dari belum diterapkannya prinsip *link-and-match* adalah belum adanya persyaratan akreditasi yang mendorong Jami'ah Almuslim untuk menyelidiki apakah seorang tenaga pengajar itu mengajarkan bidang studi yang sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Lagi pula, pada tahun 1930-an, keberadaan tenaga pengajar yang bergelar sarjana belum pernah terdengar di Aceh. Akan tetapi, beberapa waktu belakangan ini persoalan kompetensi tenaga pengajar itu menjadi persyaratan penting di Jami'ah Almuslim, sebab hal tersebut berhubungan dengan tuntutan *profesionalitas*.<sup>50</sup>

Secara formal, seorang tenaga pengajar dapat dikatakan profesional jika bidang studi yang diajarkannya sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimilikinya. Kesesuaian bidang studi dengan ijazah ini merupakan kriteria ideal bagi tenaga pengajar yang dicita-citakan oleh pengurus Jami'ah Almuslim. Itulah sebabnya, mekanisme rekrutmen tenaga pengajar di lembaga pendidikan ini

---

<sup>49</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2002-2006 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 19 Agustus 2010.

<sup>50</sup> *Ibid.*

dikategorikan sangat ketat.<sup>51</sup>

Ketatnya persyaratan yang diterapkan dalam perekrutan tenaga pengajar telah dilakukan sejak lembaga pendidikan ini berdiri. Dengan begitu, ada dinamika yang tidak bisa dihindari dalam kaitannya dengan kualifikasi tenaga pengajar. Dinamika tersebut berupa adanya pemantauan secara terus menerus yang dilakukan pihak Jami'ah Almuslim terhadap kinerja para tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas mereka.<sup>52</sup> Jika ada di antara tenaga pengajar yang dalam melaksanakan tugasnya ternyata tidak memiliki komitmen yang memadai, misalnya sering bolos atau kualitas mengajarnya ternyata sering menimbulkan masalah, misalnya tidak memiliki kemampuan metodologis yang memadai sehingga banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik, maka kepada mereka itu diberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis.

Kewenangan memberikan teguran ini, pada tingkat awal dilakukan oleh pihak pimpinan Madrasah, tetapi jika tindakan teguran ini dianggap tidak diindahkan, maka pihak pimpinan Madrasah meneruskan persoalan tersebut kepada pihak Jami'ah. Di tingkat Jami'ah inilah keputusan-keputusan besar berupa tindakan pemberhentian disertai ucapan terima kasih dan penolakan terhadap tenaga pengajar tertentu diambil.<sup>53</sup> Dalam wawancara dengan Khalil Ibrahim, diperoleh informasi bahwa:

Jika dilihat perkembangan tenaga pengajar Jami'ah Almuslim pada tahun-tahun awal, tampak jumlah mereka masih relatif sedikit, yaitu 8 orang, sehingga mereka ada yang harus mengajar beberapa bidang studi sekaligus, sambil mencari tenaga pengajar lain yang bisa direkrut menjadi tenaga pengajar tetap.<sup>54</sup> Berselang dua tahun kemudian, 1932, lembaga pendidikan ini telah memiliki tenaga pengajar 13 orang. Di sini tampak bahwa penambahan tenaga pengajar dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan riil lembaga pendidikan.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Khalil Ibrahim, Bendahara Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984 dan Wakil Ketua I Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1984-1989, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>55</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2002-2006 dan juga Wakil

Penambahan tenaga pengajar terus dilakukan Jami'ah Almuslim sejalan dengan bertambahnya jumlah siswa, terutama pada tahun ajaran 1940/1941, jumlah murid Madrasah Almuslim mengalami *booming*, maka Jami'ah Almuslim terpaksa harus mendirikan beberapa cabangnya<sup>56</sup> di berbagai tempat di Aceh.<sup>57</sup> Dari waktu ke waktu, Jami'ah Almuslim selalu berusaha untuk merekrut tenaga pengajar yang lebih *qualified* untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Persyaratan *link-and-match* bagi seorang guru terkait erat dengan prinsip *profesionalitas* guru yang profesional. Pengertian "*profesional*" dalam konteks tenaga pengajar di Jami'ah Almuslim dipahami sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma yang ditetapkan Jami'ah Almuslim, serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>58</sup> Di sini dipahami bahwa guru haruslah bekerja berdasarkan standar mutu yang ditetapkan melalui usaha, melengkapi dirinya dengan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang seharusnya ia sudah miliki sebelum menjalankan profesi keguruan. Dengan

---

Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 19 Agustus 2010.

<sup>56</sup> Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 32.

<sup>57</sup> Cabang-cabang Madrasah Almuslim tersebut adalah 1) Madrasah Almuslim Cabang Bugak, yang bertempat di Keude Bugak di bawah pimpinan Teungku Ibrahim Umar (Teungku Cot Bada). 2) Madrasah Almuslim Cabang Krueng Baro, yang berlokasi di halaman Mesjid Krueng Baro di bawah pimpinan Teungku Zakaria Ahmad. 3) Madrasah Almuslim Cabang Lueng Daneun yang didirikan di lueng Daneun di bawah Pimpinan Teungku Hasballah. 4) Madrasah Almuslim Cabang Jangka, yang beralamat di Jangka di bawah Pimpinan Teungku Abd. Razak. 5) Madrasah Almuslim Cabang Makmur yang didirikan di Leubue di bawah Pimpinan Teungku Zakaria Ahmad. 6) Madrasah Almuslim Cabang Bale Seutuy, yang berlokasi di Bale Seutuy, di bawah Pimpinan Teungku Syekh Hamzah. 7) Madrasah Almuslim Cabang Cot Batee, yang didirikan di Cot Batee Bireuen di bawah Pimpinan Teungku di Cot Batee. 8) Madrasah Almuslim Cabang Cot Meurak yang berlokasi di Cot Meurak, di bawah pimpinan Teungku Muhammad Cot Meurak. 9) Madrasah Almuslim Cabang Blangbladeh, yang didirikan di Blangbladeh di bawah Pimpinan Teungku di Blangbladeh. Baca: Ismuha, "Riwayat Ringkas Almuslim Peusangan" dalam *Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim, 1984* (Buku, tidak diterbitkan, 1989), h. 6.

<sup>58</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Beserta Penjelasannya dalam M. Yunus Namsa, *Kiprah Baru Profesi Guru Indonesia: Wawasan Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2006), h. 199.

begitu, seorang guru wajar mendapat bayaran yang layak untuk biaya penghidupannya, karena profesi yang dipilihnya didukung oleh kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Berdasarkan informasi terakhir tahun 2010 yang disampaikan Amiruddin Idris, Wakil Ketua Jami'ah Almuslim, diketahui bahwa guru, dan dosen yang ada pada lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim terus dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Hal ini dikuatkan oleh Muchtar Alamsyah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Almuslim, yang menyebutkan bahwa STIT Almuslim memiliki 120 orang staf pengajar, hanya 7 (tujuh) orang di antaranya yang masih bergelar S1, selebihnya 3 (tiga) orang bergelar doktor (S3) dan 110 orang bependidikan magister (S2), sesuai dengan bidang masing-masing,<sup>59</sup> sehingga Prodi PAI yang merupakan satusatunya Program Studi pada STIT Almuslim sampai tahun 2010 mendapat akreditasi B dari BAN-PT Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Demikian juga dengan keadaan guru dan dosen pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang berada di bawah Jami'ah Almuslim. Faktor guru mendapat perhatian serius, baik dari lembaganya maupun dari pengurus Jami'ah Almuslim secara regulasi dan akomodatif guna mewujudkan guru dan dosen yang profesional. Amiruddin Idris lebih jauh menjelaskan bahwa, prinsip *profesionalitas* haruslah menjadi bagian tidak terpisahkan dari guru dan dosen yang profesional. Perlu ditegaskan di sini bahwa profesi guru dan dosen pada lembaga pendidikan di bawah pengelolaan Jami'ah Almuslim adalah bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

---

<sup>59</sup> Mukhtar Alamsyah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Almuslim, wawancara di Matanglumpangdua, tanggal 28 Agustus 2010.

<sup>60</sup> Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 038/BAN-PT/Ak.XII/2009, tentang status, peringkat, dan hasil akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

- dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.<sup>61</sup>

Prinsip-prinsip yang demikian terus mendapat perhatian lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim, karena kualitas proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh gerak dan kepiawian seorang guru. Kepiawian tersebut erat kaitannya dengan *profesionalitas*. Sistem rekrutmen dan pembinaan tenaga pengajar pada lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan guru (*teacher empowerment*). Hal ini dianggap sesuatu yang sangat penting maknanya, karena pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.<sup>62</sup>

### **3. Pembaruan pada Aspek Peserta Didik**

Peserta didik merupakan salah satu aspek terpenting dalam pendidikan, di samping tujuan, pendidik, materi, metode dan evaluasi. Dari struktur dan kondisi *fisiologis* serta *psikis*. Peserta didik memiliki dimensi-dimensi yang sama dengan manusia dewasa. Dia juga memiliki kebutuhan biologis dan psikis, persis seperti pendidik. Peserta didik akan hadir aktif tidak sekedar dengan bentuk jasmaniahnya yang kasar, tapi juga membawa dimensi ruhaniahnya dengan segala

---

<sup>61</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2002-2006 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 19 Agustus 2010.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan nasional, Pasal 39 ayat 2.

potensi yang diferensial. Peserta didik harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kemampuan sekaligus kemerdekaan mengembangkan dirinya. Dengan demikian akan tercipta praktik pendidikan yang benar-benar *humanistik*.<sup>63</sup>

Di *dayah* sebutan untuk peserata didik dinamai dengan murid. Sebagian orang Aceh menyebutnya dengan *murib*. Istilah ini mendominasi istilah populer di Indonesia. Pada umumnya murid ini menetap di *dayah*, mendiami *rangkang* yang dibangun di sekitar *dayah*. Semua murid-murid yang belajar pada *dayah* juga disebut dengan istilah *teungku*, sebagai do'a dan harapan semoga mereka nantinya menjadi *teungku* dan dalam perkembangannya juga disebut santri.<sup>64</sup>

Santri berbeda dengan siswa yang ada pada sekolah atau madrasah. Perbedaan tersebut tampak antara lain bila diidentifikasi usia rata-rata mereka, proses seleksi masuk, materi dan sistem belajar yang mereka ikuti, kebiasaan dan pola hidup sehari-hari, dan lingkungan belajar pada umumnya.<sup>65</sup> Perbedaan usia di kalangan santri tidak dipersoalkan, tingkat penguasaan ilmu tertentu juga tidak menjadi syarat bagi diterima atau ditolaknya seorang santri ketika pertama kali mendaftarkan diri ke *dayah*, karena pada dasarnya *dayah* tidak melakukan semacam tes atau seleksi masuk bagi para calon santrinya.

Pendapat senada disampaikan Muhammad Daud Hanafiah ketika diwawancarai menjelaskan bahwa tradisi *rekrutmen* murid (santri) pada *dayah* di Aceh menjelang lahirnya Jami'ah Almuslim masih dipertahankan sampai sekarang di *dayah-dayah salafi* dengan tidak mempertimbangkan batas usia, tingkat penguasaan ilmu tertentu juga tidak menjadi syarat bagi diterima atau ditolaknya seorang santri ketika pertama kali mendaftarkan diri ke *dayah*, tidak ada tes masuk, sistem belajar masih tradisional.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Baharuddin, *Pendidikan Humanistik* ( Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 187.

<sup>64</sup> Dalam budaya masyarakat Aceh, kalau seseorang disebut *teungku*, padahal ia bukan santri dan bukan orang alim, maka penggunaan istilah *teungku* adalah penghormatan.

<sup>65</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h.93.

<sup>66</sup> Muhammad Daud Hanfiah, Dosen Pengajar Mata Kuliah Kealmusliman pada STIT Almuslim, juga pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di

Tradisi semacam itu masih dipertahankan sampai sekarang di *dayah-dayah salafi* atau *dayah-dayah tradisional* Aceh. Inilah yang pertama diperbarui Jami'ah Almuslim ketika menerima siswa perdananya. Madrasah Almuslim dalam ukuran pendidikan sekarang setingkat dengan jenjang pendidikan menengah. Siswa yang diterima pada Madrasah Almuslim adalah lulusan setingkat *Vorvlgschool*,<sup>67</sup> *Inlandsche School* (sekolah Belanda yang lama belajarnya lima tahun) dan sudah mahir membaca Alquran, Bahasa *Jawo* (Bahasa Melayu) dan sudah menamatkan berbagai kitab ukuran pendidikan Meunasah.<sup>68</sup>

Menurut Harun Ismail dan Ismuha, pada tahun pertama Madrasah Almuslim menerima murid perdananya dalam dua tahap. Tahap pertama penerimaannya dilakukan pada bulan April 1930 sebanyak 40 Orang, sedangkan pada tahap kedua penerimaan dilaksanakan pada bulan Agustus 1930 sebanyak 40 orang.

Dalam wawancara dengan Muhammad Ali Ishak di Lhokseumawe diperoleh informasi, bahwa Madrasah Almuslim dalam penerimaan siswa barunya adalah sudah melakukan seleksi terhadap beberapa aspek. *Pertama*, seleksi kemampuan siswa; berupa mahir membaca Alquran dan Bahasa *Jawo*, dan sudah menguasai kitab-kitab yang diajarkan pada tingkat *meunasah*. *Kedua* seleksi batas umur. Khusus batas umur yang diterima pada Madrasah Almuslim adalah ukuran tamatan belajar pada *Vorvlgschool*, *Inlandsche School*. Walaupun penetapan batas umur pada waktu itu tidak begitu ketat dan agak sedikit longgar. *Ketiga* tingkatan yang diterima adalah tingkat Aliyah kalau ukuran sekarang. Seleksi-seleksi semacam ini tidak pernah dilakukan pada lembaga tradisional di Aceh di bawah tahun 1930.<sup>69</sup>

---

Matanglumpangdua, tanggal 17 Agustus 2010.

<sup>67</sup> *Vervolgschool* merupakan sekolah lanjutan dari *velksschool*, lama belajarnya dua atau sampai tiga tahun. Sedangkan *velksschool* sendiri merupakan sekolah Desa yang lama belajarnya tiga tahun.

<sup>68</sup> Baca: Ismuha, *Riwayat Ringkas Almuslim Peusangan*, (Buku, tidak diterbitkan, 1984), hal. 6. Prof. Dr. Ismuha, SH yang nama Aslinya adalah Ismail Muhammad Syah merupakan salah satu murid perdana Madrasah Almuslim tahun 1930, dan juga alumni perdana Madrasah Almuslim tahun 1936.

<sup>69</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara, Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan pada komponen peserta didik yang dilakukan Jami'ah Almuslim, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 26. Pembaruan pada Aspek Peserta Didik**

Peserta didik pada lembaga Pendidikan Tradisional sebelum Pembaruan	Peserta didik pada Madrasah Almuslim setelah Pembaruan
1. Tidak ada tes masuk	1. Mengikuti tes masuk
2. Tidak ditentukan usia	2. Dibatasi usia
3. Tidak ada persyaratan harus menguasai ilmu tertentu	3. Disyaratkan menguasai ilmu tertentu.
4. Tidak jelas tingkatan	4. Tingkatan pendidikan jelas

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Jami'ah Almuslim telah membuat terobosan baru dalam sistem penerimaan siswa, dengan merombak tradisi yang selama ini berlaku pada *dayah*, walaupun masih dalam tahap-tahap terbatas. Sistem ini akan terus dimodifikasi dan dibuat inovasi sesuai dengan perkembangan zaman.

#### 4. Pembaruan pada Aspek Kurikulum

David Pratt mendefinisikan kurikulum sebagai *an organized set or formal educational and/or training intention* [seperangkat perencanaan atau media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan yang diidamkan].<sup>70</sup> Atas dasar itu, kurikulum dipahami dalam empat termiologi; *pertama*, kurikulum sebagai produk (sebagai hasil pengembangan kurikulum), *kedua*, kurikulum sebagai program (alat yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan), *ketiga*,

<sup>70</sup> David Pratt, *Curriculum Design and Development* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), h. 4. Para ahli lain juga telah banyak mendefinisikan kurikulum di antaranya: Zakiah Daradjat berpendapat bahwa kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Baca: Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 121. Al-Syaibani mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Baca: Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 485.

kurikulum sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa (sikap, keterampilan tertentu), dan *keempat*, kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa.<sup>71</sup>

Kurikulum yang akan dibahas dalam subbab ini dibatasi hanya kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang diharapkan akan dipelajari oleh siswa. Karena model kurikulum pada era tahun 1930-an di Aceh dan di Indonesia umumnya masih dalam pengertian yang sangat sederhana.

Menjelang lahirnya Jami'ah Almuslim materi pelajaran yang diajarkan pada *dayah* masih berkisar pada: 1). Nahwu (*sistaksis*) dan Sharaf (*morphology*) 2). Ilmu Fiqh (*'ilm al-fiqh*), 3). Usûl Fiqh (teori hukum). 4). Ilmu Hâdits (*'ilm al-hâdis*), 5). Ilmu Tafsir (*'ilm al-tafsîr*), 6). Ilmu Tauhîd (*'ilm al-kalâm; teologi*), 8). Tasawuf, dan Etika 8). Cabang-cabang lain seperti Târikh dan Ilmu Balaghah (*'ilm al-balâghiyyat; retorika*).<sup>72</sup> Sedangkan Ilmu Bahasa Arab (*'ilm al-lughat al-'Arabiyyat*) diajarkan hanya sebagai alat untuk memahami teks-teks kitab saja. Seluruh mata pelajaran yang diajarkan di *dayah* semuanya berdasarkan pada karya-karya Syâfi'i dan karya-karya tersebut mempergunakan bahasa Arab klasik.<sup>73</sup> Sedangkan mata pelajaran umum (*'aqliyyat; secular sciences*) tidak mendapatkan tempat di *dayah salafi* sampai dengan sekarang. Sesudah Madrasah Almuslim dioperasionalkan pada tahun 1930, maka aspek kurikulum mendapat perhatian yang cukup serius.

Kurikulum yang digunakan pada Jami'ah Almuslim, disesuaikan dengan tujuan Jami'ah itu sendiri dengan tetap menekankan agama, bangsa dan negara, yaitu: Mencetak generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka muatan kurikulum yang diterapkan pada Madrasah Almuslim adalah

---

<sup>71</sup> S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5-9.

<sup>72</sup> Baihaqi, A.K. *Ulama*, h. 160.

<sup>73</sup> Amiruddin, *Menatap Masa*, h.52. Baca juga Seyyed Hossein Nasr, "Tradisional Islam in The Modern World" Jerj. Lukman Hakim, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1994), h. 169-176.

berkisar pada komposisi 30 % pelajaran umum (*'aqliyyat; secular sciences*) dan 70 % pelajaran agama (*naqliyyat; religious sciences*).<sup>74</sup>

Harun Ismail dalam bukunya yang berjudul *Lintasan Sejarah Almuslim Peusangan dan Madrasahny* menjelaskan bahwa Madrasah Almuslim sejak pertama didirikan telah menggunakan kurikulum yang dikombinasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum dengan porsi 70 % agama (*naqliyyat; religious sciences*), dan 30 % umum (*'aqliyyat; secular sciences*).<sup>75</sup> Menyangkut mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Almuslim tersebut, Ismuha menjelaskan bahwa mata pelajaran meliputi Bahasa Arab (*al-lughat al-'Arabiyyat*), Alquran, Hadis, Tauhid (*teologi*), Ilmu Fiqh (*'ilm al-fiqh*), Ushûl Fîqh (teori hukum), Ilmu Akhlak, Tasawuf, Ilmu Mantîq (*logika*), Sejarah Islam (*târîkh al-Islâm*), Ilmu Jiwa, Ilmu Pendidikan, Ilmu Hisab atau *arithmetic* (*'ilm al-hisâb*), Ilmu Bumi (*'ilm al-Jughrafiyyat*) dan Kesenian (*'ilm al-hay'at*). Semua mata pelajaran ini diberikan dalam bahasa Arab. Di samping mata pelajaran tersebut ditambah lagi dengan cara berorganisasi, latihan pidato, olah raga, kepanduan (Pramuka) dan ketrampilan musik.<sup>76</sup>

Hal senada juga disampaikan Muhammad Ilyas Dawood, Dekan Koordinator Perguruan Tinggi Almuslim, dalam laporannya di depan delegasi Kongres Internasional mengenai Islam dan Kependudukan di Kampus Perguruan Tinggi Almuslim menjelaskan bahwa sejak pertama kali mata pelajaran yang diajarkan pada Madrasah Almuslim sudah mencakup ilmu-ilmu umum (*al-'ulûm al-'aqliyyat; sekular*) dan ilmu-ilmu agama (*al-'ulûm al-syar'iiyyat/al-*

---

<sup>74</sup> Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 22.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Ismuha, *Riwayat Ringkas*, hal.3-4. Menurut Harun Ismail, pada tahun 1933 Madrasah Almuslim mengalami perubahan yaitu: *Pertama*, mata pelajaran agama terdiri dari: fiqh dengan kitabnya *at-Tahrir*, Tafsir dengan kitabnya *as-Sawi/Jalalain*, Hadits, dengan kitabnya *Tajrid as-Sharih/Fath al-Mubin*, Tauhid, *Husn al-Hamidiyah*, Ilmu Akhlak, dengan kitabnya *Mau'idhah al-Mukminin*, Tajwid, dengan kitabnya *Hidayah al-al-Mustafid*, Mahfudhah (menghafal beberapa ayat Alquran), Balaghah, Nahwu/Qawaid, dengan kitabnya *Durs al-Lughah al-Arabiyyah*, Sharaf, dengan kitabnya *Sams al-Madkhal*, Mantiq, Usul Fiqh, dengan kitabnya *Matan as-Sulam*, Muthala'ah, Muhadasah (percakapan), Tarikh, dengan kitabnya *Khulasah Nur al-Yakin*, Khat Arab, Insya' (mengarang), Imla' (dekte). *Kedua*, mata pelajaran umum terdiri dari: Geografi, Bahasa Indonesia, Berhitung (Aljabar), Sejarah Indonesia, Kesenian dan Menggambar. Baca: Ismail, *Sejarah*, h. 22.

*naqliyyat/al-dîniyyat*). Mata pelajaran agama terdiri dari Bahasa Arab (*'ilm al-lughat*), Ilmu Tafsir (*'ilm al-tafsîr*), Ilmu Hadits (*'ilm al-hâdis*), Ilmu Fiqh (*'ilm al-fiqh*), Ushul Fiqh (teori hukum), Akhlak, Tasawuf, Ilmu Mantiq, Ilmu Jiwa (*'ilm al-nafs*), Ilmu Pendidikan (*'ilm al-tarbiyah*), Ilmu Hisab atau *arithmetic* (*'ilm al-hisâb*), Ilmu Bumi (*'ilm al-jughrâfiyyat*). Mata pelajaran umum terdiri dari: Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia (Melayu), *Aljabar*, Sejarah Indonesia, Kesenian (*'ilm al-hay'at*).<sup>77</sup>

Di samping mata pelajaran yang telah disebutkan di atas, juga diajarkan mata pelajaran lain yang termasuk dalam ekstra kurikuler, yaitu: strategi berorganisasi, strategi berpidato (*retorika*), olah raga, pramuka (*kependuan*), dan musik (kesenian).<sup>78</sup>

Dari mata pelajaran tersebut dapat terlihat bahwa Madrasah Almuslim sejak didirikan telah melakukan pembaruan terhadap kurikulum pendidikannya yang menyentuh dengan persoalan kekinian (*community based curriculum*), karena kurikulum yang berlaku di *dayah-dayah* Aceh pada waktu itu hanya diajarkan mata pelajaran agama (*naqliyyat; religious sciences*) saja.

Menyangkut dengan buku pegangan dasar yang diajarkan pada Madrasah Almuslim secara rinci dijelaskan Ismuha:

Mata pelajaran yang diajarkan pada Madrasah Almuslim pada tahun 1937 adalah: *Pertama* Bahasa Arab: 1). Mutâhala'ah: sejak kelas I sampai dengan kelas III buku yang dipakai *Dûrs al-lughat al-'Arabiyyat*, karangan Mahmud Yunus Padang. Untuk kelas IV buku yang dipakai *Qirâat al-râsîdat* jilid IV dari Mesir. Untuk kelas V buku yang dipakai *Izhat an-Nâsyi-în*, karangan Musthafa al-Ghalayîny. Untuk kelas VI dan kelas VII, kitab yang dipakai *al-Islâm al-Rûh al-Madâniyyat*. 2). Nahwu: kelas I, kitab yang dipakai *al-al-ÂJurrûmiyyat* oleh Ibn Âjurrûm (w. 723/1323), kelas II *Mukhtasar Jiddân*, kelas III dan Kelas IV, *Mutâmmâmah*, kelas V, VI dan VII, *Jamî' al-Lughah al-Arabiyah*, jilid I karangan Mustafa al-Ghalayiny. 3). Sharaf: kelas I *Tasyîf*, kelas II, *Matân Binâ*, kelas III dan IV *Kailanîy*, kelas V, VI dan VII *Jamî' al-Lughah al-Arabiyah* jilid III. 4). Balâghah: kitab yang dipakai *Jawâhir al-Balaghah* dari Mesir. *Kedua*, *al-Qur'ân*: 1). Tajwîd, dipergunakan kitab *Hidâyah al-Musâtâfid*. 2). Tafsir, kitab yang dipakai adalah *Jalâlâin*. *Ketiga*, Hâdits: 1). Matan Hâdits, untuk kelas II dan

<sup>77</sup> Muhammad Ilyas Dawood, *Sejarah Singkat Almuslim* (Makalah, tidak diterbitkan), h. 2-3.

<sup>78</sup> *Ibid.*

III dipakai kitab *Matân Arbaîn*, kelas IV, V, VI dan kelas VII *Fath al-Mubdîy*. 2). Mustalah al-Hâdits, kelas IV dan V dipakai *Minhât al-Mughîts*, kelas VI dan VII, dipakai *Syurh ad-Dîbaj*. Keempat, Tauhid, untuk kelas II dan III *Matân Sanusîy*, kelas IV *Kifâyah al-Awâm*, dan kelas V, VI dan kelas VII kitab yang dipakai *al-Husyûn al-Hamidîyah*. Kelima, Tasawuf, buku yang dipakai adalah *Muraqîy al-'Ubudiyah*. Keenam, Fiqh, untuk kelas I diajarkan *Sâfinat al-Najâ*, kelas II, *Matan Takrîb*, kelas III *Fath al-Qârîb*, kelas IV dan V, *Fath al-Mu'în*, kelas VI dan VII *Tahrîr*. Ketujuh, Usûhûl Fiqh, untuk kelas V yang diajarkan kitab *Albayân III*, *Kedelapan*, Ilmu Akhlâk, kitab yang dipakai *Taysîr al-Akhlâk*, *Kesembilan*, Tarîkh Islâm dipakai kitab karangan Muhyiddin al-Khaiyât dari Mesir, *Kesepuluh*, Ilmu mantiq, dipakai kitab *Idhah al-Mubhâm*, *Kesebelas* Ilmu *Tarbiyah* (ilmu pendidikan), dipakai buku karangan Mahmud Yunus, *Keduabelas*, Ilmu *an-Nafs* (ilmu jiwa), juga karangan Mahmud Yunus, *Ketigabelas* Ilmu Bumi (*'ilm al-Jughrafîyyat*), untuk ilmu bumi Indonesia dipakai karangan Mahmud Yunus, untuk ilmu bumi umum, dipakai buku disekolah-sekolah Mesir. *Keempatbelas* Ilmu Hisab dipakai buku karangan Mesir. *Kelimabelas* Bahasa Indonesia, buku yang dipakai *Melawat ke Barat*, karangan Adi Negoro. *Keenambelas*, Bahasa Indonesia (Meulayu). *Ketujuhbelas* Aljabar. *Kedelapanbelas* Sejarah Indonesia dan *Kesembilanbelas* Kesenian.<sup>79</sup>

Kurikulum tersebut berlaku pada Madrasah Almuslim sampai tahun 1939. Berdasarkan kesepakatan musyawarah yang dilakukan pengurus Jami'ah Almuslim pada tanggal 6 Mei 1939, berhasil dicapai sebuah kesepakatan bahwa kurikulum Madrasah Almuslim perlu dikakukan perubahan. Musyawarah tersebut dilakukan dalam rangka merespon keputusan rapat Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang digelar di kampus Almuslim pada tanggal 5 Mei 1939 yang salah satu hasilnya adalah menyamakan kurikulum sekolah agama (madrasah) di Aceh. Kurikulum hasil musyawarah Ulama tersebut kemudian menjadi pegangan bagi seluruh Madrasah di Aceh, termasuk Madrasah Almuslim. Pada tahun 1940 Madrasah Almuslim resmi memberlakukan kurikulum tersebut.

Informasi senada juga disampaikan Khalil Ibrahim, ketika diwawancara menjelaskan bahwa Madrasah Almuslim mulai tahun 1940 telah menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) sampai kelas V (lima) saja. Sedangkan untuk kelas VI (enam) dan kelas VII (tujuh) masih

---

<sup>79</sup> Ismuha, *Riwayat Ringkas*, h. 72-73.

diberlakukan kurikulum yang dibuat Jami'ah Almuslim sendiri sebelumnya.<sup>80</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Madrasah Almuslim pada tahun 1940 telah melakukan penyesuaian kembali kurikulumnya dengan kurikulum yang ditetapkan oleh PUSA, dan memang salah satu tujuan didirikan PUSA adalah untuk dapat melakukan penyeragaman terhadap kurikulum-kurikulum madrasah di Aceh.<sup>81</sup> Hal ini disebabkan, dalam perjalanannya, keberadaan madrasah-madrasah di Aceh antara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain sangat berbeda jauh kurikulumnya, sehingga menjadi kendala besar bagi siswa-siswa yang melakukan pemindahan belajar dari satu madrasah ke madrasah yang lain.

Dalam rangka merespon hal yang demikian, maka Madrasah Almuslim melakukan perubahan kurikulumnya yang disesuaikan dengan keputusan PUSA tersebut. Tetapi kurikulum yang dibuat PUSA sampai kelas V (lima) saja. Sedangkan untuk kelas VI (enam) dan kelas VII (tujuh) Madrasah Almuslim menerapkan kurikulumnya sendiri.

Untuk lebih jelasnya mengenai kurikulum yang diterapkan pada Madrasah Almuslim pada tahun 1940 dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>80</sup> Khalil Ibrahim, Bendahara Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984 dan Wakil Ketua I Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1984-1989, wawancara di Matanglumpangdua, tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>81</sup> Abdul Mukti menjelaskan bahwa organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan memiliki tiga tujuan utama, yaitu *pertama*, untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi'ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar dengan "Serambi Makkah" pada masa keemasannya yang telah silam, dan dalam beberapa masa yang telah lalu samapi masa sekarang, telah berubah menjadi satu negeri yang amat terbelakang dari tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam dalam lembah kejahilan dan kegelapan. *Kedua*, berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan faham ulama-ulama Aceh tentang cara menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama, sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh semua pihak., begitu juga pertikaian itu adalah menjadi batu menggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci. *Ketiga*, Berusaha memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh. Baca: Abdul Mukti, "Peranan PUSA dalam Pembaharuan Kehidupan Beragama di Aceh" dalam Hasan Asari (ed.), *Studi Islam dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 135.

**Tabel 27. Kurikulum Madrasah Almuslim  
Pada Tahun 1940-1942**

No	Mata Pelajaran	Kls. I	Kls. II	Kls. III	Kls. IV	Kls. V	Jlh
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mutqala'ah	6	5	5	5	5	26
2	Imlak	3	3	3	2	2	13
3	Muhâdasah	3	3	-	-	-	6
4	Insya'	-	-	3	3	3	9
5	Mahfudhat	1	1	1	1	1	5
6	Qawâid Tathbiq	-	2	3	3	3	11
7	Tulisan 'Arab	2	2	2	1	1	8
8	Tulisan Latin	1	-	-	-	-	1
9	Alqur-ân	3	3	-	-	-	6
10	Tafsîr Alqurân	-	-	2	2	2	6
11	Tafsîr Hâdits	-	-	1	1	1	3
12	Fiqh	2	1	2	3	3	12
13	Tauhîd	1	1	1	1	1	5
14	Tahzib	1	1	1	1	1	5
15	Târîkh Islâm	1	1	1	1	1	5
16	Ilmu Kesehatan	1	1	1	-	-	3
17	Pokok Ilmu Alam	-	-	-	1	1	2
18	Berhitung	2	2	2	1	1	8
19	Ilmu Bangunan	-	-	-	1	1	2
20	Ilmu Bumi	2	2	2	2	2	10
21	Menggambar	1	1	1	1	1	5
22	Tarikh Indonesia	-	-	-	1	1	2
23	Bahasa Indonesia	2	2	2	2	2	10
24	Pergerakan Badan	2	2	1	1	1	7
	Jumlah	34	34	34	34	34	170

Kurikulum tersebut diajarkan tiap-tiap hari sebanyak 6 (enam) mata pelajaran kecuali hari Jum'at, diajarkan 4 (empat) mata pelajaran saja. Alokasi

waktu yang disediakan untuk satu jam pelajaran adalah sebanyak 45 menit.<sup>82</sup>

Kurikulum Madrasah Almuslim tahun 1940, mengalami perubahan dengan ditambahkan beberapa mata pelajaran baru yang diwajibkan oleh Pemerintah Militer Jepang pada tahun 1942 dan 1943. Harun Ismail menjelaskan bahwa mulai tahun 1942, Madrasah Almuslim sudah mulai mengajarkan mata pelajaran Bahasa Inggris, dan pada tahun 1943 di bawah kontrol penjajahan Jepang, Madrasah Almuslim kembali menambah mata pelajaran baru yang diwajibkan pemerintah Militer Jepang, yaitu senam jasmani, yang dinamai dengan *Taiso* di pagi hari, setelah melakukan *kerei* (membungkuk) ke arah matahari terbit. Kemudian pelajaran Bahasa Belanda harus digantikan dengan Bahasa *Nippon* dan latihan berbaris secara kemiliteran Jepang.<sup>83</sup> Jadi, pembaruan kurikulum Jami'ah Almuslim secara sistematis telah dilakukan setidaknya dapat dilihat dari tiga perspektif. *Pertama*, pada kurikulum Madrasah Almuslim telah dimasukkan mata pelajaran umum yang selama ini dianggap tabu di kalangan *dayah* tradisional, di samping mata pelajaran agama sebagaimana yang diajarkan di *dayah-dayah*. *Kedua*, komposisi kurikulum adalah 30 % umum dan 70 % agama. *Ketiga*, kurikulum tersebut terus direvisi dan dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan corak lembaga pendidikan yang didirikan.

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan pada aspek kurikulum yang dilakukan Jami'ah Almuslim, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 28. Pembaruan pada Aspek Kurikulum**

Kurikulum pada lembaga Tradisional sebelum Pembaruan	Kurikulum pada Madrasah Almuslim setelah Pembaruan
Ilmu agama ( <i>'ilm al-naqliyyat; religious sciences</i> ) semata, dengan	Kombinasi antara : 1. Ilmu agama ( <i>'ilm al-naqliyyat;</i>

<sup>82</sup> Kurikulum ini merupakan hasil musyawarah pengurus PUSA di kampus Almuslim tanggal 05 Mei 1939 yang wajib diterapkan bagi seluruh Madrasah Aceh mulai tahun 1940. Baca: M. Nur Al Ibrahimy, *Sekitar Pembaharuan Sistem Pendidikan Agama di Aceh*. dalam Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh (Banda Aceh: Gua Hira', 1995), h. 113.

<sup>83</sup> Ismail, *Sejarah*, h. 35.

memakai: 1. Kitab Klasik ( <i>kitab kuning</i> ) 2. Kitab-kitab yang <i>muktâbar</i>	<i>religious sciences</i> 2. Dan Ilmu umum ( <i>'ilm 'aqliyyat; secular sciences</i> )
--	---

Pembaruan kurikulum pendidikan pada Jami'ah Almuslim tetap diarahkan untuk mencapai tujuan Jami'ah, yaitu untuk mencetak generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama, bangsa dan negara.

Kurikulum Madrasah Almuslim sebagaimana dijelaskan di atas berlangsung sampai tahun 1946. karena sejak tanggal 1 Nopember 1946 Madrasah Almuslim dinegerikan. Sejak saat itu namanya berubah menjadi Sekolah Rendah Islam (SRI) Matanglumpangdua dan bukan merupakan tanggungjawab Jami'ah Almuslim lagi. Setelah penegerian Madrasah Almuslim pada tahun 1946, Jami'ah Almuslim kembali mendirikan lembaga pendidikan baru, yaitu Sekolah Menengah Islam (SMI) pada tahun 1962, dengan kurikulum perdananya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 29. Kurikulum Sekolah Menengah Islam (SMI)  
Almuslim dari tahun 1946-1967**

No	Mata Pelajaran	Kls. I	Kls. II	Kls. III	Kls. IV	Kls. V	Kls. VI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tafsîr	2	2	2	2	2	2
2	Hâdits	2	2	1	1	1	2
3	Tauhid	2	2	2	2	2	2
4	Fiqh	3	3	3	3	2	2
5	Usul Fiqh	2	2	2	2	2	2
6	Muthala'ah	4	3	2	2	2	2
7	Insyak	1	1	1	1	1	-
8	Nahu/Sharaf	3	3	3	3	2	1
9	Târîkh Islâm	2	2	2	2	2	2
10	Târîkh Tasyri'	2	1	1	1	2	2
11	Tarbiyah	-	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah (Agama)</b>	24	23	20	20	20	20
12	Sejarah Umum	2	2	2	2	1	2
13	Ilmu Bumi	2	2	2	2	2	2

14	Ilmu Falaq	-	-	1	1	2	1
15	Ilmu Hayat	1	1	1	1	1	1
16	Ilmu Alam	1	2	2	2	2	2
17	Aljabar	2	2	3	3	3	3
18	Ilmu Ukur	2	2	3	3	3	2
19	Sejarah Indonesia	1	1	1	1	1	2
20	Bahasa Inggris	3	3	3	3	3	3
	<b>Jumlah (Umum)</b>	16	17	20	20	20	20
	<b>Jumlah semuanya</b>	40	40	40	40	40	40

Pada tahun 1967, Sekolah Menengah Islam (SMI) Almuslim yang lama belajarnya 6 tahun dinegerikan menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Matangglumpangdua untuk kelas 1, 2 dan 3. Sedangkan kelas 4, 5 dan 6 menjadi Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN),<sup>84</sup> dan bukan merupakan tanggungjawab Jami'ah Almuslim lagi.

Setelah SMI Almuslim dinegerikan pada tahun 1967, Jami'ah Almuslim kembali mendirikan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) pada tahun 1969 dengan kurikulum perdananya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 30. Kurikulum PGA Almuslim**

No	Mata Pelajaran	Kelas					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Agama	5	5	7	6	12	12
2	Bahasa Arab	5	6	6	7	8	9
3	Bahasa Indonesia	4	4	3	3	3	3
4	Bahasa Aceh	2	2	2	2	-	-
5	Bahasa Inggris	4	4	4	3	2	2
6	Ilmu Pasti/Ilmu Ukur	6	5	4	4	-	-
7	Ilmu Alam/Kimia	2	2	2	3	-	-
8	Ilmu Hayat	2	2	2	2	1	1

<sup>84</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2 Nomor 29 Tahun 1967 dalam Badruzzaman Ismail (ed.), *Perkembangan*, h. 190-191.2

9	Ilmu Bumi	2	2	2	2	-	-
10	Sejarah Indonesia & Umum	2	2	2	2	-	-
11	Menggambar	2	2	2	2	-	-
12	Seni Suara	1	1	1	1	1	1
13	Gerak Badan	2	2	2	2	2	2
14	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1	-	-
15	Ekonomi	-	-	-	-	1	2
16	Tata Negara	-	-	-	-	2	1
17	Ilmu Pendidikan	-	-	-	-	4	4
18	Filsafat/Perbandingan Agama	-	-	-	-	2	2
19	Sosiologi	-	-	-	-	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
	<b>AGAMA</b>						
1	Qur'an/Tafsir	2	2	1	1	3	3
2	Fiqh	2	2	2	2	2	3
3	Usul Fiqh	-	-	-	-	2	1
4	Tauhid	1	1	1	1	1	1
5	Hadis/Muthala'ah	-	-	1	1	2	2
6	Tarikh Islam	-	-	2	1	1	1
7	Kebudayaan Islam	-	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>BAHASA ARAB</b>						
1	Bercakap-cakap/Mengarang	1	1	1	1	2	2
2	Membaca	2	2	2	2	2	2
3	Imla' dan Menulis	2	2	2	2	-	-
4	Nahu/Saraf	-	1	1	2	2	2
5	Balaghah	-	-	-	-	1	2
6	Mafhuzhat	-	-	-	-	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>Ekstra Kurikuler</b>						
1	Kepramukaan	2	2	2	2	2	2
2	Kealmusliman	2	2	2	2	2	2

3	Retorika	-	-	-	2	2	2
	Jumlah	4	4	4	6	6	6

Muhammad Daud Hanafiah, salah seorang alumni Pendidikan Guru Agama Almuslim menjelaskan, bahwa PGA Almuslim ini berumur sampai dengan tahun 1979, karena terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang membekukan semua izin operasional Pendidikan Guru Agama Swasta. Walaupun demikian keberadaannya di tengah-tengah masyarakat telah dirasakan manfaatnya, terbukti sampai dipenghujung hayatnya, PGA ini telah berhasil meluluskan siswanya sebanyak 615 orang.<sup>85</sup>

Setelah PGA Almuslim dibekukan pada tahun 1979, Jami'ah Almuslim mendirikan lembaga pendidikan baru, yaitu Madrasah Tsanawiyah Almuslim pada tahun 1982 dengan kurikulum perdananya dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 31. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim Tahun 1982**

No	Mata Pelajaran Semester	Kelas I		Kelas II		Kelas III	
		1	2	1	2	1	2
	<b>A. KELOMPOK DASAR</b>						
1	Tafsîr / Hâdits	2	2	2	2	2	2
2	Hâdits	1	1	1	1	1	1
3	Tauhid	1	1	1	1	1	1
4	Praktek Ibadah/Akhlak	1	1	1	1	1	1
5	Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
6	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
7	Pendidikan Jasmani	2	2	2	2	2	2
	<b>Jumlah</b>	13	13	13	13	13	13
	<b>B. KELOMPOK POKOK</b>						

<sup>85</sup> Muhammad Daud Hanafiah, Alumni Pendidikan Guru Agama (PGA) Almuslim, wawancara, tanggal 17 Agustus 2010.

1	Fiqh	2	2	2	2	2	2
2	Bahasa Aceh	1	1	1	1	1	1
3	Bahasa Arab	5	5	5	5	5	5
4	Bahasa Inggris	3	3	3	3	3	3
5	Sejarah	2	2	2	2	2	2
6	Sejarah Islam	2	2	2	2	2	2
7	Aljabar	2	2	2	2	2	2
8	Ilmu Ukur	2	2	2	2	2	2
9	Ilmu Alam	2	2	2	2	2	2
10	Ilmu Hayat	2	2	2	2	2	2
11	Ilmu Bumi	2	2	2	2	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>C. KELOMPOK KHUSUS</b>						
1	Administerasi	1	1	1	1	1	1
2	Menggambar	2	2	2	2	2	2
3	Seni Suara	1	1	1	1	1	1
4	Khat (Kaligrafi Arab)	1	1	1	1	1	1
5	Prakarsa/PKK	2	2	2	2	2	2
6	Kealmusliman	1	1	1	1	1	1
7	Muhadharah (Retorika Islam)	1	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<b>D. Ekstra Kurikuler</b>						
1	Kepramukaan (Kepanduan)	2	2	2	2	2	2
	<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Komposisi kurikulum sebagaimana tersebut di atas merupakan perpaduan antara kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri

Agama Nomor 52 tahun 1971 yang disempurnakan dengan kurikulum tahun 1973 serta kurikulum khusus Jami'ah Almuslim.

Kurikulum tersebut terus mengalami pembaruan sesuai dengan kepentingan dan perkembangan madrasah. Depertemen Agama kembali menyempurnakan kurikulum madrasah dengan menyusun kurikulum baru berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tanggal 29 Desember 1976 yang berlaku secara intensif mulai tahun 1987. Kemudian kurikulum tersebut mengalami penyempurnaan kembali pada tahun 1984 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1987.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama tersebut Madrasah Almuslim kembali menyesuaikan kurikulumnya dengan menambah beberapa mata pelajaran khas Almuslim. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 32. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim Tahun 1987**

No	Bidang Studi Semester	Kelas I		Kelas II		Kelas III		Jumlah
		1	2	1	2	1	2	
	<b>A. KELOMPOK DASAR UMUM</b>							
1	Alqur-ân dan Hâdits	2	2	2	2	2	2	12
2	Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
3	Fiqh	2	2	2	2	2	2	14
4	PMP	2	2	2	2	2	2	12
5	PSPB	2	-	2	2	-	2	6
6	Penjaskes	2	2	2	2	2	2	12
7	Pendidikan Kesenian	2	-	2	-	2	-	6
	<b>B. PEND DASAR AKADEMIK</b>							
8	SKI	-	-	2	2	2	1	7
9	Bahasa Indonesia	4	3	4	4	4	4	23
10	Bahasa Arab	3	4	4	3	4	4	23
11	Bahasa Inggris	3	4	4	3	4	4	23
12	Bahasa Aceh	-	-	2	2	2	2	8

13	Ilmu Peng. Sosial	3	3	3	3	3	2	17
14	Matematika	6	4	6	4	6	4	30
15	I P S							
	a. Biologi	3	2	2	2	2	2	13
	b. Fisika	3	3	3	3	3	3	18
16	Pend. Ketrampilan	2	2	2	2	2	2	12
17	Kealmusliman				1	1	1	3
18	Muhadharah	2	2	2				6
19	Kepanduan (Pramuka)	-	-	-	1	1	1	3
20	Kepemimpinan	2	2	2				6
	Jumlah	46	46	46	44	44	44	266

Akhir dekade 1980-an dunia pendidikan Islam di Indonesia, termasuk Aceh memasuki era integrasi, karena lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional. Implikasi dari UUSPN ini lahirnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1993, tentang kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam. Dalam Keputusan ini diatur bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah melaksanakan kurikulum Nasional Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama. Untuk menyahtui peraturan tersebut Madrasah Tsanawiyah Almuslim kembali melakukan pembaruan kurikulumnya.

Untuk lebih jelasnya komposisi kurikulum yang dilaksanakan pada Madrasah Tsanawiyah Almuslim tahun 1994, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 33. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim Tahun 1994**

No	Mata Pelajaran	Kelas I		Kelas II		Kelas III	
		1	2	1	2	1	2
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Agama Islam	-	-	-	-	-	-
	a. Qur'an-Hâdits	1	1	1	1	1	1

	b. Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2
	c. Fiqh	2	2	2	2	2	2
	d. SKI	1	1	1	1	1	1
	e. Bahasa Arab	3	3	3	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6
4	Matematika	6	6	6	6	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam	6	6	6	6	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	6	6	6	6	6	6
7	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2
8	Penjaskes	2	2	2	2	2	2
9	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4
10	Kealmusliman	1	1	1	1	1	1
11	Kepanduan	2	2	2	2	2	2
12	Muhadharah	1	1	1	1	1	1
13	Kepemimpinan	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	50	50	50	50	50	50

Komposisi kurikulum sebagaimana tersebut di atas merupakan wujud integrasi kurikulum madrasah. Karenanya dapat dikatakan bahwa kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim tidak ada bedanya dengan sekolah umum. Perbedaannya terletak hanya pada ciri khas keagamaan (Islam), sehingga madrasah tidak dapat meninggalkan mata pelajaran kunci yaitu mata pelajaran keagamaan di samping sejumlah mata pelajaran khusus Almuslim (Kealmusliman, Kepanduan, Muhadharah dan Kepemimpinan).

Upaya pembaruan kurikulum pendidikan madrasah Jami'ah Almuslim dilakukan secara terus menerus, walaupun keberadaan madrasah sendiri secara umum mulai menemukan momentumnya ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional (USPN) ditetapkan. Disusul kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional. Namun keberadaan Jami'ah Almuslim sebagai obor pembawa pembaruan pendidikan Islam di Aceh selalu berusaha melakukan

pembaruan kurikulumnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam bernegara.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan informasi Kepala Madrasah, kurikulum yang dipakai sekarang di Madrasah Tsanawiyah Almuslim merupakan kurikulum yang telah dilakukan pembaruan kembali yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk lebih jelasnya menyangkut sebaran mata pelajaran dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim dari tahun 2004 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 34. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Almuslim Tahun 2004-2010**

No	Mata Pelajaran Semester	Kelas I		Kelas II		Kelas III	
		1	2	1	2	1	2
1	Matematika	6	6	6	6	6	6
2	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6
3	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4
4	Fisika	2	2	2	2	2	2
5	Kimia	1	1	1	1	1	1
6	Biologi	2	2	3	3	3	3
7	PKN	3	3	2	2	2	2
8	Geografi	2	2	2	2	2	2
9	Sejarah	2	2	1	1	1	1
10	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2
11	Bahasa Arab	3	3	3	3	3	3
12	Fiqh	2	2	2	2	2	2
13	Qur'an-Hâdits	2	2	2	2	2	2
14	Aqidah Akhlak	1	1	2	2	2	2
15	Kesenian	1	1	1	1	1	1
16	Muatan Lokal	1	1	1	1	1	1

17	SKI	1	1	1	1	1	1
18	Ekonomi	2	2	2	2	2	2
20	TIK	1	1	2	2	2	2
21	Kealmusliman	1	1	1	1	1	1
22	Kepanduan	2	2	2	2	2	2
23	Muhadharah	1	1	1	1	1	1
24	Kepemimpinan	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	50	50	50	50	50	50

Di sisi lain, di samping mendirikan Madrasah Tsanawiyah, Jami'ah Almuslim juga telah mendirikan Madrasah Aliyah pada tahun 1989 dengan kurikulumnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 35. Kurikulum Madrasah Aliyah  
Almuslim Tahun 1989, Pilihan A-1 (Ilmu-ilmu Agama)**

No	Bidang Studi	Kelas Semester	I		II		III		Jumlah
			1	2	3	4	5	6	
A	PENDIDIKAN AGAMA								
	1.	Qur'an-Hâdits	2	2	2	2	2	2	12
	2.	Aqidah Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
	3.	Fiqh	2	2	2	2	2	2	12
	4.	Sejarah & Peradaban	-	-	-	-	2	2	4
	5.	Bahasa Arab	3	3	3	3	2	2	16
B	PENDIDIKAN DASAR UMUM								
	6.	PMP	2	2	2	2	2	2	12
	7.	PSPB	-	2	-	2	-	2	6
	8.	Bahasa & Sastra Indonesia	2	2	2	2	4	4	16:160
	9.	Sej. Nas. Ind. Dan Sej. Dunia	4	3	2	2	-	-	11
	10.	Ekonomi	2	2	-	-	-	-	4
	11.	Geografi	4	3	-	-	-	-	7
	12.	Biologi	2	2	-	-	-	-	4

	13. Fisika	2	2	-	-	-	-	4
	14. Kimia	2	2	-	-	-	-	4
	15. Matematika	3	3	-	-	-	-	6
	16. Bahasa Inggris	3	3	-	-	-	-	6
	17. Pendidikan Orkes	2	2	2	2	-	-	8
	18. Pendidikan Kesenian	3	3	2	-	-	-	8
	19. Pendidikan Keterampilan	-	-	2	2	2	2	8
C	PENDIDIKAN PENGEMBANGAN							
	20. Tafsir-1	-	-	5	5	3	3	16
	21. Hadis-1	-	-	4	4	4	2	14
	22. Ushul Fiqh	-	-	4	4	2	2	12
	23. Tarikh Tasyri'	-	-	-	-	2	2	4
	24. Ilmu Kalam	-	-	-	-	3	3	6
	25. Sejarah Agama	-	-	-	-	2	2	4
	26. Bahasa Inggris	-	-	4	4	3	3	14
	27. Matematika	-	-	2	2	3	3	10
D	PELAJARAN KHAS ALMUSLIM							
10	Kealmusliman	1	1	1	-	-	-	3
11	Kepanduan	-	-	-	1	1	1	3
12	Muhadharah	1	1	1	-	-	-	3
13	Kepemimpinan				1	1	1	3

Kurikulum yang diterapkan pada Madrasah Aliyah Almuslim merujuk kepada SKB Tiga Menteri tahun 1986. Menurut Informasi yang disampaikan Amiruddin Idris, bahwa kurikulum tersebut terus menerus dilakukan perubahan dan diimplementasikan sesuai dengan perkembangan dan dinamika madrasah. Pembaruan kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim juga telah disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Kurikulum 2004). Pemberlakuan KBK tersebut meliputi kegiatan belajar mengajar, proses belajar mengajar, penilaian

berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah.<sup>86</sup> Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar dan proses belajar mengajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian juga dalam perjalanannya di tahun-tahun selanjutnya, kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim juga telah disesuaikan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Kurikulum 2006). Pemberlakuan KTSP pada Madrasah Aliyah Almuslim ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini juga memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional yang bersendikan ajaran Islam sebagaimana yang sedang digalakkan di bumi Aceh.

Untuk mewujudkan kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka komposisi kurikulum terakhir Madrasah Aliyah Almuslim tahun 2010, yang penulis dapatkan melalui dokumentasi madrasah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 36. Komposisi Kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim Kelas I, Tahun 2010**

NO	MATA PELAJARAN	Alokasi Waktu (Kelas I)	
		Semester 1	Semester 2
1	Pendidikan Agama Islam		
	a. Qur'an-Hâdits	2	2
	b. Fiqh	2	2
	c. Aqidah Akhlak	2	2
	d. SKI	-	-
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3	Bahasa Inggris	4	4

<sup>86</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2006-2010 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 26 Oktober 2010.

4	Bahasa Indonesia	4	4
5	Matematika	4	4
6	Kimia	1	1
7	Fisika	2	2
8	Biologi	2	2
9	Ekonomi	2	2
10	Bahasa Arab	3	3
11	Geografi	1	1
12	Sejarah	1	1
13	TIK	2	2
14	Sosiologi	2	2
15	Kesenian	2	2
16	Penjaskes	2	2
17	Keterampilan Bahasa Asing	2	2
18	Kealmusliman (Mulok)	1	1
19	Kepanduan (Mulok)	-	-
20	Muhadharah (Mulok)	1	1
21	Kepemimpinan (Mulok)	-	-
	Jumlah	48	48

Sedangkan komposisi kurikulum untuk kelas II dan kelas III disesuaikan dengan program yang dipilih. Program yang tersedia pada Madrasah Aliyah Almuslim adalah IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan. Masing-masing program tersebut dalam sebaran mata ajarnya memiliki ciri khas dan penekanan masing-masing sesuai dengan program yang dipilih.

**Tabel 37. Komposisi Kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim Kelas II dan III Program IPA, Tahun 2010**

NO	MATA PELAJARAN	Kelas II		Kelas III	
		SM 1	SM 2	SM 1	SM 2

1	Pendidikan Agama Islam				
	a. Qur'an-Hâdits	2	2	2	2
	b. Aqidah Akhlak	2	2	-	-
	c. Fiqh	2	2	2	2
	d. SKI	-	-	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4	Bahasa Arab	2	2	2	2
5	Bahasa Inggris	4	4	4	4
6	Matematika	4	4	4	4
7	Fisika	4	4	4	4
8	Kimia	4	4	4	4
9	Biologi	4	4	4	4
10	Sejarah	4	4	4	4
11	Seni Budaya	2	2	2	2
12	Penjaskes	2	2	2	2
13	TIK	2	2	2	2
14	Keterampilan Bahasa Asing	2	2	2	2
15	Kepanduan (Mulok)	2	2	2	2
16	Muhadharah (Mulok)	1	1	1	1
17	Kepemimpinan (Mulok)	1	1	1	1
	Jumlah	45	45	45	45

**Tabel 38. Komposisi Kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim Kelas II dan III Program IPS, Tahun 2010**

NO	MATA PELAJARAN	Kelas II		Kelas III	
		SM 1	SM 2	SM 1	SM 2
1	Pendidikan Agama Islam				
	a. Qur'an-Hâdits	2	2	2	2
	b. Aqidah Akhlak	2	2	-	-

	c. Fiqh	2	2	2	2
	d. SKI	-	-	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4	Bahasa Arab	2	2	2	2
5	Bahasa Inggris	4	4	4	4
6	Matematika	4	4	4	4
7	Fisika	4	4	4	4
8	Kimia	4	4	4	4
9	Ekonomi	4	4	4	4
10	Sosiologi	3	3	3	3
11	Seni Budaya	2	2	2	2
12	Penjaskes	2	2	2	2
13	TIK	2	2	2	2
14	Keterampilan Bahasa Asing	2	2	2	2
15	Kepanduan (Mulok)	2	2	2	2
16	Muhadharah (Mulok)	1	1	1	1
17	Kepemimpinan (Mulok)	1	1	1	1
	Jumlah	45	45	45	45

**Tabel 39. Komposisi Kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim Kelas II dan III Program Bahasa, Tahun 2010**

NO	MATA PELAJARAN	Kelas II		Kelas III	
		SM 1	SM 2	SM 1	SM 2
1	Pendidikan Agama Islam				
	a. Qur'an-Hâdits	2	2	2	2
	b. Aqidah Akhlak	2	2	-	-
	c. Fiqh	2	2	2	2
	d. SKI	-	-	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2

3	Bahasa Indonesia	5	5	5	5
4	Bahasa Arab	2	2	2	2
5	Bahasa Inggris	5	5	5	5
6	Bahasa Jerman	4	4	4	4
7	Matematika	3	3	3	3
8	Sastra Indonesia	4	4	4	4
9	Antropologi	2	2	2	2
10	Sejarah	2	2	2	2
11	Seni Budaya	2	2	2	2
12	Penjaskes	2	2	2	2
13	TIK	2	2	2	2
14	Keterampilan	2	2	2	2
15	Kepanduan (Mulok)	2	2	2	2
16	Muhadharah (Mulok)	1	1	1	1
17	Kepemimpinan (Mulok)	1	1	1	1
	Jumlah	45	45	45	45

**Tabel 40. Komposisi Kurikulum Madrasah Aliyah Almuslim Kelas II dan III Program Keagamaan, Tahun 2010**

NO	MATA PELAJARAN	Kelas II		Kelas III	
		SM 1	SM 2	SM 1	SM 2
1	Pendidikan Agama Islam				
	a. Akhlak	3	3	3	3
	b. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	4	4	4
5	Bahasa Inggris	4	4	4	4
6	Matematika	4	4	4	4

7	Seni Budaya	2	2	2	2
8	Penjaskes	2	2	2	2
9	Tafsir	4	4	4	4
10	Hadis	3	3	3	3
11	Fiqh	3	3	3	3
12	Ilmu Kalam	3	3	3	3
13	TIK	2	2	2	2
15	Kepanduan (Mulok)	2	2	2	2
16	Muhadharah (Mulok)	1	1	1	1
17	Kepemimpinan (Mulok)	1	1	1	1
	Jumlah	45	45	45	45

Komposisi Kurikulum sebagaimana tabel di atas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang kompetensi lulusan dan standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, dengan dilakukan penambahan muatan lokal yang sesuai dengan institusi Jami'ah Almuslim.<sup>87</sup> Pengembangan kurikulum sebagaimana terlihat pada komposisi kurikulum di atas menunjukkan bahwa ada penekanan yang substansial pada kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran pada setiap jenjang. Sebagai implikasi, akan terjadi pergeseran dari dominasi penguasaan kognitif menuju penguasaan kompetensi tertentu yang komprehensif. Atas dasar itu nantinya diharapkan kurikulum tersebut benar-benar menjelma menjadi kerangka inti yang memiliki empat komponen sebagai *framework*, yaitu: 1) kurikulum dan hasil belajar, 2) penilaian berbasis kelas, 3) kegiatan belajar mengajar, dan 4) pengelolaan kurikulum berbasis madrasah. Inilah sasaran yang ditujuk ke depan dalam rangka pembaruan kurikulum pada Jami'ah Almuslim.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Baca: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tentang kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

<sup>88</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan kurikulum madrasah mengalami dinamika yang menarik. Sebelum Indonesia merdeka, mata pelajaran yang diajarkan adalah sebagian besar mata pelajaran agama, walaupun sudah dimasukkan mata pelajaran umum, namun tekanan madrasah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan mata pelajaran umum untuk dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah semakin merata, sebagai tuntutan zaman. Dengan demikian timbullah berbagai variasi di dalam menyeimbangkan antara mata pelajaran umum dan agama di lingkungan madrasah, dan di dalam menyeimbangkan itu mata pelajaran umum mendapat porsi yang sedikit. Menurut Daulay perbandingan tersebut berkisar antara 50:50, 60:40, 30:70, bahkan ada yang berbanding 10:90.<sup>89</sup> Sebagai akibat dari perbandingan antara mata pelajaran umum dan agama seperti tertera di atas, maka ijazah madrasah mempunyai nilai yang tidak sama dengan ijazah sekolah umum. Ketidaksamaan nilai ijazah tersebut dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah hanya terbatas kepada Perguruan Tinggi Agama saja. Lulusan madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studinya ke fakultas-fakultas umum, baik fakultas-fakultas eksakta maupun fakultas-fakultas ilmu sosial. Hal yang demikian tentu saja tidak menguntungkan bagi tamatan madrasah, dan lebih ironisnya lagi generasi muda Islam yang dididik di madrasah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial. *Kedua*, kesempatan untuk mencari pekerjaan bagi lulusan madrasah juga terbatas, bila dibandingkan dengan sekolah umum. Instansi pemerintah dan swasta lebih mengutamakan lulusan sekolah umum dibanding lulusan madrasah untuk bekerja di instansi mereka, bahkan ada yang tidak menerima lulusan madrasah sama sekali. Dua hal tersebut menjadikan madrasah berada pada posisi marginal, dan hal ini tentu saja tidak menguntungkan. Untuk itu perlu dicarikan upaya pemecahannya sehingga kedudukan madrasah sama dan setara dengan sekolah umum. Esensi permasalahan yang menyebabkan ketidak samaan ijazah madrasah dan sekolah

---

<sup>89</sup> Daulay, *Dinamika*, h.68.

umum terletak pada kurikulumnya. Untuk merealisasikan ide menyamakan status lulusan madrasah dengan sekolah umum, maka pada tahun 1975, keluarlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Inti dari SKB Tiga Menteri itu adalah: *Perama*, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. *Kedua*, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas. *Ketiga*, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.<sup>90</sup> Ketiga poin tersebut adalah pemberian hak pada madrasah yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ketiga poin itu juga mengandung makna, baik implisit maupun eksplisit, bahwa status dan derajat madrasah sama dengan sekolah umum.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1993, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/u/1992, dan terakhir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka keberadaan madrasah sudah betul-betul sama dan sebangun dengan sekolah. Amiruddin Idris ketika penulis wawancara menjelaskana bahwa, melihat perkembangan madrasah yang sedemikian rupa, Jami'ah Almuslim selalu merespon dengan positif dan selalu menyesuaikan, kerena pembaruan kurikulum di dunia pendidikan bukanlah hal yang aneh, tetapi malah merupakan keharusan demi untuk menghadapi perkembangan masyarakat. Pola-pola lama diubah untuk mencari pola-pola baru adalah merupakan dinamika dalam kehidupan manusia.<sup>91</sup>

Di sisi lain, pembaruan kurikulum yang dilakukan Jami'ah Almuslim tidak saja terpaku pada wujud kelembagaan Madrasah, tetapi sampai pada pendidikan

---

<sup>90</sup> Baca: SKB Tiga Menteri Tahun 1975 Bab II Pasal 2.

<sup>91</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2006-2010 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 26 Oktober 2010.

tinggi. Sejarah mencatat pada tahun 1985, Jami'ah Almuslim telah memasuki era baru dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), disusul tahun 1996, mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) dan di tahun 1987 kembali mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan (STKIP). Pada Tahun 2003 STIP dan STKIP menjadi Universitas Almuslim. Sedangkan STIT Almuslim pada tahun 2010 menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus pada pendidikan tinggi di bawah pengelolaan Jami'ah Almuslim adalah aspek kurikulumnya. Arah pengembangan kurikulum pendidikan tinggi tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, di samping inovasi-inovasi terus diciptakan demi kemajuan dan peningkatan kualitas hasil belajar itu sendiri. Kondisi terakhir perkembangan pendidikan tinggi pada Jami'ah Almuslim, khusus aspek kurikulumnya, disusun berdasarkan ketentuan Menteri Pendidikan Nasional yang termaktub dalam Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. Inti dari Keputusan tersebut adalah bahwa struktur kurikulum pendidikan tinggi dijabarkan dalam bentuk MPK (Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian), MKK (Mata Kuliah Keilmuan Keterampilan), MKB (Mata kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).

Pendidikan tinggi di bawah Jami'ah Almuslim dalam melakukan pengembangan kurikulum tidak statis dan terpaku pada ketentuan-ketentuan di atas, tetapi terus diupayakan inovasi-inivasi sesuai dengan semangat otonomi pendidikan tinggi, sehingga pada akhirnya akan lahir sebuah kurikulum pendidikan tinggi yang benar-benar memberikan harapan besar bagi masyarakat Aceh khususnya serta rakyat Indonesia dan umat Islam pada umumnya. Apalagi fenomena tersebut jika dikaitkan dengan penerapan syari'at Islam di segala bidang

di Aceh, maka hal ini merupakan titik awal merekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi di daerah ini yang mampu menjawab kebutuhan umat Islam.<sup>92</sup>

## 5. Pembaruan pada Aspek Metode

Runes, secara teknis menerangkan bahwa metode<sup>93</sup> setidaknya dapat diterjemahkan dalam tiga bentuk. *Pertama*, suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan. *Kedua*, suatu teknik yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu. *Ketiga*, suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur. Secara umum menurut al-Syaibani, asas-asas metode pendidikan Islam adalah: *Pertama*, asas agama, yaitu prinsip-prinsip, asas-asas, dan fakta-fakta umum yang diambil dari sumber ajaran Islam (*al-Qur'ân* dan *as-Sunnah*). *Kedua*, asas biologis, yaitu dasar yang mempertimbangkan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia peserta didik. *Ketiga*, asas psikologi, yaitu prinsip yang lahir di atas pertimbangan kekuatan psikologis, seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, bakat, sikap, keinginan, kecakapan akal dan lain sebagainya. *Keempat*, asas sosial, yaitu asas yang bersumber dari kehidupan sosial manusia seperti tradisi, kebutuhan-

---

<sup>92</sup> Pembaruan kurikulum yang dilakukan pada institusi pendidikan di lingkungan Jami'ah Almuslim selalu disesuaikan dengan semangat landasan yuridis yang menghendaki adanya penyempurnaan kurikulum antara lain: Perubahan pada UUD 1945 Pasal 31, tentang pendidikan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang GBHN tahun 1999-2004: Bab IV bagian E, butir 3, mengenai pembaruan system pendidikan termasuk di dalamnya pembaruan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Bab IV Pasal 7, tentang Kewenangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

<sup>93</sup> Dari segi bahasa metode berasal dari dua kata, yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti 'melalui' dan *hodos* berarti 'jalan'. Dengan demikian metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Ada juga yang mengartikan metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin tersebut. Singkatnya metode adalah jalan untuk mencapai tujuan. Adapun kata 'metodologi' berasal dari kata 'metoda' dan 'logi'. Logi berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti akal atau ilmu. Jadi metodologi artinya ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jika kata metode dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat membawa arti metode sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan Islam pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu metode dapat pula membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum fungsi metode adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksana operasional ilmu pendidikan. Sedangkan dalam konteks lain metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Baca: Mohammad Noor Syam, *Falsafah Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), h. 24.

kebutuhan, harapan dan tuntutan kehidupan yang senantiasa maju dan berkembang.<sup>94</sup>

Metode pengajaran (*method of instruction*) yang diterapkan pada suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sistem dan kurikulum yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Menurut M. Hasbi Amiruddin dalam bukunya *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, bahwa metode-metode pengajaran yang lazim dipergunakan pada lembaga pendidikan tradisional berupa *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* di Aceh adalah: *pertama*, metode *qawâ'id*.<sup>95</sup> *kedua*, metode *tarjamah*.<sup>96</sup> *ketiga*, metode ceramah. *Keempat*, metode hafalan. *Kelima*, metode tanya jawab dan *keenam*, metode diskusi.<sup>97</sup> Yang dimaksud dengan metode tanya jawab di sini adalah tanya jawab yang berlangsung antara peserta didik (santri) dengan *teungku* (guru). Sedangkan metode diskusi adalah melibatkan guru dan sesama peserta didik (santri).

Penjelasan senada juga disampaikan Muhammad Ali Ishak, ketika diwawancarai menjelaskan bahwa pada dasarnya metode yang digunakan *dayah* menjelang lahirnya Jami'ah Almuslim adalah berkisar pada metode yang sangat tradisional, berupa hafalan, baca kitab, tanya jawab, dan diskusi terbatas. Metode hafalan biasanya digunakan untuk menghafal nahwu, sharaf dan mantiq. Metode baca kitab dilakukan hampir semua mata pelajaran, kitab yang dibacakan berupa kitab kuning (kitab klasik/kitab gundul). Metode tanya jawab biasanya digunakan oleh murid untuk menanyakan hal-hal yang tidak diketahui pada ketika paparan pelajaran disampaikan guru.<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 589.

<sup>95</sup> Metode *qawa'id* adalah guru melatih murid-murid untuk mengalihkan bahasakan maksud teks dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan memperhatikan kedudukan jabatan kata dalam kalimat. Baca: M. Hasbi Amiruddin, *Perkembangan Dayah*, h. 61.

<sup>96</sup> Metode *tarjamah* ialah bersifat lisan dan masih terikat dengan penggunaan bahasa Melayu lama, seperti menggunakan “bermula” pada subjek dari kalimat, “itu” pada prediket, “akan” pada objek dan istilah-istilah lainnya. Baca: M. Hasbi Amiruddin, *Perkembangan Dayah*, h. 61.

<sup>97</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Perkembangan Dayah*, h. 60-61.

<sup>98</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

Karena metode pengajaran yang diterapkan pada suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sistem dan kurikulum yang digunakan lembaga pendidikan tersebut, maka salah satu komponen yang mendapat perhatian khusus pada Madrasah Almuslim adalah metode pengajarannya. Pada masa awal operasional Madrasah Almuslim metode yang selama ini diterapkan pada lembaga pendidikan tradisional masih tetap dipertahankan, tetapi dengan menambah beberapa metode lain dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada, seperti kondisi sosiologis, dan psikologis anak didik.

Menurut Muhammad Daud Hanafiah, salah seorang pengajar mata pelajaran muatan lokal *Kealmusliman*, ketika diwawancarai menjelaskan bahwa metode pengajaran yang dipergunakan guru pada Madrasah Almuslim ketika itu (1930-an ke atas) sebahagian masih tetap mempertahankan metode-metode lama yang sering digunakan pada *dayah-dayah*, tetapi ditambah dengan beberapa metode yang tergolong modern pada waktu itu, di antaranya adalah: 1). metode diskusi kelompok, 2). metode demonstrasi, 3). metode eksperimen. 4). metode pemberian tugas belajar). 5). metode kerja kelompok. 6). metode karyawisata (*fiknik*) dan 7). metode latihan.<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Daud Hanfiah diperoleh informasi bahwa: *Pertama* metode diskusi kelompok sering digunakan oleh guru pada Madrasah Almuslim, disebabkan metode ini memiliki beberapa kelebihan di antaranya mendorong siswa berfikir kritis, mendorong siswa mengekspresitasikan pendapatnya secara bebas, mendorong siswa mengembangkan pikirannya untuk memecahkan masalah bersama, membiasakan peserta didik suka mendengar pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan siswa bersikap toleran.

*Kedua*, metode demonstrasi sering digunakan terkait dengan ketrampilan, seperti praktek membaca Alquran, shalat, mengkafani jenazah, tayamum dan pelaksanaan haji.

---

<sup>99</sup> Muhammad Daud Hanfiah, Dosen Pengajar Mata Kuliah Kealmusliman pada STIT Almuslim, juga pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di Matanglumpangdua, tanggal 17 Agustus 2010.

*Ketiga*, metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran, di mana anak didik melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari, metode ini sering digunakan oleh guru Madrasah Almuslim, karena memiliki beberapa kelebihan di antaranya dapat membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri, dapat membuat siswa kreatif dan lain-lain.

*Keempat*, metode *Resitasi* (pemberian tugas belajar), metode ini adalah metode yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada siswa untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan dan ketrampilan tertentu.

*Kelima*, metode kerja kelompok. Metode ini sering digunakan dalam rangka melaksanakan suatu tugas yang diberikan guru kepada siswa agar siswa terbiasa bekerja dalam tim. Metode ini mendapat perhatian tersendiri pada Madrasah Almuslim.

*Keenam*, metode karya wisata, karena pada madrasah Almuslim salah satu mata pelajaran ekstra kurikuler yang diajarkan adalah pramuka yang kemudian melahirkan grup pramuka yang diberinama dengan "KAMUS"<sup>100</sup>, maka ketika itu salah satu metode yang dipergunakan adalah metode karyawisata dengan mengunjungi berbagai tempat yang cocok dalam pelatihan kepramukaan.

*Ketujuh*, metode latihan, metode ini sering digunakan dalam pelatihan kepramukaan pada madrasah Almuslim, di samping pada mata pelajaran fiqh untuk melatih salat jenazah, dan lain-lain. Metode-metode tradisional yang dipakai di *dayah-dayah* tetap dipakai, tetapi lama-kelamaan metode-metode tradisional tersebut tidak digunakan lagi. Hal ini karena tehnik belajar mengajar dengan metode tersebut bertolak dari keyakinan bahwa isi kitab yang diajarkan *teungku* (guru) adalah benar, tidak mungkin seorang *teungku* mengajarkan sesuatu yang keliru dan menyesatkan, serta anggapan bahwa belajar adalah ibadah dan sakral. Pemahaman dan pemikiran semacam ini tidak mungkin dipertahankan lagi pada waktu yang serba mungkin.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> KAMUS adalah nama yang diberikan untuk grup pramuka yang merupakan singkatan dari "Kepanduan Almuslim". Baca: Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 29-30.

<sup>101</sup> Muhammad Daud Hanfiah, Dosen Pengajar Mata Kuliah Kealmusliman pada STIT Almuslim, juga pengurus Yayasan Almuslim periode 2000-2005, wawancara di

Pendapat senada juga disampaikan Muhammad Ali Ishak, pengurus Jami'ah Almuslim, ketika diwawancarai menjelaskan:

Secara umum, sistem klasikal yang diterapkan di Madrasah Almuslim dapat dikatakan telah mengusung sejumlah metode pengajaran (*method of instruction*) yang relatif modern di samping metode lama termasuk ceramah. Para guru di madrasah ini dalam proses kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas telah menerapkan metode pengajaran secara *variatif* dan *kombinatif*. Dikatakan *variatif* dan *kombinatif* karena, ketika mengajar, para guru tidak hanya terfokus pada satu metode saja melainkan menggunakan beberapa metode secara bergantian, kebiasaan menggunakan metode lama juga telah berangsur-angsur berubah.<sup>102</sup>

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan pada komponen metode pengajaran (*method of instruction*) yang dilakukan Jami'ah Almuslim, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 41. Pembaruan pada Aspek Metode Pembelajaran**

Metode pembelajaran pada lembaga Tradisional sebelum Pembaruan	Metode pembelajaran pada Madrasah Almuslim setelah Pembaruan
<p>Masih menggunakan metode-metode klasik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>qawâ'id</i></li> <li>2. Metode <i>tarjamah</i></li> <li>3. Metode Ceramah (<i>taharîqat al-muhâdharat; method of lectures</i>)</li> <li>4. Metode hafalan</li> <li>5. Metode tanya Jawab</li> <li>6. Metode diskusi terbatas</li> </ol>	<p>Di samping masih menggunakan metode-metode klasik, juga menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode diskusi (<i>methods of discussion; al-munâqasah; al-hiwâr; al-nuqasy; al-jadal</i>)</li> <li>2. Metode demonstrasi</li> <li>3. Metode eksperimen (<i>experimentation</i>)</li> <li>4. Metode pemberian tugas belajar</li> <li>5. Metode kerja kelompok.</li> <li>6. Metode karyawisata</li> <li>7. Metode latihan</li> </ol>

Dalam proses kegiatan belajar-mengajar pada umumnya termasuk

---

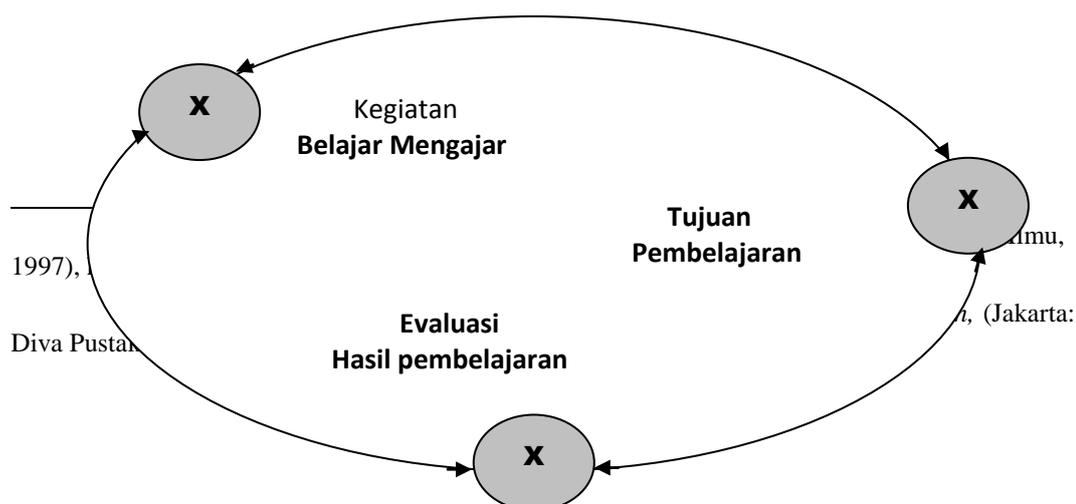
Matangglumpangdua, tanggal 17 Agustus 2010.

<sup>102</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara di Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

pada madrasah Almuslim, setiap mata pelajaran selalu membutuhkan metode ceramah (*ṭharîqaṭ al-muhâḍarạṭ; method of lectures*), paling tidak metode ini digunakan beberapa saat ketika *apersepsi* mata pelajaran tertentu dilakukan. Metode ceramah tergolong paling klasik dalam proses kegiatan belajar mengajar, tetapi keberadaannya selalu dibutuhkan karena sifat komunikatif yang melekat padanya. Artinya, proses pengajaran adalah proses komunikasi atau proses transmisi ilmu pengetahuan dari pengajar kepada peserta didik dengan menggunakan media verbal. Biasanya metode ini berlangsung monolog atau searah saja dan karena itu memiliki titik kelemahan, yaitu adanya perasaan bosan atau jenuh yang dirasakan para peserta didik jika metode ini digunakan terlalu lama atau tidak *diimprovisasi* dengan *retorika* yang menarik. Nata mensinyalir bahwa penggunaan metode ceramah secara masif, lebih disebabkan karena metode tersebut termasuk paling mudah, murah, dan tidak banyak memerlukan peralatan.<sup>103</sup>

## 6. Pembaruan pada Aspek Evaluasi Pembelajaran

Sistem evaluasi pendidikan dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis, didaktis, serta administrasi. Evaluasi pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal yaitu, evaluasi harus bermuara pada tujuan, obyektif, komprehensif dan kontiniu. Mengacu pada pengertian tersebut, evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menentukan nilai keberhasilan belajar seseorang setelah mengalami proses belajar.<sup>104</sup> Antara evaluasi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran memiliki hubungan timbal balik antara satu sama lain, menunjukkan ikatan mata rantai yang tidak mungkin dapat diputuskan, sebagaimana terlihat pada ilustrasi berikut:



**Gambar 8.** Ilustrasi diagram evaluasi pembelajaran

Dengan memperhatikan diagram di atas, maka sebenarnya kegiatan evaluasi pembelajaran baru menggambarkan sebagian dari keseluruhan kegiatan pembelajaran, yaitu yang berhubungan dengan aspek-aspek pembelajaran. Bila dicermati lebih teliti, kegiatan penilaian hasil belajar adalah evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kegiatan evaluasi pembelajaran dapat diselenggarakan bila petugas yang melakukan evaluasi (*evaluator*) mampu memahami tujuan yang akan dicapai, yang termuat dalam kurikulum.

Sistem evaluasi modern harus terpenuhinya prinsip-prinsip dasar sebuah evaluasi. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah: *Pertama*, prinsip keseluruhan (*Comprehensive/Syumuliyyah*), dengan prinsip ini diharapkan evaluasi akan menyentuh semua ranah pendidikan baik, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

*Kedua*, prinsip kesinambungan (*Continuity/Istimrâriyyat*), dengan prinsip ini diharapkan evaluasi hasil belajar dilakukan secara teratur, dari waktu ke waktu, terencana dan terjadwal.

*Ketiga*, prinsip obyektivitas (*Obyectivity/Maudhu'îyyat*). Prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari fakta-fakta yang bersifat subjektif.

*Keempat*, prinsip keterpaduan (*Integralitas*). Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip keterpaduan antara tujuan intruksional pengajaran, materi pembelajaran, dan metode pengajaran.

*Kelima*, prinsip keterlibatan peserta didik. Evaluasi ini merupakan suatu hal yang mutlak, karena keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif,

tetapi kebutuhan mutlak.

*Keenam*, prinsip koherensi. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari dan sesuai dengan ranah kemampuan peserta didik yang hendak diukur.

*Ketujuh*, prinsip *paedagogis*. Perlu adanya alat penilai dari aspek paedagogis untuk melihat perubahan sikap dan perilaku sehingga pada akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi motivator bagi diri siswa.

*Kedelapan*, prinsip akuntabel. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau bahan pertanggungjawaban bagi pihak yang berkepentingan seperti orang tua siswa, sekolah, dan lainnya.<sup>105</sup>

Sistem evaluasi yang dilakukan di *dayah* masih menganut cara-cara yang sangat tradisional, bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak pernah dilakukan evaluasi, seperti pada penerimaan siswa (murid) baru, *dayah* tradisional tidak pernah melakukan evaluasi berupa tes masuk, kemudian evaluasi kenaikan kelas hanya dilakukan dengan tes baca kitab saja yang meliputi; baca baris, arti dan penjelasan (*surah*) secara terbatas. Sedangkan kelulusan ditentukan oleh restu *Teungku Chik (kyai)*, tanpa melalui tes sebagaimana dikenal dalam dunia modern.<sup>106</sup>

Komponen evaluasi inilah kemudian yang merupakan salah satu yang mendapat pembaruan pada Jami'ah Almuslim. Sebelumnya, lulusan *dayah* diukur dengan legitimasi restu *Teungku Chik (kyai)* dengan cara terlebih dahulu ditentukan oleh penampilan kemampuan mengajarkan kitab klasik kepada orang lain dan audiensinya (*mustāmi'*) menjadi puas, sekarang bergeser ke bentuk ujian (*imtihân*) resmi dengan sistem angka-angka tanda lulus atau naik tingkat, bahkan dengan ijazah (formal).

Menurut Ismuha, ujian naik kelas dan ujian akhir pada Madrasah Almuslim dilakukan sangat ketat meliputi ujian lisan dan ujian tulisan terhadap materi-materi yang telah diajarkan. Karena ketatnya ujian yang dilakukan

<sup>105</sup> Ahmad Munjin Nasir dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 163-164.

<sup>106</sup> Ahmad Muthohar, AR, *Ideologi Pendidikan Pesantren*, (Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 104.

sehingga angkatan pertama (Juli, 1936) dari 50 (lima puluh) orang yang mengikuti ujian hanya 4 (empat) orang saja yang lulus. Mereka yang lulus adalah: Ibrahim Kenawat dari Aceh Teungah, Izzuddin Ali dari Peusangan, M. Asyik Ujong Blang, Bireuen, dan M. Ali Sulaiman Cot Bukit. Pada ujian angkatan kedua tahun berikutnya, yaitu Juli 1937, yang berhasil lulus sejumlah 8 (delapan) orang, yaitu Mahyiddin Yusuf dan Ismail Muhammad Syah (ISMUHA), Sulaiman Mahmud Pulo Kiton Bireuen, Mustadla Hasballah Lueng Daneun, Yahya Hanafiah Jangka, M. Rasyid Pase Teupin Punti, M. Yusuf Takengon dan Ahmad Krueng Panjo.<sup>107</sup>

Muhammad Ali Ishak ketika diwawancarai penulis di Lhokseumawe menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pada Madrasah Almuslim meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Kemampuan kognitif dengan model tes kemampuan membaca, mengartikan dan menjelaskan maksud teks kitab yang dibaca. Kemampuan afektif diukur dengan kemampuan menerima, merespon, menghargai setiap kondisi yang dijadikan eksperimen dalam tes tersebut. Tes ini dilakukan dengan lisan. Kemampuan psikomotor diukur dengan tes praktek terhadap materi-materi yang telah diajarkan kepada siswa. Kemudian evaluasi yang dilakukan pada madrasah Almuslim ini sifatnya komprehensif yaitu, tes dilakukan terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan.<sup>108</sup>

Dari berbagai pendapat di atas menunjukkan bahwa Madrasah Almuslim telah melakukan pembaruan pada evaluasi pengajaran, dari sistem evaluasi tradisional yang dilakukan di *dayah* selama ini kepada sistem evaluasi modern. Walaupun sistem evaluasi yang dilakukan saat itu tidak sepenuhnya memenuhi kriteria atau prinsip evaluasi modern, namun perubahan dari sistem evaluasi tradisional ke sistem modern telah mulai dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya menyangkut pembaruan aspek evaluasi yang dilakukan Jami'ah Almuslim, dapat dilihat pada tabel berikut:

#### **Tabel 42. Pembaruan pada Aspek Evaluasi**

<sup>107</sup> Ismuha, *Riwayat Ringkas*, h. 74.

<sup>108</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara, Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

Evaluasi pada lembaga Tradisional sebelum Pembaruan	Evaluasi pada Madrasah Almuslim setelah Pembaruan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadang-kadang tidak dilakukan evaluasi kenaikan kelas, karena sistem naik kelas ditentukan dengan tamanya kitab.</li> <li>2. Jika ada evaluasi, hanya berupa, tes baca kitab saja yang meliputi; baca baris, arti dan penjelasan (<i>surah</i>) secara terbatas.</li> <li>3. Sedangkan kelulusan ditentukan oleh restu Teungku Chik (pimpinan) dengan tanpa ijazah formal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi merupakan keharusan</li> <li>2. Sistem evaluasi melengkapi tes kognitif, afaktif, dan psikomotorik.</li> <li>3. Tes bersifat komprehensif yaitu, terhadap semua mata pelajaran yang diajarkan</li> <li>4. Bentuk ujian (<i>imtihân</i>) akhir adalah resmi dengan sistem angka-angka tanda lulus atau naik tingkat, bahkan dengan ijazah (formal).</li> </ol>

Dari hasil wawancara dengan Khalil Ibrahim, diperoleh informasi bahwa Madrasah Almuslim melakukan evaluasi terhadap peserta didiknya bertujuan:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui apakah suatu mata pelajaran yang diajarkan dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau harus diulang kembali.
3. Untuk mendapatkan informasi apakah seseorang siswa dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau harus mengulang di kelas semula.
4. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh siswa sudah sesuai dengan kapasitas atau belum
5. Untuk mengetahui atau menafsirkan apakah seorang siswa telah cukup matang untuk dilepaskan ke masyarakat atau untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.
6. Untuk mengadakan seleksi dan penempatan
7. Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.<sup>109</sup>

<sup>109</sup> Khalil Ibrahim, Bendahara Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984 dan Wakil Ketua I Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1984-1989, wawancara di Matangglumpangdua,

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang berhasil penulis kumpulkan dari berbagai lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan di lembaga tersebut terus mendapat perhatian serius dan selalu dimodifikasi sesuai dengan perkembangan. Sejak lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan, maka sistem penilaian hasil belajar yang dilakukan pada Jami'ah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.<sup>110</sup> Karena hasil evaluasi itu sendiri menjadi indikator bagi proses pendidikan yang dijalankan selama ini, maka atas dasar itu penilaian pendidikan diarahkan sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Untuk itu, penilaian peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian yang berlaku secara nasional. Untuk mencapai hasil penilaian secara objektif, Jami'ah Almuslim memberlakukan prinsip-prinsip penilaian bagi peserta didik yang belajar di lembaga pendidikan Jami'ah Almuslim secara khusus. Prinsip tersebut menurut Ali Ishak adalah sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel. Dengan penilaian semacam ini diharapkan ke depan Jami'ah Almuslim bisa menjadi institusi pendidikan yang unggul dalam mencapai cita-cita muliannya.<sup>111</sup>

#### **D. Pembaruan Dalam Bidang Metodologi Pengajaran**

Lembaga pendidikan tradisional berupa *meunasah*, *rangkas* dan *dayah* di Aceh sampai sekarang, umumnya masih menggunakan sistem *halaqat* (*circle study*) atau sistem tradisional dalam pembelajarannya. Karena institusi pendidikan tradisional tersebut belum memiliki bangunan seperti sekolah modern dewasa ini, belum dilengkapi dengan ruangan kelas, bangku dan meja belajar, maka murid-murid belajar duduk di lantai bertikar mengelilingi guru berbentuk setengah lingkaran (*halaqat: circle study*). Kadang-kadang tempat duduk guru sedikit

---

tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>110</sup> Baca: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2007, Tentang Standar Penilaian Pendidikan.

<sup>111</sup> Muhammad Ali Ishak, Ketua Umum Pengurus Jami'ah Almuslim periode 2000-2005, wawancara, Lhokseumawe, tanggal 14 Agustus 2010.

lebih tinggi dari murid dan kadang-kadang mempunyai korsi khusus untuk guru. Sebagai konsekuensi dari sistem pendidikan tradisional tersebut, maka metode pengajaran yang digunakan juga sangat terbatas pada metode-metode mengajar tradisional pula.

Sistem *h□alaqat* adalah seorang guru atau *teungku* duduk di depan para santri (Aceh: murid) membacakan kitab yang dipelajari. Santri duduk bersila di depan *teungku* (guru) secara bersaf dan membentuk setengah lingkaran. Dalam keadaan seperti ini, *teungku* memberikan pelajaran dengan menggunakan "metode tuntunan" dan metode ceramah. Penulis mengatakan metode tuntunan karena santri menyimak kitab yang dibaca atau diajarkan oleh *teungku* dan *teungku* menuntun para santri membetulkan tanda baca atau harakat pada kitab yang diajarkan tersebut. Setiap membacakan kalimat demi kalimat isi kitab, *teungku* menerangkannya dengan menggunakan bahasa Aceh dan kadangkala menggunakan bahasa Indonesia dan Arab dengan memakai metode ceramah.<sup>112</sup> Keadaan seperti ini dilakukan hampir seluruh *dayah* yang ada di Aceh sampai dengan sekarang.

Penerapan sistem *h□alaqat* dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan tradisional semacam ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya: *Pertama*, santri merasa tidak terikat dengan sistem pembelajaran *h□alaqat* ini karena: a) tidak ada daftar hadir yang mengikat, sehingga mereka merasa bebas; b) tidak ada teguran dari *teungku* meskipun santrinya tidak sungguh-sungguh menerima pelajaran; c) tidak diciptakan instrumen yang dapat mengikat santri untuk mempertanggungjawabkan kemampuan mengekspresikan ilmu-ilmu yang sudah diterima; d) sebagian santri merasa sudah memahami pelajaran yang sedang diajarkan *teungku*. *Kedua*, iklim belajar kurang kondusif, karena kadang-kadang jumlah santri sangat banyak untuk ukuran ideal suatu kegiatan proses belajar-mengajar, hal ini disebabkan sistem *h□alaqat* tidak memiliki ketentuan berapa jumlah santri dalam satu rombongan belajar. *Ketiga*, hubungan psikologis kurang mendukung, karena tingkatan umur mereka tidak merata dan level

---

<sup>112</sup> Bahaking Rama, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren as'Adiyah Sengkang Wajo Sulawesi Selatan*, (Disertasi, tidak diterbitkan, 2000), h.190.

pendidikan tidak sama. Tampaknya, pada sistem *h□alaqat* ini teori kurikulum pada aspek psikologis kurang diimplimentasikan. Tingkat perkembangan intelektual dan pertumbuhan fisik nyaris lepas dari perhatian *teungku* dan tidak bersinergi dengan teori pembaruan kurikulum. Hal tersebut dapat dipahami karena ada tujuan utama yang ingin dicapai *teungku* dalam sistem *h□alaqat*, yaitu hafalan. *Teungku* sangat mementingkan hafalan karena tradisi ini dipandang sangat membantu dan menjamin berhasilnya santri dalam menerima transfer ilmu dari *teungku* dibandingkan dengan cara tertulis. *Teungku* menganjurkan santrinya untuk tidak mencatat ketika ia sedang menerangkan. Itulah sebabnya sehingga santri di *dayah* tidak membawa buku catatan selain kitab pegangan atau kitab yang sedang dipelajari. *Keempat*, sistem *h□alaqat* juga membuat santri kurang kreatif, karena hanya mendengar bacaan kitab dan penjelasan dari *teungku* dengan memakai metode ceramah, walaupun tidak tertutup kemungkinan ada diskusi-diskusi terbatas antara *teungku* dan santri.

Berangkat dari sejumlah kekurangan yang telah penulis paparkan di atas, dengan tidak mengesampingkan kelebihanannya, maka Jami'ah Almuslim sejak mendirikan madrasah yang pertama sekali pada tahun 1930 berusaha melakukan pembaruan dalam bidang metodologi pengajaran yang memungkinkan lahirnya kreativitas dan produktivitas pada peserta didiknya dalam kegiatan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Atas dasar itu pembaruan yang sudah dilakukan Jami'ah Almuslim dari sistem *h□alaqat* ke sistem *klasikal* dalam bentuk kemadrasahan.

Sistem klasikal ini menggunakan madrasah dan sekolah dengan perjenjangan kelas di dalamnya. Kelompok kelas belajar ialah sekelompok pelajar yang mengikuti pendidikan yang proses belajar mengajarnya berlangsung dalam suatu ruangan dan waktu yang sama, mengikuti mata pelajaran yang sama, dan peserta didik yang memiliki umur kurang lebih sama atau sebaya. Sistem klasikal ini memungkinkan para peserta didik untuk pindah atau naik kelas dan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Sistem klasikal banyak memiliki keunggulan-keunggulannya, di

antaranya,<sup>113</sup> *Pertama*, memudahkan para guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan, kerana jumlah peserta didik terbatas pada setiap kelas. *Kedua*, guru dapat mengevaluasi tingkat kemampuan siswanya terhadap mata pelajaran yang diberikan padanya. *Ketiga*, sistem klasikal memungkinkan para guru untuk menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang membuat peserta didik lebih kreatif dan suasana belajar lebih hidup. *Keempat*, sistem klasikal juga memungkinkan pendidik menggunakan berbagai media pembelajaran berupa papan tulis, bangku tempat duduk, meja belajar, alat peraga, dan berbagai peralatan dan media teknologi pembelajaran lainnya. Semua keunggulan-keunggulan tersebut telah diimplimentasikan pada lembaga-lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim sejak tahun 1930-an melalui lembaga madrasahnyanya. Selaku lembaga pendidikan *pionir* pada Jami'ah Almuslim yang dijadikan model dalam pembaruan pendidikan Islam di Aceh.

Jejak besar pembaruan yang dilakukan Jami'ah Almuslim, baik pembaruan dalam bidang kelembagaan, pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan, pembaruan dalam bidang sistem pendidikan, maupun pembaruan dalam bidang metodologi adalah tumbuhnya tradisi *learning society* (masyarakat pembelajar) dalam masyarakat Aceh bersama pelembagaan amal saleh dengan meletakkan ibadah dalam fungsi dan dimensi sosial. Saat itu materi pembelajaran tidak dibatasi ilmu, yang kemudian digolongkan ke dalam *Islamic studies*, tetapi juga dipelajari ilmu yang kemudian digolongkan ke dalam *secular studies* atau ilmu umum atau sekuler. Semuanya dirancang agar bisa memproduk lulusan yang menguasai ajaran ibadah *mahd□ah*, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan akhlak, tetapi juga mampu memainkan peran sosial kebangsaan yang lebih luas dalam jabatan birokrasi pemerintahan dan berbagai jabatan dalam lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi modern. Guna mendukung kegiatan pendidikan tersebut dikembangkanlah tradisi pembelajaran melalui doktrin pembelajaran berbasis dua kewajiban, bagi setiap Muslim, yaitu wajib guru sekaligus wajib murid. Selanjutnya dikembangkanlah program pendidikan yang melembaga,

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 195.

mulai dari jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Di sisi lain, dikembangkanlah guru keliling sebagai wadah bagi pembelajaran luar sekolah yang kemudian lebih dikenal dengan dakwah atau pengajian-pengajian. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sekaligus pengembangan kepribadian dalam tanggungjawab sosial yang dikelola secara sistematis oleh Jami'ah Almuslim dalam menggapai cita-cita pembaruannya.

Menyimak tentang pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan Jami'ah Almuslim, baik dalam bidang lembaga pendidikan, dalam bidang manajemen, dalam bidang sistem pendidikan yang meliputi: tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, serta evaluasi, maupun dalam bidang metodologi, maka dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut memenuhi unsur-unsur modernisasi, baik kebersengajaan, kebaruan, keberterimaan, kekhususan dan memiliki tujuan yang jelas. Kesemua unsur-unsur ini terpenuhi dengan baik, maka wajar Safwan Idris menyebutkan bahwa Jami'ah Almuslim merupakan bagian dari gerakan *modernist* di Indonesia yang membawa obor pembaruan dalam bidang pendidikan Islam.<sup>114</sup>

#### **E. Kontribusi Jami'ah Almuslim terhadap Kehidupan Sosial, Keagamaan, Intelektual dan Politik di Aceh**

Kontribusi Jami'ah Almuslim yang akan penulis jelaskan pada subbab ini meliputi kontribusi dalam bidang sosial, keagamaan, intelektual dan politik sesudah Jami'ah Almuslim didirikan.

##### **1. Kontribusi Jami'ah Almuslim dalam Bidang Sosial**

Pertanyaan awal yang harus diajukan adalah apakah selama ini Jami'ah Almuslim ikut memberikan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan di Aceh yang dapat memecahkan problematika masyarakat, atau justru menjadi bagian dari problematikan masyarakat itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak sulit, secara historis dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan Jami'ah Almuslim bersama pegurusnya dalam menjalankan roda organisasi

---

<sup>114</sup> Idris, *Jami'ah Almuslim*, h. 6.

Jami'ah, yang tidak saja berkuat dan terfokus pada persoalan pendidikan semata, tetapi juga ikut memberikan kontribusi nyata dalam bidang sosial.

Sejarah telah memberikan bukti signifikan bahwa Jami'ah Almuslim yang memiliki visi pembaruan memiliki kemampuan dalam melakukan transformasi total terhadap perkembangan sosial masyarakat yang majemuk dan heterogen, tanpa harus mengorbankan identitas dan jati dirinya sebagai organisasi pembaruan. Almuslim sebagai sebuah Jami'ah berada pada posisi strategis dalam ikut membangun dan mewarnai kehidupan sosial masyarakat Aceh, sehingga bisa tetap bertahan (*survive*) mulai zaman penjajahan sampai zaman reformasi sekarang.

Tidak dapat disangkal bahwa Jami'ah Almuslim telah memberikan andil besar dalam memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari karya nyata Jami'ah Almuslim dalam memperbaiki hasil panen petani di Aceh, terutama di Takengen, Aceh Tengah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pada tanggal 9 Agustus 1982, Jami'ah Almuslim telah mendirikan sebuah pesantren pertanian yang pertama di Aceh dalam rangka membantu para petani Aceh guna meningkatkan produksi hasil pertaniannya. Aceh merupakan *zona agraris*, di mana sebagian besar penduduknya terlibat dalam usaha pertanian. Untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut membutuhkan tenaga ahli dalam bidang pertanian yang dapat merubah pola pikir masyarakat untuk menerima dan memanfaatkan berbagai teknologi baru, sebagaimana diungkapkan Kaslan:

Meningkatkan usaha tani dan pendapatannya harus dengan pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang dapat mendinamisir pandangan hidup petani, kalau penerapan teknologi tersebut berhasil dilakukan oleh para petani, maka petani akan lebih terangsang untuk menerima pembaruan (*inovasi*) lebih lanjut.<sup>115</sup>

Usaha Jami'ah Almuslim dalam mengembangkan ilmu pertanian melalui Pesantren Pertaniannya pada ketika itu membawa hasil yang gemilang, ditandai dengan banyaknya petani yang merubah sistem taninya dari pola manual ke sistem teknologi modern, khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan kabupaten

---

<sup>115</sup> Kaslan, *Seuntai Pengetahuan Tentang Usaha Tani*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), h. 77.

Aceh Teungah. Seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1986, Pesantren Pertanian Almuslim menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Almuslim. Sekolah Tinggi ini telah banyak memainkan perannya dalam membantu Petani di Aceh, baik dengan menelorkan tenaga ahli dalam bidang budi daya pertanian, maupun mengirimkan mahasiswanya guna membantu secara praktis masyarakat petani di Aceh dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.<sup>116</sup>

*Kedua*, Bantuan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu, melalui program khitan massal dan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim, yang sangat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat Aceh.

*Ketiga*, Program kerja nyata yang dilakukan mahasiswa berbagai program studi di lingkungan Unversitas dan STAI Almuslim juga telah banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan berbagai program bantuan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen guna membatu masyarakat yang tertimpa musibah, baik berskala lokal (Tsunami), nasional (bantuan gempa, banjir dan lain-lain), maupun internasional (bantuan untuk Palestina dan Afganistan). Ini semua merupakan kontribusi nyata Jami'ah Almuslim terhadap masyarakat.<sup>117</sup> Semua kegiatan ini merupakan kontribusi nyata Jami'ah Almuslim dan lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya dalam bidang sosial di Aceh.

## **2. Kontribusi Jami'ah Almuslim dalam Bidang Keagamaan**

Umat Islam di Aceh menjelang didirikannya Jami'ah Almuslim berada dalam kondisi keterpurukan yang hampir sempurna, di mana pemahaman keagamaan yang serba hitam-putih, pemahaman yang berorientasi fiqh dan pemahaman yang tidak mampu memberikan kebebasan. Paradigma umum yang digunakan oleh umat Islam di Aceh adalah *taqlid* yang merupakan suatu sikap penerimaan pasif yang mutlak. Padahal sebagaimana dikatakan Ziauddin Sadar

---

<sup>116</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2006-2010 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 26 Oktober 2010.

<sup>117</sup> Mughtar Almasyah, Ketua STAI Almuslim periode 2006-2010, wawancara di Matangglumpangdua, pada tanggal 27 Oktober 2010.

bahwa taqlid adalah suatu sikap yang mengikuti dan mematuhi secara membuta dan tanpa kesangsian sama sekali.<sup>118</sup>

Umat Islam pada masa itu dominan mengikuti logika *taqlid* yang dianut secara kolot. Kondisi ini membawa kepada keterbelakangan yang abadi. Padahal Islam menyediakan ruang, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mencari dan memahami dunianya. Interpretasi kritis terhadap teks Islam pada masa awal Jami'ah Almuslim didirikan belum banyak dilakukan oleh umat Islam di Aceh, padahal interpretasi kritis dengan metode yang terbaik untuk memahami Islam agar menjadi agama yang transformatif merupakan keharusan bagi umat Islam kalau ingin menjadi maju.

Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap lebih mengikuti cara pandang rasional dalam memahami teks-teks Islam dan mencoba mengikis habis dikotomi dalam bidang pendidikan untuk menjawab tantangan-tantangan modernitas.<sup>119</sup> Kuatnya analogi, bahwa Islam identik dengan kekolotan, kebodohan, dan keterbelakangan, karena praktek pendidikan Islam selama ini dijalankan di *dayah* hanya berorientasi pada pelajaran agama saja, sehingga mata pelajaran umum tidak mendapat tempat, sehingga melahirkan sebagian besar masyarakat Aceh yang anti pelajaran umum. Inilah yang pertama diluruskan Jami'ah Almuslim dengan mencoba menggabungkan mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama dalam satu lembaga pendidikan Madrasah Almuslim. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan tradisional pada waktu itu tidak diperkenankan membaca kitab-kitab modern seperti karangan Syekh Muhammad Abduh dan Syekh

---

<sup>118</sup> W.F. Wertheim, *East Parallels, Sosiologi Approach to Modern Asia*, (The Haque: W. Van Hoeve, 1964), h. 14.

<sup>119</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan karya nyata Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap yang menerima pelajaran umum diajarkan di Marasah Almuslim, dapat memberikan indikasi bahwa beliau tidak membeda-bedakan antara pelajaran agama dan pelajaran umum, sikap seperti ini dapat menghilangkan dikotomi pendidikan yang selama ini dipegang kuat oleh lembaga tradisional Aceh berupa *dayah* yang menanamkan kebencian terhadap pelajaran umum, sehingga melahirkan pernyataan bahwa, siapa yang menyekolahkan anaknya kesekolah yang didirikan Belanda anak tersebut akan menjadi kâfir, karena di sekolah belanda diajarkan mata pelajaran umum.

Muhammad Rasyîd Ridwân, sebaliknya siswa di lembaga pendidikan di bawah Jami'ah Almuslim buku-buku tersebut diwajibkan untuk membacanya.<sup>120</sup>

Inilah jejak rekam perkembangan keagamaan masyarakat Aceh yang harus direspon Jami'ah Almuslim dalam rangka memberikan kontribusinya guna perbaikan dalam bidang keagamaan masyarakat Aceh. Untuk merealisasikan tujuan dan menjawab persoalan masyarakat, Jami'ah Almuslim melakukan kerja nyata yaitu: *Pertama*, membuka pengajian Tafsir Alquran dan Hadis. Pengajian ini diasuh Teungku Abdurrahman sendiri dan oleh guru-guru lain seperti Teungku Murtadha Hasballah. Pengajian ini bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam rangka memberantas praktek-praktek kemusyrikan, *bid'ah*, *khurafat takhayûl* dan kebodohan yang selama ini telah menghantui masyarakat sebagai akibat dari peperangan panjang (1873-1912).<sup>121</sup> *Kedua*, melakukan dakwah-dakwah rutin baik melalui mimbar Jum'at, mendatangi *meunasah*, mesjid, dan safari ramadhan. Kegiatan ini juga memiliki tujuan yang sama dalam rangka membasmi kemusyrikan dan mengembalikan pemahaman agama masyarakat kepada sumber aslinya, yaitu Alquran dan Hadis. *Ketiga*, melakukan pembekalan terhadap para *imum meunasah* (imam desa) dan *imum mesjid* (imam mesjid) pada era 80 dan 90-an. Pembekalan ini diikuti oleh semua *teungku imum* (imam) *meunasah* dan *teungku imum mesjid* yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh utara pada waktu itu (Kabupaten Aceh Utara, Bireuen dan Kota Lhok Seumawe sekarang). Pembekalan ini merupakan hasil kerjasama antara Jami'ah Almuslim dengan Pemerintah kabupaten Aceh Utara, yang bertujuan untuk meminimalisir dan memperkecil perbedaan pendapat yang sangat tajam terjadi dalam masyarakat menyangkut praktek-praktek *khilâfiat*, seperti *usallî*, *taqdîr*, *ijtihâd*, dan *taqlîd*, dan lain-lain. *Keempat*, melakukan kerjasama dengan *dayah-dayah* salafi dalam rangka penempatan mahasiswa KKN. Program ini baru dilakukan setelah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah terbentuk pada tahun 1986. Tujuan dari program ini dalam rangka mensinergikan pemahaman bersama untuk pembangunan masyarakat Aceh

<sup>120</sup> Muhammad Daud Hanafiah, *Perkembangan Perguruan Tinggi Almuslim Peusangan 1949-1991*, (Skripsi, tidak diterbitkan, 1992), h. 29.

<sup>121</sup> Ismuha, *Ulama Aceh: Teungku Abdurrahman Matangglumpangdua*, (Djogyakarta: Pustaka Awe Geutah, 1949), h. 13.

ke depan. Karena selama ini mulai tahun 1929 dan sampai tahun 2010, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mengasingkan diri dari pengaruh pembaruan modern dan kelompok ini tetap eksis pada sistem tradisionalnya walaupun jumlah mereka tidak banyak, tetapi pengaruhnya masih sangat terasa. Karena itu inilah salah satu tujuan dari kegiatan ini.<sup>122</sup>

Dampak dari kontribusi Jami'ah Almuslim dalam bidang keagamaan di Aceh dapat terlihat hasilnya. Harun Ismail menyatakan:

...yang penting perlu dicatat, bahwa misi Almuslim yang berusaha memurnikan ajaran Islam dari *khurafat*, *takhyûl*, *bid'ah* dan berbagai kemusyrikan yang ada dalam masyarakat Muslim Aceh, terutama dengan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para pelajar Madrasah Almuslim Peusangan sendiri dan usaha-usaha menentangnya dengan bermacam cara, sehingga *khurafat*, *takhyûl*, kemusyrikan, pemujaan terhadap jin dan *bid'ah* sedikit demi sedikit telah hilang dalam masyarakat.<sup>123</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bukti kongkrit peran Jami'ah Almuslim dalam merealisasikan tujuan pendiriannya adalah meningkatkan dakwah dan *amr bi al-ma'rûf wa al-nahy munkâr* [menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan] dalam masyarakat. Peran ini telah dilaksanakan dengan baik oleh Jami'ah Almuslim sejak tahun 1929 sampai tahun 2010 dengan secara sejuak ketika berhadapan dengan tradisi-tradisi lokal yang selama ini dianut masyarakat, melalui *interpretasi*, *adaptasi* dan *antisipasi*. Tegasnya Jami'ah Almuslim tidak mengambil jarak dan sikap *konfrontatif* terhadap budaya atau tradisi masyarakat yang selama ini dijalankan. Implikasinya adalah dapat disesuaikan dengan kondisi objektif masyarakat Aceh, sesekali dapat bersikap *akomodatif*, di waktu lain dapat bersikap *modifikatif*, dan jika terpaksa baru melakukan hal-hal yang bersifat *konprontatif* seperti melalui perdebatan massa (terbuka).

Dalam rangka mewujudkan cita-citanya untuk melakukan pemurnian ajaran Islam bagi masyarakat Aceh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap pada Tanggal 5 Mei 1948 bersama-sama dengan ulama Aceh lainnya

---

<sup>122</sup> Khalil Ibrahim, Bendahara Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1979-1984 dan Wakil Ketua I Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 1984-1989, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 18 Agustus 2010.

<sup>123</sup> Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 31.

mengeluarkan “Maklumat Bersama“ sebagai berikut:<sup>124</sup>

Kami ulama-ulama seluruh Aceh (PUSA), Pengurus-pengurus agama, Hakim-hakim agama dan pemimpin-pemimpin Sekolah Islam Keresidenan Aceh dalam Konperensi Jabatan Agama Keresidenan Aceh yang berlangsung tanggal 20-24 Maret 1948 di Kuta Raja. Memperhatikan, bahwa hal-hal yang tersebut di bawah ini yaitu: *Pertama*, kenduri kematian (kenduri pada hari kematian, kenduri jerat, kenduri seperti *seunujoh* dan sebagainya). *Kedua*, kenduri maulid seperti yang biasa dikerjakan di masa yang lampau. *Ketiga*, kenduri pada kuburan (seperti pada pekuburan *Teungku Di Anjong*, Pocut Samalanga, Pocut Di Barat, dan sebagainya, kenduri di tepi laut, di bawah Jorong, di bawah pohon-pohon yang besar, di hutan dan sebagainya, yang menurut anggapan penduduk untuk melepaskan nazar atau tulak bala). *Keempat*, memberikan sedekah pada hari kematian (sedekah waktu mayat diturunkan dari rumah, sesudah salat janazah, sedekah pada pekuburan dan sebagainya). *Kelima*, mengawal kuburan seperti yang banyak dikerjakan pada zaman lampau. *Keenam*, azan waktu memasukkan mayat ke dalam kubur. *Ketujuh*, membina kuburan, membuat tempat sekeliling kuburan, membuat sesuatu bina di atas kubur. *Kedelapan*, *ratib salik* dan *ratib* di kuburan seperti yang berlaku dan banyak dikerjakan di zaman lampau. *Kesembilan*, membaca Alquran di rumah-rumah kematian seperti adat yang telah berlaku, begitu juga di kuburan telah menjadi adat yang menurut anggapan penduduk tidak boleh ditinggalkan, karena termasuk dalam agama, padahal tidak. Mengetahui bahwa dalam agama tidak ada satu alasan atau dalil dari kitab Allah, Sunnah Rasul, Ijmâ’ ́ulama dan Qiyâs yang menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu disuruh atau sekurang-kurangnya diizinkan mengerjakannya. Minimbang bahwa hal-hal tersebut: *Pertama*, sebagiannya merusakkan tekad ketauhidan kaum muslimin. *Kedua*, sebagiannya melemahkan semangat beribadat. *Ketiga*, sebagiannya membawa kepada membuang-buang harta pada bukan tempatnya (*tabzîr*) yang dilarang oleh agama. *Keempat*, umumnya mencemarkan

---

<sup>124</sup> Maklumat Bersama, *Keputusan Konperensi Jabatan Agama Keresidenan Aceh ke-I*, Tanggal 20 s/d 24 Maret 1948 di Kutaraja, hal. 7-10. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku Muhammad daud Bereueh, Teungku H. Hasballah Indrapuri dan Teungku Ibrahim Amin.

nama Islam dan kaum muslimin di mata dunia. Memutuskan: *Pertama*, pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak diizinkan oleh agama mengerjakannya. *Kedua*, secepat mungkin pekerjaan-pekerjaan itu mesti ditinggalkan. Demikian supaya seluruh masyarakat kaum muslimin mendapat maklum dan mengamalkan keputusan-keputusan ini.

Maklumat di atas menunjukkan bahwa Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap selaku ketua Jami'ah Almuslim cukup giat dan selalu melibatkan diri serta berperan aktif guna memberikan kontribusinya secara kelembagaan dalam bidang keagamaan di Aceh khususnya.

Demikian kiprah Jami'ah Almuslim dalam menjaga kehidupan umat Islam di Aceh agar tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan ruh keislaman. Peran tersebut terus dimainkan Jami'ah Almuslim sejak dulu sampai sekarang, tentu dengan cara dan strategi yang berbeda, apa lagi kondisi Aceh setelah tahun 2004, pasca terjadinya gempa dan tsunami. Di penghujung 2004, Ahad, 26 Desember 2004, Aceh digoyang gempa dengan kekuatan 8,9 SR selama 17 menit. Tidak lama kemudian disusul dengan gelombang pasang tsunami yang sangat ganas. Sebagai akibat dari gempa dan tsunami, lebih dari 250.000 nyawa dinyatakan mati dan hilang. Kondisi Aceh semacam ini membuat berbagai negara seantero dunia berduyun-duyun berdatangan ke Aceh, seperti Malaysia, Pakistan, Amerika Serikat, Turki, Jerman, Singapura, Jepang, Yaman, Canada, Denmark dan lain-lain. Kemudian didukung oleh LSM luar baik dari kalangan PBB maupun bukan, seperti NATO, UNISEP, *World Food Program* (WFP), UNFPA, UNICHA, UNDP, OXFAM, *Save The Children*, *World Vision* dan lain-lain. Kemudian hadir pula lembaga-lembaga Islam seperti Mujahidin, Front Pembela Islam (FPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan lain-lain. Kondisi Aceh pada saat itu benar-benar berada dalam kondisi yang sangat bebas dan terbuka, tanpa hambatan dan rintangan apapun untuk masuk ke wilayah Aceh.<sup>125</sup> Kondisi yang demikian di satu sisi bisa membawa kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan, karena banyak negara dan LSM yang berkunjung ke Aceh umumnya bertindak

---

<sup>125</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), h. 152.

sebagai donor dan pemberi bantuan dalam rangka pembangunan Aceh ke depan. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi semacam itu juga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menghancurkan Aceh dengan berbagai cara, termasuk dengan penyebaran aliran-aliran sesat yang dapat menghancurkan aqidah dan keyakinan masyarakat Aceh yang terkenal kental dengan keislamannya. Penyebaran aliran sesat di Aceh mulai terkuak ke publik beberapa tahun terakhir, yang paling mencengangkan masyarakat Aceh terkuaknya sebuah aliran sesat yang bernama "Aliran Millata Abraham" di Kabupaten Bireuen Aceh. Tertangkapnya pentolan aliran sesat Millata Abraham di Bireuen membuat Ketua MPU Bireuen Drs. Jamaluddin Abdullah, M.BA meminta STAI Almuslim ikut ambil bagian dalam penyelesaian dan pemantapan kembali aqidah islamiyah masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Bireuen. Sejak saat itu Jami'ah Almuslim melalui STAI Almuslim dengan lapang dada menerima permintaan tersebut dengan menunjuk beberapa dosen tetapnya guna pemantapan aqidah bagi para pengikut aliran sesat tersebut. Di antara dosen-dosen STAI Almuslim yang dikirim adalah Teungku Saifullah, Abuya Murtadha Yusuf, MA, Drs. Akhtiar Ismail, Lc, MA dan lain-lain. Berkat kepiawaian dosen-dosen ini dan dibantu oleh sejumlah anggota MPU Bireuen, akhirnya pengikut aliran sesat Millata Abraham ini berhasil ditangani dengan sebaik-baiknya.<sup>126</sup>

Kondisi semacam itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi perlu kewaspadaan tinggi semua pihak dalam rangka menjaga dan menyelamatkan keyakinan dan aqidah masyarakat Aceh yang terkenal sangat kental keislamannya. Atas dasar itu Jami'ah Almuslim terus bekerja sama dengan Dinas Syari'at Islam, Badan Dayah, Markas Besar Wilayatul Hisbah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat guna mendakal penyebaran aliran sesat di Aceh.<sup>127</sup>

### **3. Kontribusi Jami'ah Almuslim dalam Bidang Intelektual**

---

<sup>126</sup> Muchtar Almasyah, Ketua STAI Almuslim periode 2006-2010, wawancara di Matanglumpangdua, pada tanggal 27 Oktober 2010.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Jami'ah Almuslim sepanjang sejarahnya telah banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Aceh, khususnya dalam bidang intelektual. Sumbangan intelektual Jami'ah Almuslim tidak saja memenuhi hajat publik di Aceh, tetapi telah dapat memberikan kontribusinya sampai ke mancanegara. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam dokumen alumni Madrasah Almuslim, tersebut nama seperti Muhammad Yatim, Sulaiman, Saleh dan lain-lain sebagai alumni madrasah Almuslim yang berasal dari Perak Malaysia.<sup>128</sup>

Kontribusi Jami'ah Almuslim dalam bidang Intelektual dapat dilacak dari peran besarnya dalam melakukan pembaruan pendidikan di Aceh, baik melalui jalur lembaga pendidikan Madrasah nya secara internal, maupun melalui jalur organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) secara eksternal.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) memang bukan organisasi yang berada di bawah Jami'ah Almuslim, tetapi sejarah tidak terbantahkan, bahwa ide pembentukan dan yang memprakarsai terbentuknya PUSA adalah pengurus Jami'ah Almuslim.<sup>129</sup> Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap selaku Ketua Jami'ah Almuslim sudah lama merasakan bahwa ada tiga hal yang terganjal dan sulit untuk dilakukan dalam masyarakat Aceh, kecuali pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan kekuatan besar. *Pertama*, mengembalikan kejayaan Islam di tanah Aceh. *Kedua*, mempersatukan paham para ulama Aceh dalam memahami Islam secara universal. *Ketiga* penyeragaman kurikulum madrasah-madrasah yang ada di Aceh agar memudahkan bagi pelajar. Berawal dari kedatangannya untuk memenuhi undangan sebagai penceramah dalam acara peringatan maulid Nabi SAW dari warga Blang Jruen, Lhok Sukon, Aceh Utara, maka tokoh ulama tersebut berangkat ke daerah ini. Di sini ia disambut oleh Teungku Ismail Ya'kub, pimpinan Madrasah Bustan al-Ma'arif Blang Jruen. Keduanya terlibat pembicaraan mengenai ide untuk mendirikan sebuah organisasi

---

<sup>128</sup> Harun Ismail, *Lintasan Sejarah Almuslim dan Madrasah nya*, (Buku, tidak diterbitkan, 1993), h.27.

<sup>129</sup> Ali Hasjimy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa*, (Jaakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 85.

ulama sebagai wadah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Aceh serta dapat mempersatukan pengurusan madrasah-madrasah yang ada di seluruh Aceh.<sup>130</sup>

Sepulangnya dari Blang Jruen, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Teungku Ismâ'il Ya'kûb kepada kawan-kawan seperjuangannya di Matangglumpangdua, terutama kepada Teungku Usman Aziz Lhoksukon, salah seorang alumni Thawalib Padang, dan guru Madrasah Almuslim, yang merupakan tangan kanannya. Sejak itu, ide hendak mendirikan organisasi ulama itu disebarluaskan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan Teungku Usman Aziz ke seluruh Aceh, baik secara lisan melalui pertemuan maupun dengan perantaraan surat yang dikirimkan kepada para ulama yang belum sempat dikunjunginya. Ternyata ide tersebut mendapat sambutan baik dari para ulama, terutama Teungku Muhammad Daud Bereueh, pimpinan Madrasah Sa'âdah Abadiyah Blang Paseh, Sigli, Aceh Pidie, merupakan tokoh karismatik dalam masyarakat Aceh.<sup>131</sup>

Setelah persiapan dirasa cukup, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap mengundang semua ulama yang mempunyai pengaruh di Aceh untuk menghadiri musyawarah ulama yang akan dilangsungkan di Matangglumpangdua, Peusangan, Aceh Utara, tepatnya di kampus Madrasah Almuslim. Dengan suara bulat musyawarah tersebut menyetujui pembentukan Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang disingkat dengan PUSA.<sup>132</sup>

Setidak-tidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi berdirinya organisasi PUSA.<sup>133</sup> *Pertama*, adanya perpecahan di kalangan para ulama Aceh sesudah berakhirnya perang melawan Belanda. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh suasana perselisihan (*khilafiat* atau *antagonisme*) yang bibitnya memang sudah ada sejak dulu, akan tetapi, ditiup-tiup kembali oleh kaum penjajah ketika itu. Akibatnya, kontak dan komunikasi di kalangan ulama Aceh yang berada di satu daerah,

---

<sup>130</sup> Abd. Mukti, Peranan PUSA Dalam Pembaharuan Kehidupan Beragama di Aceh, dalam Hasan Asari (ed.), *Studi Islam dari Pemikiran Yunani ke Pengalaman Indonesia Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h.131.

<sup>131</sup> *Ibid*, h. 132

<sup>132</sup> Ismuha, *Riwayat Ringkas*, h. 76.

<sup>133</sup> Mukti, *Peranan PUSA*, h.130.

dengan ulama di daerah lainnya di Aceh kurang lancar. Karena itu mereka tidak lagi saling mengenal kegiatan yang satu dengan yang lainnya.

*Kedua*, diberlakukannya ordonansi guru untuk daerah Aceh oleh pemerintah Hindia Belanda, sejak tanggal 1 Januari 1927. Tujuan ordonansi ini adalah untuk mengawasi kegiatan guru agama. Untuk mendirikan sebuah pesantren atau madrasah, misalnya, diperlukan izin dari pemerintah setempat, dan untuk mendapatkan izin itu, harus dipenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah harus dibatasi mata pelajaran yang akan diajarkan, pada membaca, menulis Arab, keimanan (*tauhîd*) dan hukum Islam (*fiqh*). Syarat lainnya adalah bahwa tiap pelajar yang datang dari luar kota harus mempunyai surat keterangan dari pemerintah setempat, dan tiap tiga bulan sekali harus melapor kembali kepada pemerintah. Meskipun pada mulanya ordonansi guru ini hanya berlaku untuk daerah yang diperintah langsung oleh Belanda, yakni Aceh Besar dan Singkil. Namun dalam prakteknya berlaku juga pada daerah-daerah *zelgbestuurde* (pemerintah otonom) di luar kedua daerah ini. Dengan kebijakan ordonansi guru tersebut, menyebabkan *dayah-dayah* yang dibangun pada waktu itu tidak setaraf lagi dengan *dayah-dayah* yang ada sebelum Perang Aceh, baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya.

*Ketiga*, adanya pengaruh dari ide-ide kebangkitan Islam di Timur Tengah, dan pengaruh dari gagasan-gagasan para pembaharu Islam dari Mesir. Ide-ide kebangkitan Islam dan gagasan-gagasan pembaharu tersebut diperkenalkan ke Aceh antara lain oleh Teungku Syekh Haji Abdul Hamid Samalanga. Ia berada di Makkah sejak tahun 1926. Karena kondisi sosial politik di Aceh pada waktu itu menghendaki tokoh Aceh ini melarikan diri ke Makkah dan tinggal beberapa tahun di sana. Teungku Syekh Haji Abdul Hamid Samalanga memperkenalkan ide-ide kebangkitan Islam dan gagasan pembaharu tersebut dengan menuliskannya pada bagian pinggir majalah "*Umm al-Qurâ*" setiap kali terbit, dan kemudian ia kirimkan kepada teman-temannya di Aceh, termasuk Teungku Abdullah Ujong Rimba dan Teungku Muhammad Daud Beurueh, kemudian disampaikan kepada Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Begitu juga pemuda-pemuda Aceh yang belajar di Mesir pada waktu itu, mereka berusaha

menyerap ide-ide maupun gagasan-gagasan Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), Syekh Muhammad Abduh (1849-1905), Sayid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) dan reformis-reformis Mesir lainnya. Salah seorang di antaranya perlu dicatat disini adalah Teungku M. Nûr el-Ibrâhimy. Setelah kembali ke daerah asalnya, Aceh, ia dipercaya menduduki jabatan sebagai sekretaris umum dalam kepengurusan PUSA Karir intelektual muda ini cepat menanjak yakni dengan mendapat kepercayaan untuk memegang jabatan akademis sebagai direktur *Normal Islam Institute*, di Bireuen, sebuah lembaga pendidikan PUSA yang sangat bergengsi pada waktu itu. Ketiga faktor tersebut di ataslah yang mendorong perlu adanya satu organisasi ulama yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat Aceh dalam berbagai bidang.

PUSA mempunyai tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi'ar Islam yang suci, terutama di tanah Aceh yang pernah digelar dengan "Serambi Makkah" pada masa keemasannya yang telah silam. Dalam beberapa masa yang telah lalu sampai sekarang, telah berubah menjadi satu negeri yang ketinggalan dari tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam, dalam lembah kejahilan dan kegelapan. *Kedua*, mempersatukan faham ulama-ulama Aceh tentang cara menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang lampau, pertikaian faham antara ulama-ulama Aceh sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Pertikaian itu menjadi batu yang menggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci. *Ketiga*, memperbaiki dan mempersatukan model kurikulum madrasah di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan selama ini terjadi kesulitan besar bagi siswa-siswa madrasah di Aceh yang melakukan pemindahan belajar dari satu madrasah ke madrasah lainnya, karena kurikulum tidak sama.<sup>134</sup>

Salah satu peran PUSA yang sangat menonjol adalah dalam Pembaruan Pendidikan Islam sebagai kelanjutan dari cita-cita Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap selaku Ketua Yayasan Almuslim. Tampaknya pembaruan Pendidikan Islam di Aceh telah dimulai sejak adanya perubahan dalam cara

<sup>134</sup> Ismuha, "Ulama Aceh", h. 59.

mengajarkan pengetahuan agama dari sistem lingkaran studi (*halaqah*) ke sistem klasikal dalam tahun 1916. Perubahan ini dipelopori oleh Tuanku Raja Keumala, seorang ulama bangsawan, dengan mendirikan Madrasah al-Khairiyah dalam tahun itu, di Kutaraja. Madrasah inilah yang kemudian dikenal sebagai madrasah pertama di Aceh. Kemudian langkah Tuanku Raja Keumala tersebut diikuti oleh para tokoh pendidik lainnya di seluruh Aceh, sehingga pada tahun 1936 diperhitungkan jumlah madrasah di Aceh sudah mencapai 100 buah.<sup>135</sup>

Usaha-usaha pembaruan pendidikan Islam di Aceh kemudian dilanjutkan oleh PUSA dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam baru, yakni *Normal Islam Institute* di Bireuen, Aceh Utara, dalam tahun 1939, dan memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah.<sup>136</sup> Ketika itu masyarakat membenci pengetahuan yang disampaikan dengan menggunakan huruf Latin. Karena itu strategi yang ditempuh PUSA ialah dengan memberi nama setiap mata pelajaran umum itu dengan bahasa Arab, memakai tulisan Arab, dan diajarkan dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan asumsi masyarakat ketika itu yang memandang bahwa setiap pengetahuan yang berbahasa Arab adalah pelajaran Agama. Sebaliknya, semua pengetahuan yang berbahasa Latin berbau ke-Belandaan. Karena itu mereka membencinya, bahkan diharamkan mempelajarinya, hanya dengan alasan untuk membangkitkan semangat rakyat dan pemuda untuk melawan kolonialis Belanda. Jadi bukan haram fiqh, tetapi haram politik. Sayangnya fatwa ini masih dipegangi sampai sekarang dalam masyarakat. Hal ini berlaku juga di zaman kemunduran Islam yakni zaman pertengahan (1250-1800), karena ilmu-ilmu *'aqliyyat* pada waktu itu dicurigai, maka para penguasa dan ulama Sunni sepakat melarang ilmu-ilmu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Sunni. Sikap membenci ilmu-ilmu *'aqliyyat* inilah yang telah membawa kemunduran umat Islam sepanjang abad pertengahan tersebut. Sekarang musuh umat Islam adalah kebodohan dan kemiskinan, kedua hal ini hanya bisa diperangi dengan mengajarkan ilmu pengetahuan *naqliyyat* dan *'aqliyyat* pada lembaga

---

<sup>135</sup> Lihat: Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Anda Utama, 1993), jilid 3, h. 961.

<sup>136</sup> Ismuha, *Ringkasan Riwayat Hidup*, h. 21.

pendidikan Islam pada semua jenjang dan jenis pendidikan tanpa kecuali.<sup>137</sup>

Pembaruan pendidikan lainnya yang dijalankan PUSA ialah memasukkan mata pelajaran agama (*naqliyyat*) dalam kurikulum sekolah-sekolah umum. Untuk melaksanakan hal ini PUSA mendirikan dua unit Sekolah Menengah Pertama, yakni satu unit di Bireuen, Aceh Utara dan satu unit lagi di Idi, Aceh Timur, serta satu unit Sekolah Guru Atas (SGA) di Kutaraja. Ketiga unit sekolah ini didirikan dalam tahun 1952.<sup>32</sup>

PUSA memandang bahwa ilmu agama dan ilmu umum keduanya sama-sama penting bagi kemajuan umat manusia. Kalau lembaga pendidikan *dayah* lemah dalam pengetahuan umum, maka sekolah-sekolah umum lemah dalam pengetahuan agama. Karena itu PUSA memandang perlu penggabungan (*konvergensi*) kurikulum *dayah* yang mementingkan pendidikan agama dengan kurikulum sekolah-sekolah umum yang hanya mengajarkan pengetahuan umum. Ketika itu kurikulum dan silabus madrasah-madrasah yang ada di Aceh ternyata tidak memiliki keseragaman. Hal ini menurut PUSA akan menyulitkan bagi pelajar-pelajar yang ingin pindah dari satu madrasah ke madrasah lainnya. Upaya menyeragamkan kurikulum dan silabus madrasah dimaksud terbentur pada tidak adanya tenaga-tenaga guru yang siap pakai. Untuk mengatasi kesulitan ini, PUSA mencetak tenaga-tenaga guru yang siap pakai terlebih dahulu melalui sekolah guru. Maka didirikanlah *Normal Islam Institute (Ma'hâd al-Muallimîn)* di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939, dan sebagai direktornya diangkat Teungku Muhammad Nur el-Ibrahimi.<sup>138</sup> Dalam acara peresmian pembukaan Normal Islam Institut ini, selain dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Besar PUSA, juga dihadiri oleh wakil pemerintah dan para undangan lainnya. Di zaman PUSA, Bireuen dengan perguruan Normal Islam Institutnya, berperan sebagai salah satu pusat pendidikan penting di Aceh, sama halnya dengan Matangglumpangdua,

---

<sup>137</sup> Abd. Mukti, *Peranan PUSA*, h. 138.

<sup>138</sup> Teungku M. Nur el-Ibrahimi, seorang pemuda Aceh, ketika itu belajar di Universitas al-Azhar di Mesir, ia banyak membaca ide-ide Jamaluddin al-Afghani (1839-1879), Syekh Muhammad Abduh (1849-1905) dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Ketiganya tokoh pembaruan pendidikan Islam berkebangsaan Mesir. Sebelum menjadi direktur Normal Islam Institut, Teungku M. Nur el-Ibrahimi, menjabat sebagai sekretaris umum PUSA. Lihat Baihaqi A.K. "Ulama dan Madrasah Aceh", h. 165.

dengan Madrasah Almuslimnya. Kedua kota ini berada di wilayah Aceh Utara.

Demikianlah PUSA memainkan perannya dalam masyarakat Aceh sehingga PUSA dapat mewarnai kehidupan sosial intelektual masyarakat Aceh pada era tahun 40-an. Semua peran PUSA tersebut tidak terlepas dari kontribusi Yayasan Almuslim secara institusional dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap selaku ketua Jami'ah Almuslim.

Di sisi lain, Jami'ah Almuslim sepanjang sejarahnya selalu sejalan dengan pemerintah dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan cita-cita leluhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikan, Yayasan ini telah mampu mencetak kader-kader bangsa, para ulama Intelektual yang berpaham modern, para guru, pegawai birokrasi pemerintahan, polisi, tentara, tokoh politik, pedagang yang tangguh dan kader-kader lainnya yang bergerak sesuai profesi masing-masing. Mereka semua adalah kader bangsa yang telah mensukseskan pembangunan nasional.

Pendapat di atas dibenarkan H.M. Ali Muhammad, salah seorang alumni Madrasah Almuslim, menerangkan bahwa

Alumni Almuslim, karena tempaan pimpinan dan gurunya pada umumnya mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat, sebagai guru, pegawai negeri, dalam kemiliteran dan kepolisian, tokoh-tokoh politik dan pedagang, setidaknya menjadi Imam\Khatib di *gampung*-nya dan alumni-alumni Almuslim banyak bertebaran untuk menuntut ilmu pengetahuan di perguruan lain yang lebih tinggi seperti Normal Islam dan *Kulliaat al Muballighin* di Padang, Normal Islam Institut PUSA Bireuen dan dari situ berkembang lagi mereka menuntut ilmu di berbagai macam Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.<sup>139</sup>

Kiprah alumni tersebut telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan intelektual masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai bukti kongkrit berikut ini akan dipaparkan beberapa alumni Almuslim yang telah mendarmabaktikan perannya dalam peta intelektual Islam di Aceh khususnya dan Indonesia umumnya.

---

<sup>139</sup> M. Ali Muhammad, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketrampilan Peserta Didik*, (Buku, tidak diterbitkan, 1984), h. 60.

*Pertama*, Prof. Dr. Haji Ismuha, SH. Menurut Iskandar Usman bahwa Prof. Dr. Haji Ismuha, SH adalah seorang intelektual Aceh yang sangat berhasil dalam memadukan paling tidak empat hal penting, yaitu ketaatannya dalam beribadah, kecerdasannya dalam menguasai ilmu pengetahuan, kemauannya dalam belajar, dan kedisiplinannya dalam menjaga waktu. Itulah sebabnya, ia berhasil meraih sejumlah kesuksesan, seperti memperjuangkan kemerdekaan bangsa, merintis pendirian IAIN Sumatera Utara, mendidik anak-anaknya hingga semuanya berhasil, dan lain-lain.<sup>140</sup> Ismuha lahir di *gampong* Pantee Piyeue, Matangglumpangdua, tanggal 20 Desember 1923, ia merupakan anak dari pasangan suami istri Teungku Muhammad Syah-Cut Afifah. Nama aslinya, Ismail. Seperti biasanya nama-nama orang Islam di Aceh ditambahkan nama orang tuanya di belakang nama aslinya, sehingga nama Ismail menjadi Ismail Muhammad Syah. Namun namanya itu sering disingkat, sehingga menjadi ISMUHA. Pendidikannya dimulai dari orang tuanya setelah itu ia belajar di *Meunasah* Pantee Piyeue, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Almuslim selama tujuh tahun dan menamatkan pendidikannya pada tahun 1937 dengan nilai lulusan terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Normal Islam Institut, sekolah guru yang didirikan oleh organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Bireuen dan tamat pada tahun 1943. Institut ini merupakan suatu tingkat sekolah yang paling tinggi di Aceh pada masa itu, dan Ismuha termasuk mahasiswa angkatan pertamanya. Ismuha telah memberikan kontribusi aktifnya dalam memajukan pendidikan di Aceh, dalam karir kerjanya Ismuha memang naik secara teratur dari bawah. Dia memulai karirnya sebagai pegawai Atjeh *Syu Siboo* (Kehakiman daerah Aceh) di Kutaraja Tahun 1943-1945. Sepulangnya dari kursus penerjemahan Bahasa Jepang di Bukit Tinggi, ia diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Kutaraja *Tihoo Hoooin* (Pengadilan Negeri Kutaraja) dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada tahun 1950, Ismuha bekerja sebagai pegawai di Departemen Kehakiman RI di Yogyakarta sampai tahun 1958. Setelah itu, ia menjadi guru PGA II Yogyakarta sampai tahun 1961.

---

<sup>140</sup> Iskandar Budiman, dkk., *Biografi Rektor-Rektor IAIN Ar-Raniry: Kepemimpinan IAIN Ar-Raniry dari masa ke masa*, (Banda Aceh: Citra Kreasi Utama, 2008), h. 43.

Pada tahun 1961 Ismuha menjadi dosen di IAIN Yogyakarta, kemudian pindah menjadi dosen IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus terpilih sebagai dekannya. Pada ketika umurnya mencapai 42 tahun, tepatnya pada tahun 1965 dia terpilih sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>141</sup> Dalam dunia pemerintahan, Ismuha juga pernah dipercayakan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA-RI) membidangi Komisi Politik dan Kesejahteraan Rakyat dari tahun 1988 sampai tahun 1993.<sup>142</sup> Inilah *Setting* intelektual yang diperankan oleh Ismuha yang merupakan salah seorang alumni Madrasah Almuslim. Jika dilihat dari sejumlah jabatan yang diembannya, maka wajar jika orang berpendapat bahwa Jami'ah Almuslim telah memberikan kontribusi positifnya dalam mewarnai intelektual masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang salah satunya telah dapat dilihat secara jelas apa yang telah dilakukan oleh alumninya.

*Kedua*, T. A. Lathief Rousdiy. Lahir di Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Teungah pada tahun 1923. Beliau belajar tingkat dasar pada sekolah Belanda yang bernama *Volleschool*, tamat pada tahun 1935, kemudian melanjutkan tingkat Tsanawiyah ke Madrasah Almuslim cabang Cot Meurak Bireuen selama tiga tahun, Kemudian pada tahun 1939 melanjutkan pendidikan ke tingkat Aliyah pada Madrasah Induk Almuslim Matangglumpangduapada, tamat pada tahun 1945. Jebolan madrasah Almuslim ini selama hidupnya telah banyak memberikan kontribusinya dalam percaturan intelektual di Aceh. Karirnya diawali menjadi guru, di Aceh Tengah, menjadi Anggota DPR Aceh Tengah dari tahun 1947 sampai tahun 1952, kemudian menjadi anggota DPR Provinsi Aceh pada tahun 1957 hingga 1961, Direktur Pendidikan Pegawai Staf Departemen Penerangan Sumatera Utara, guru Bina Mental ABRI Kowilhan I, Sumatera dan Kalimantan Barat mulai tahun 1970 sampai tahun 1989. Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pada tahun 1977 dipercayakan menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga tahun 1980. Walaupun dia meniti karirnya di birokrasi, politisi dan

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>142</sup> Baca: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 1988.

akademisi, namun beliau juga tetap melakukan dakwah Islam dengan tema-tema pembaruan, sehingga membuat dia sangat terkenal dalam masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Berbagai kiprah dan aktifitas yang dia lakukan tidak terlepas dari pemikiran pembaruan yang diterimanya pada masa belajar di Madrasah Almuslim Peusangan Aceh yang didirikan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap.<sup>143</sup>

*Ketiga*, Muhammad Yatim. Lahir di Perak Malaysia pada tahun 1920, Beliau berangkat ke Aceh pada tahun 1935 bersama dua orang kawannya yaitu Sulaiman dan Saleh dalam rangka *Rihlah Ilmiah* (menuntut Ilmu pengetahuan). Sebelum sampai ke Aceh mereka telah banyak mendengar kabar tentang Yayasan Almuslim dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap di Matangglumpangdua Aceh yang mendirikan sebuah Sekolah Islam dengan memakai sistem modern, memakai bahasa Melayu (Aceh: Bahasa Jawoe) sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Di samping itu, dia mendengar kabar bahwa pada Madrasah Almuslim telah diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu-ilmu agama (*al-'ulûm al-naqliyyat/al-syar'iiyyat/al-diniyyat/religious studies*) dan ilmu-ilmu umum (*al-'ulûm al-'aqliyyat/secular studies*), sehingga Muhammad Yatim bersama dua orang kawannya bergegas mengunjungi Aceh pada tahun 1935 dan langsung mendaftar menjadi murid Madrasah Almuslim di Matangglumpangdua Aceh. Ketiga-tiganya berhasil menamatkan pendidikannya pada Madrasah Almuslim di tahun 1942, kemudian kembali ke Malaysia. Mengawali karirnya di Malaysia menjadi guru dan giat melakukan dakwah Islam dengan tema-tema pembaruan di segala bidang dan aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Ilmu pengetahuan yang ia darmabaktikan tidak terlepas dari peran signifikan yang dimainkan oleh Madrasah Almuslim selaku almamaternya.<sup>144</sup>

Alumni-alumni yang telah penulis ketengahkan di atas merupakan sebagian kecil dari alumni Almuslim. Masih banyak lagi alumni-alumni yang

---

<sup>143</sup> Baca: Shabri A. dan Sudirman, S.S., *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*, jilid III, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005), h. 82.

<sup>144</sup> Muhammad Nur Nikmat, Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim (MPA) Yayasan Almuslim, periode 1979-1984, wawancara di Medan tanggal 6 September 2010.

berasal dari berbagai daerah di Aceh dan Indonesia, seperti T.A. Mahmudy dari Lhokseumawe, Teungku Cek Mat dari Aceh Barat, Teungku Said Ahmad dari Kutaraja, Teungku Salim Makmy dari Pereulak Aceh Timur, Teungku Said Ibrahim dari Aceh Pidie, Engku Nurdin dari Sumatera Barat dan lain-lain.<sup>145</sup>

Badruzzaman Ismaïl, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) menjelaskan bahwa Kontribusi Jami'ah Almuslim terhadap perkembangan Intelektual di Aceh tidak bisa dipandang sebelah mata, para alumninya telah berbuat banyak dalam masyarakat Aceh, terutama dalam dunia pendidikan. Alumni-alumni Almuslim telah banyak mendirikan sekolah-sekolah Islam modern di Aceh sampai ke Aceh Selatan, Aceh Barat dan Aceh Teungah. Hasil dari perkembangan dan kemajuan pendidikan sistem modern ini telah menelorkan sekian banyak ulama-ulama modern yang kemudian sangat berperan dalam perjuangan dan mempertahankan tanah air di bumi Aceh sekaligus mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sumber daya manusia.<sup>146</sup>

Kontribusi Jami'ah Almuslim dewasa ini sangat terasa oleh masyarakat Aceh. Sejak tahun 1985, Jami'ah Almuslim telah mendirikan sebuah Sekolah Tinggi yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Almuslim, kemudian tahun 1986 kembali mendirikan sebuah sekolah tinggi lainnya yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, kemudian pada tahun 1987 menambah satu lagi yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Semenjak itu, Almuslim telah banyak mensuplai tenaga guru untuk berbagai lembaga pendidikan di Aceh, di samping tenaga-tenaga *skill* di bidang pertanian yang kebanyakan mereka adalah berasal dari Aceh Teungah.

Kondisi terakhir Jami'ah Almuslim telah mendirikan sebuah Universitas (2003) dan sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim (2010). STAI Almuslim memiliki tiga Program Studi yaitu, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Sedangkan Universitas Almuslim telah memiliki enam fakultas dan

---

<sup>145</sup> Baca: Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 27.

<sup>146</sup> Badruzzaman Ismail, "Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama Di Aceh" dalam *Perkembangan Pendidikan Islam di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Gua Hira', 1995), h. 161.

satu diploma III, dengan sembilanbelas Program Studi.<sup>147</sup> Rinciannya sebagai berikut:

1. Fakultas Pertanian
  - 1) Program Studi Agribisnis (S1)
  - 2) Program Studi Peternakan (S1)
  - 3) Program Studi Agroteknologi (S1)
  - 4) Budi Daya Perairan (S1)
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
  - 1) Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
  - 2) Program Studi Pendidikan Biologi (S1)
  - 3) Program Studi Pendidikan Fisika (S1)
  - 4) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)
  - 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
  - 6) Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi (S1)
  - 7) Program Studi Pendidikan Geografi (S1)
  - 8) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
3. Fakultas Teknik
  - 1) Program Studi Teknik Sipil (S1)
  - 2) Program Studi Arsitektur (D-III)
4. Fakultas Ekonomi
  - 1) Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
  - 1) Program Studi Administrasi Negara (S1)
  - 2) Program Studi Administrasi Niaga (S1)
6. Fakultas Ilmu Komputer
  - 1) Program Studi Manajemen Informatika (D-III)
  - 2) Program Studi Teknik Informatika (S1)

---

<sup>147</sup> Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim, Periode 2006-2010 dan juga Wakil Ketua Pengurus Jami'ah Almuslim, periode 2010-2015, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 26 Oktober 2010.

## 7. Program Diploma III Kebidanan

Keberadaan berbagai program studi Universitas Almuslim dan Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim yang sedemikian banyak, ditambah lagi dengan banyaknya mahasiswa dan minat orang tua menyekolahkan anaknya ke STAI dan Universitas Almuslim dapat memberi gambaran bahwa Jami'ah Almuslim makin dipercaya oleh masyarakat Aceh sampai saat ini. Keadaan yang demikian menarik perhatian Koordinator Kopertis Wilayah I Aceh-Sumatera Utara, dalam pidatonya pada acara wisuda sarjana Universitas Almuslim bulan Juni 2010, menyatakan bahwa Universitas Almuslim merupakan Universitas Swasta terbaik saat ini di Aceh.<sup>148</sup> Inilah kontribusi nyata yang telah dipersembahkan Jami'ah Almuslim kepada masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

## 4. Kontribusi Jami'ah Almuslim Dalam Bidang Politik

Kontribusi Jami'ah Almsulim dalam bidang politik dapat terlihat dari sepak terjang Jami'ah ini sejak tahun 1929 sampai dengan tahun 2010, baik secara intitusional, maupun personal pengurus Jami'ah Almuslim. Hal ini bisa terlihat dari gambaran yang dipaparkan Harun Ismail selaku salah seorang pengurus Jami'ah Almuslim bahwa:

Pembangunan sebuah organisasi dan lembaga pendidikan yang besar seperti ini apalagi dibangun oleh swasta, lazimnya memakan waktu yang agak lama, berbeda dengan pembangunan gedung pendidikan Jami'ah Almuslim yang bisa dimanfaatkan dengan segera, tentu hal ini menjadi tanda tanya besar, tapi perlu diketahui bahwa keberhasilan ini disebabkan adanya konsensus politik antara penguasa dan ulama, dalam hal ini Teuku Haji Chik Johan Alamsyah selaku *zelfbestuurder van Peusangan* dengan para alim ulama.<sup>149</sup>

Salah satu yang menjadi tanggung jawab pemerintah (*uleebalang*) adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam wilayah kekuasaannya, maka dengan berdirinya Jami'ah Almuslim yang salah satu tujuannya adalah mendirikan sekolah-sekolah Islam modern, tanggung jawab pemerintah (*uleebalang*) tersebut sedikit banyaknya telah terpundakkan kepada Jami'ah ini. Dengan demikian dapat

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Ismail, *Lintasan Sejarah*, h. 16.

dikatakan bahwa sejak pertama berdirinya Jami'ah Almuslim sudah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan *uleebalang* ketika itu.

Pada zaman pendudukan Jepang yang dimulai pada tanggal 12 Maret 1942, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap selaku ketua Jami'ah Almuslim bersama dengan pengurus Jami'ah Almuslim lainnya yang tergabung dalam ulama leter F, ikut menjemput kedatangan Jepang dan mengusir penjajahan Hindia Belanda dari bumi Aceh. Kemudian, karena kepiawiannya, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dilantik menjadi *Qâdî Tyo* (Kepala Kadi Kabupaten Aceh Utara) pada pemerintahan Jepang. Sekali lagi bahwa Jami'ah Almuslim ikut memberikan andil besar dalam pemerintahan di waktu itu. Walaupun kemudian Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap tetap menjadi simbol perlawanan kepada pemerintahan Jepang, karena memang sikap dan tingkah laku Pemerintahan Militer Jepang tidak menepati janjinya, yaitu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia jika para ulama ikut membantu pemerintahan Jepang dalam mengusir Kolonial Belanda di Nusantara.

Setelah Indonesia merdeka, Jami'ah Almuslim ikut aktif memberikan kontribusinya secara nyata kepada Pemerintah Republik Indonesia. *Pertama*, ikut melucuti senjata Jepang di Krueng Panjoe dan Geulanggang Labu ketika detik-detik proklamasi dikumandangkan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai konsekwensi yang berat, karena pemerintah Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia dan rupanya juga mendapat bantuan dari sekutu, terbukti sekutu membonceng Belanda masuk Indonesia termasuk Aceh. Karena itu, begitu berita Proklamasi diterima di Aceh, semua rakyat siap sedia berlatih, menjaga pantai dan membentuk barisan perjuangan seperti Mujahidin dan Pesindo. Untuk menambah senjata perjuangan, maka Tentara Pelajar Islam (TPI) bersama masyarakat melucuti senjata militer Jepang di Krueng Panjoe dan Geulanggang Labu. Tentara Pelajar Islam (TPI) adalah terdiri dari pelajar Sekolah Menengah Islam (SMI) Bireuen dan pelajar-pelajar Madrasah Almuslim kelas V ke atas.

*Kedua*, sesudah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia datang di Aceh, golongan *Cumbok* di Aceh Pidie menentanginya, sehingga terjadilah *Peristiwa*

*Cumbok* yang masyhur itu. Golongan rakyat yang mendukung proklamasi mengirimkan utusan ke Aceh Utara untuk meminta bantuan. Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap mengerahkan pasukannya bekas *Gyu Gun* (tentara Jepang), dengan senjata yang berhasil dirampas dari Jepang di Krueng Panjoe dan Geulanggang Labu dengan menumpang kereta api khusus dari Lhokseumawe menuju daerah bergolak di Pidie. Beliau bersama pasukannya baru pulang sesudah golongan *Cumbok* yang mengkhianati proklamasi itu dapat dihancurkan. Satu hal yang patut dicatat bahwa Komandan Kolonel Syamaun Gaharu datang ke Sigli dengan maksud untuk meleraikan pertempuran antara rakyat dan golongan *Cumbok*. Tetapi oleh rakyat disangkanya memihak *Cumbok*, lalu hendak dibunuh. Untunglah Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap segera datang dan menjamin bahwa Kolonel Syamaun Gaharu tidak memihak *Cumbok*. Dengan demikian, Kolonel Syamaun Gaharu selamat. Begitulah semangat juang Teungku Abdurrahman dalam mempertahankan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.<sup>150</sup>

*Ketiga*, membentuk organisasi Tentara Pelajar Islam (TPI) dalam rangka menjaga dan mengawal Proklamasi Kemerdekaan dari Belanda dan sekutunya.

*Keempat*, kampus Jami'ah Almuslim direlakan untuk dipakai sebagai markas besar Tentara Pelajar Islam (TPI) dalam rangka mengawal proklamasi kemerdekaan Indonesia.<sup>151</sup>

*Kelima*, pada tahun 1946 Teungku Abdurrahman diangkat menjadi Kepala Dewan Agama Islam, sebagai pengganti dari *Syukyo Hooiin* di Zaman Jepang yang berkedudukan di Banda Aceh. Setelah Dewan Agama Islam dihapus, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap pada tahun 1948 diangkat menjadi Kepala Pejabat Agama Bahagian Islam Keresidenan Aceh.<sup>152</sup> Sewaktu pembentukan Provinsi Sumatera Utara pertama kali dan Pejabat Agama berubah strukturnya, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap diangkat menjadi Kepala Bahagian Tata Hukum pada Jabatan Agama Sumatera Utara. Tetapi karena

---

<sup>150</sup> Hasjimy, *Ulama Aceh*, h. 88

<sup>151</sup> Ismuha, *Riwayat Singkat*, h. 78.

<sup>152</sup> *Ibid.*, h. 24.

kondisi beliau dalam keadaan sakit di Takengon, Aceh Teungah, maka jabatan tersebut tidak dapat dijalankan.<sup>153</sup>

*Keenam*, setelah kondisi Negara dalam keadaan yang benar-benar aman, maka seluruh Pengurus Jami'ah Almuslim merapatkan barisan dan kembali ke pangkalan Almuslim. Ketika itu yang pertama dilakukan adalah merubah ideologi Jami'ah Almuslim, kalau sebelumnya dalam Anggaran Dasar (AD) Jami'ah Almuslim disebutkan bahwa Jami'ah Almuslim berazaskan "al-Qur-ân dan Hâdits", diganti dengan berazaskan "Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Kalau sebelumnya Jami'ah Almuslim bertujuan "untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syari'at Islam", diganti dengan tujuan "Meningkatkan serta memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam yang sesuai dan selaras dengan Falsafah Negara Republik Indonesia."<sup>154</sup> Perubahan ini tentunya merupakan respon Jami'ah Almuslim terhadap perkembangan politik dalam kehidupan bernegara agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat.

*Ketujuh*, setelah perubahan ideogi selesai dimantapkan, kemudian Jami'ah Almuslim mulai memainkan perannya dalam memberikan kontribusi positif kepada pemerintah: *Pertama*, mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan seperti Madrasah/Sekolah baik Tsanawiyah, Aliyah, SMI, PGA, SMA, Pendidkan Tinggi seperti STIT, STIP, ST-KIP, STAI, Universitas, dan lembaga-lembaga kursus lainnya. Semua ini dilakukan dalam rangka membantu pemerintah dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa tercinta.

*Kedelapan*, akhir-akhir ini mulai tahun 2000, Jami'ah Almuslim dalam hal ini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Almuslim, ikut aktif membantu Pemerintah dalam rangka melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah*, seperti bekerjasama dengan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen dalam membina "Gampong Berwawasan Syari'at Islam", melakukan pembekalan kepada Polisi Syari'at Islam (*wilayat al-hisbah*), melakukan kerjasama dengan pemerintah

<sup>153</sup> Hasjimy, *Ulama Aceh*, h. 89.

<sup>154</sup> Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan Nomor: 08/M.P.A/1979. Bandingkan dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan Nomor: 06/MPA/1984.

dalam rangka melakukan akreditasi *dayah*, ikut membantu pemerintah dalam rangka menyiapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), ikut merancang sejumlah aturan dan mekanisme operasional *Wilayat al-Hisbah*.<sup>155</sup>

*Kesembilan*, Jami'ah Almuslim bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Badan Bâyt al-Mâl Kabupaten Bireuen serta Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kabupaten Bireuen Aceh dalam rangka melaksanakan program pemerintah Aceh tentang pemberantasan buta huruf Alquran bagi siswa-siswi Aceh melalui sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi. Program pemberantasan buta huruf Alquran ini dicetuskan bersamaan dengan diberlakukannya wajib bisa baca Alquran bagi pejabat-pejabat birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh.<sup>156</sup>

*Kesepuluh*, Amiruddin Idris, Rektor Universitas Almuslim menjadi Wakil Bupati Bireuen, Periode 2002-2007 yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bireuen. Demikian juga dengan Anwar Idris, Ketua Dewan Pengawas Jami'ah Almuslim dan juga alumni Almuslim kembali terpilih sebagai anggota DPR Aceh periode 2009-2014. Masih banyak lagi kader-kader lain yang duduk di lembaga politik, baik di Aceh maupun di tingkat pusat yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang politik. Uraian di atas menunjukkan bahwa kehadiran Jami'ah Almuslim di tengah-tengah masyarakat Aceh terasa sangat bermanfaat bagi pemerintah.

---

<sup>155</sup> Mukhtar Alamsyah, Ketua STAI Almuslim, wawancara di Matangglumpangdua, tanggal 28 Agustus 2010.

<sup>156</sup> *Ibid.*